



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 – 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000](#) tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. [Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
14. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 memuat:

- a. penjabaran visi, misi, dan program Gubernur Banten yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional;
- b. arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD Pasal 3

Sistematika RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2012-2017

Pasal 5

- (1) RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017 menjadi pedoman untuk penyusunan:
 - a. RENSTRA SKPD;
 - b. RKPD;
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
 - d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2012

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

SISTEMATIKA RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	
1.3 Hubungan Antar Dokumen	
1.4 Maksud dan Tujuan	
1.5 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
2.3 Aspek Pelayanan Umum	
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	
2.5 Standar Pelayanan Minimal	
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Pendapatan Daerah	
3.2 Belanja Daerah	
3.3 Pembiayaan Daerah	
3.4 Neraca Daerah	
3.5 Rencana Kerangka Pendanaan	
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1 Isu Strategis Internasional	
4.2 Isu Strategis Nasional	
4.3 Isu Strategis Daerah	
4.4 Isu Strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....
5.1	Visi
5.2	Misi.....
5.3	Tujuan dan Sasaran.....
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1	Strategi
6.2	Arah Kebijakan
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....
7.1	Kebijakan Umum Pembangunan Daerah
7.2	Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas.....
8.2	Kebutuhan Pendanaan.....
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....
BAB X	PENUTUP
10.1	Pedoman Transisi.....
10.2	Kaidah Pelaksanaan.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010	22
Tabel 2.2	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 1961-2010	23
Tabel 2.3	Penduduk Menurut Kelompok Usia di Provinsi Banten Tahun 2010	24
Tabel 2.4	Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2009-2011	25
Tabel 2.5	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2010	27
Tabel 2.6	Indikator Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2008-2010	29
Tabel 2.7	Statistik Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010	30
Tabel 2.8	Statistik Transportasi Darat di di Provinsi Banten Tahun 2009-2010	31
Tabel 2.9	Statistik Perumahan di Provinsi Banten Tahun 2009-2010 (%)	32
Tabel 2.10	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011	35
Tabel 2.11	Kawasan Lindung di Provinsi Banten Tahun 2009	37
Tabel 2.12	Rencana Pemanfaatan Ruang di Provinsi Banten Tahun 2012-2017	38
Tabel 2.13	Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2010-2012	46
Tabel 2.14	Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2010-2011	47
Tabel 2.15	Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2012	48
Tabel 2.16	Konsumsi Pangan di Provinsi Banten Tahun 2010	49
Tabel 2.17	Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011	49
Tabel 2.18	Luas Lahan Sawah di Provinsi Banten Tahun 2009.....	50
Tabel 2.19	Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2011	50
Tabel 2.20	Produksi Buah, Bunga dan Obat-Obatan di Provinsi Banten Tahun 2011	51
Tabel 2.21	Produksi Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2011	51

Tabel 2.22	Produksi dan Sentra Peternakan di Provinsi Banten Tahun 2011	52
Tabel 2.23	Luasan, Produksi dan Daerah Sebaran Komoditas Perkebunan di Provinsi Banten Tahun 2010	52
Tabel 2.24	Produksi Perikanan di Provinsi Banten Tahun 2010.....	53
Tabel 2.25	Perkembangan Ekspor dan Import di Provinsi Banten Tahun 2010-2011	56
Tabel 2.26	Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2008-2010	59
Tabel 2.27	Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumahtangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Provinsi Banten Tahun 2010-2011(Rp)	59
Tabel 2.28	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten Tahun 2010-2011	60
Tabel 2.29	Panjang Jalan Menurut Type Permukaan, Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011	61
Tabel 2.30	Perkembangan dan Peringkat Investasi di Provinsi Banten Tahun 2006-2011	64
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta).....	79
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2011	83
Tabel 3.3	Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007-2011	86
Tabel 3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)	89
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Rp. Juta)	93
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (%)	94
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (Rp. Juta).....	95
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (Rp. Juta).....	96
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011	96
Tabel 3.10	Rencana Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2017.....	98
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2017 (Rp. Juta).....	100

Tabel 3.12 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007-2011	102
Tabel 3.13 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011	103
Tabel 3.14 Proyeksi tentang Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2017 (Rp. Juta).....	105
Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2017	105
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	148
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	168
Tabel 7.1 Program Pemerintah Provinsi Banten dalam Merespon Program MDGs	220
Tabel 7.2 Program Prioritas RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	221
Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017	226
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	273
Tabel 9.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2014...	285
Tabel 9.2. Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Pendapatan Perkapita di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2014.....	286
Tabel 9.3 Capaian dan Estimasi Tahun Perencanaan Indikator Makro Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025	286
Tabel 9.4 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	287
Tabel 9.5 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Serang Tahun 2009-2017	287
Tabel 9.6 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Cilegon Tahun 2011-2017	288
Tabel 9.7 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2009-2017	288
Tabel 9.8 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2009-2017	289
Tabel 9.9 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Serang Tahun 2009-2017	289

Tabel 9.10 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2017	290
Tabel 9.11 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Lebak Tahun 2009-2017	290
Tabel 9.12 Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2017	291
Tabel 9.13 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten	292

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	19
Gambar 2.1	Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2010.....	23
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten Tahun 2010.....	24
Gambar 2.3	Grafik Perkembangan Nilai PDRB Banten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011(Rp. Juta).....	26
Gambar 2.4	Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Banten Tahun 2007-2011 (%).....	26
Gambar 2.5	Grafik Perkembangan Tingkat IPM Provinsi Banten Tahun 2006-2010.....	27
Gambar 2.6	Grafik Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret-September 2011.....	28
Gambar 2.7	Grafik Rasio Murid-Guru SD, SLTP, dan SLTA di Provinsi Banten Tahun 2010.....	29
Gambar 2.8	Grafik Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2010.....	30
Gambar 2.9	Grafik Persentase Rumah tangga Pengguna Telepon dan Internet di Provinsi Banten Tahun 2009-2010...	35
Gambar 2.10	Grafik Komposisi Sektor Pekerjaan Usia Kerja Yang Bekerja di Provinsi Banten Tahun 2010	47
Gambar 2.11	Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten Tahun 2002-2011 (%).....	55
Gambar 2.12	Grafik Struktur Investasi di Provinsi Banten	64
Gambar 3.1	Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (%).....	80
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2011(Rp. Juta).....	80
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011(%).....	81
Gambar 3.4	Grafik Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011(Rp. Juta).....	81
Gambar 3.5	Grafik Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Banten Tahun 2007-2011(Rp. Juta).....	82

Gambar 3.6	Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Rp. Juta).....	82
Gambar 7.1	Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional	220

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (*Tahap Akselerasi I*) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan **Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;

2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun fokus pembangunan pada tahap *Akselerasi I* meliputi;

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;
3. Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;
4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maka dalam penyusunan RPJMD agar memperhatikan RPJMN. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 telah ditetapkan **Visi yakni Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan serta Misi** yang meliputi

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dan
3. Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang melalui pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yakni
 - 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Penanggulangan kemiskinan;

- 5) Ketahanan pangan;
- 6) Infrastruktur;
- 7) Iklim investasi dan usaha;
- 8) Energi;
- 9) Lingkungan hidup dan bencana;
- 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
- 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi serta
- 12) Tiga prioritas lainnya, yaitu)
 - a) bidang politik, hukum dan keamanan;
 - b) bidang perekonomian; dan
 - c) bidang kesejahteraan rakyat.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2007-2012.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

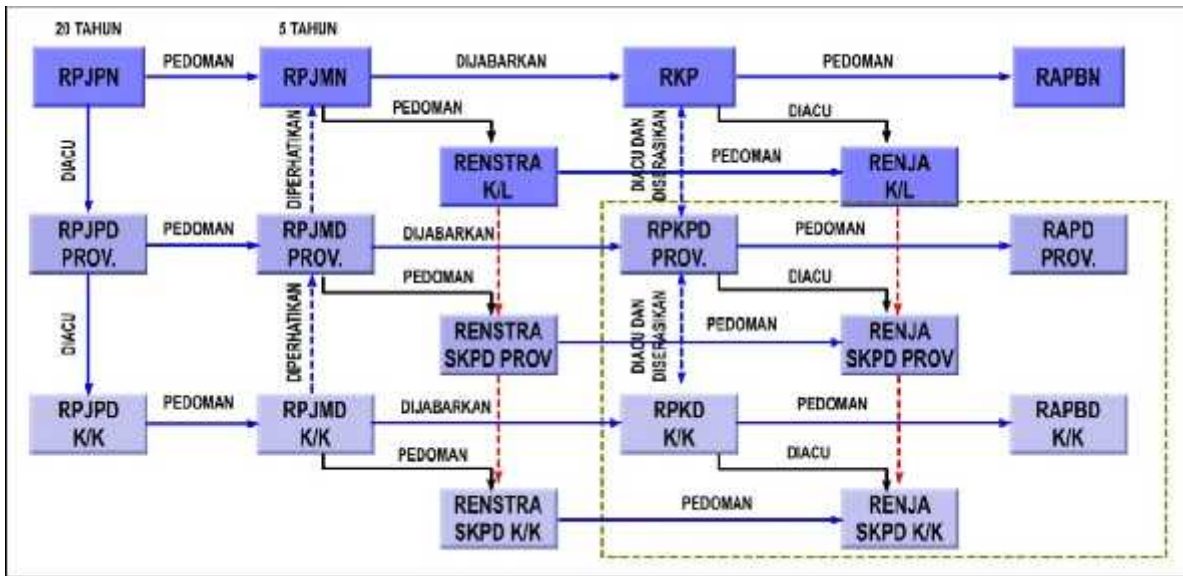
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-SKPD.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga diacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.1.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan RPJMD;

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat Data dan Informasi tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Neraca Daerah dan Rencana Kerangka Pendanaan;

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Isu Strategis Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi penjelasan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi;

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat pencalonan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD;

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat Program Prioritas, Indikator Kinerja Program dan Indikasi Pendanaan secara series tahunan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang dikelompokkan ke dalam 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan;

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Daerah yang dirumpunkan kedalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi per tahun sampai akhir masa jabatan Tahun 2017;

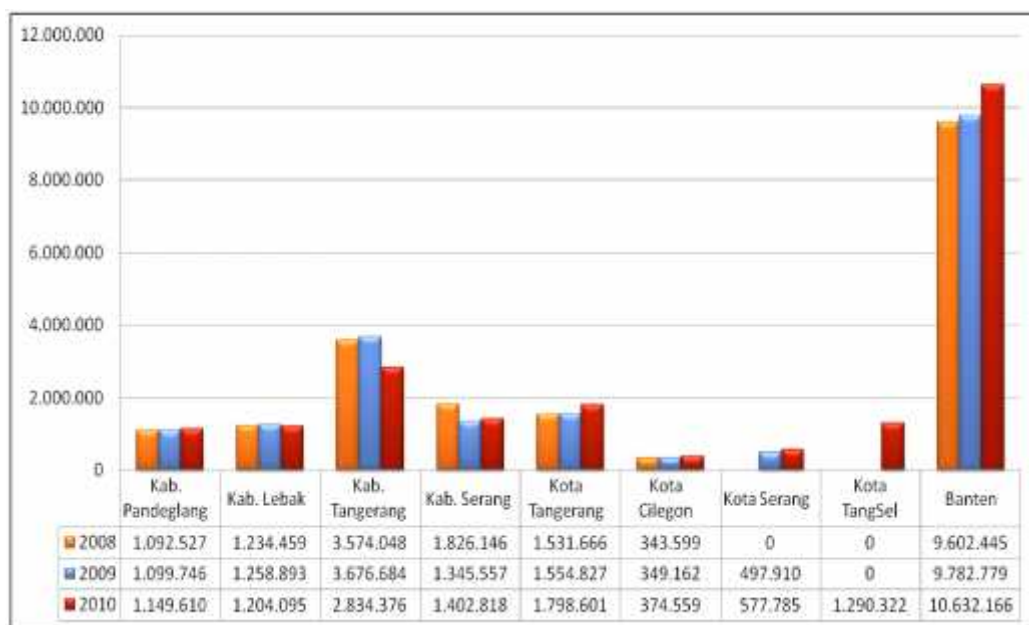
BAB X. PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan.



	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten				
1	Pandeglang	35	324	13	337
2	Lebak	28	340	5	345
3	Tangerang	29	246	28	274
4	Serang	28	320	-	320
	Kota				
1	Tangerang	13	-	104	104
2	Cilegon	8	-	43	43
3	Serang	6	30	36	66
4	Tangerang Selatan	7	5	49	54
	Provinsi Banten	154	1265	278	1543

KABUPATEN/ KOTA	1961	1971	1980	1990	2000	2009	2010
Kabupaten							
1. Pandeglang	440,213	572.628	694,759	858,435	1,011,788	1.099.746	1,149,610
2. Lebak	427,802	546,364	682,868	873,646	1,030,040	1.258.893	1,204,095
3. Tangerang*	643,647	789,870	1,131,199	1,843,755	2,781,428	3.676.684	2,834,376
4. Serang**	648,115	766,410	968,358	1,244,755	1,652,763	1.345.557	1,402,818
Kota							
5. Tangerang	206,743	276,825	397,825	921,848	1,325,854	1.554.827	1,798,601
6. Cilegon	72,054	93,057	140,828	226,083	294,936	349.162	374,559
7. Serang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	497.910	557,785
8. Tangerang Selatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,290,322
Banten	2,258,574	3,045,154	4,015,837	5,967,907	8,096,809	9.782.779	10,632,166

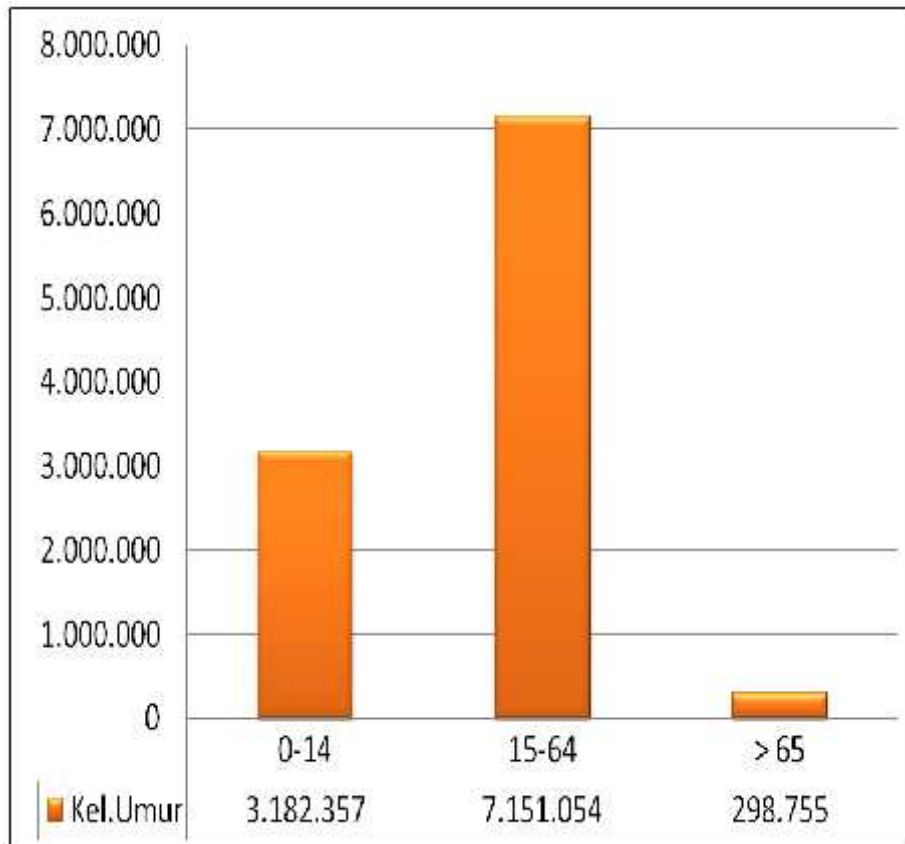


Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Usia di Provinsi Banten
Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	540.609	509.702	1.050.311
5-9	550.916	517.076	1.067.992
10-14	549.494	514.560	1.064.054
15-19	521.301	497.914	1.019.215
20-24	514.698	515.218	1.029.916
25-29	540.294	535.167	1.075.461
30-34	489.018	487.768	976.786
35-39	452.451	425.133	877.584
40-44	380.622	345.887	726.509
45-49	295.174	265.664	560.838
50-54	224.961	197.706	422.667
55-59	149.150	123.458	272.608
60-64	94.560	94.910	189.470
65-69	62.094	66.099	128.193
70-74	39.693	49.363	89.056
75+	34.113	47.393	81.506
Jumlah	5.439.148	5.193.018	10.632.166

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

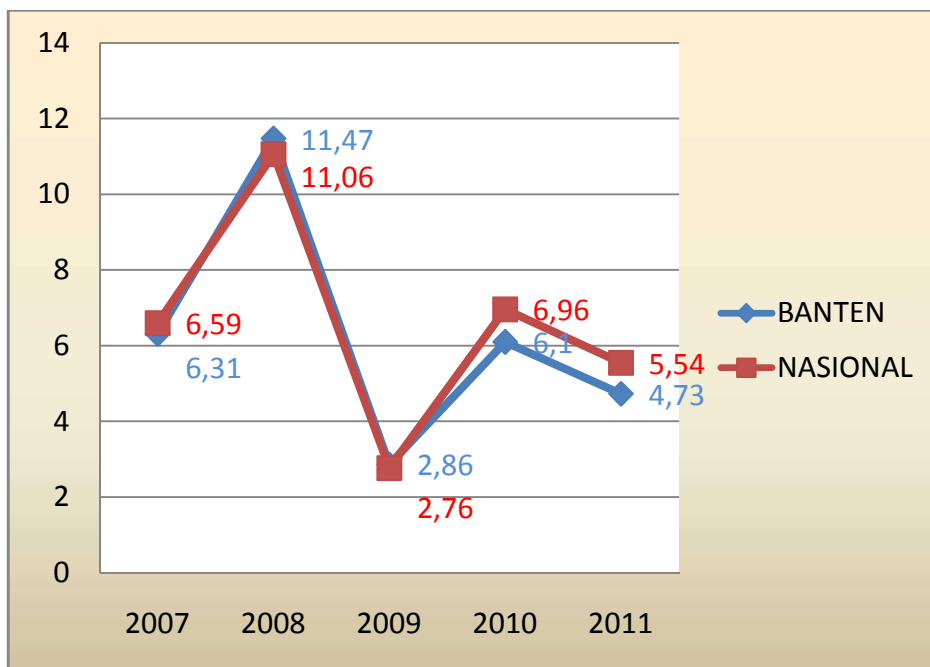
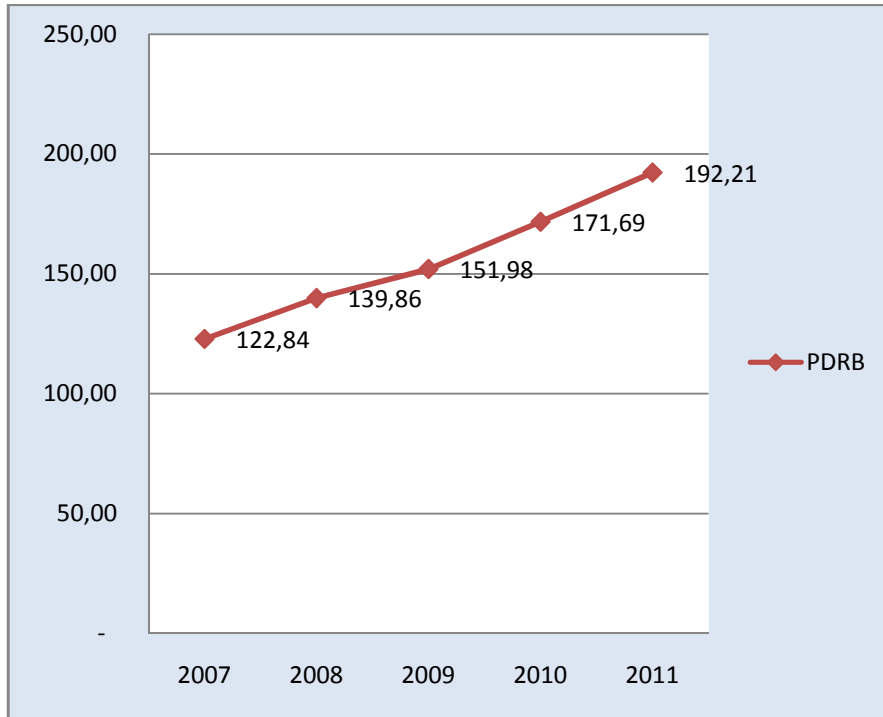
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan penurunan laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tiga tahun terakhir untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2011

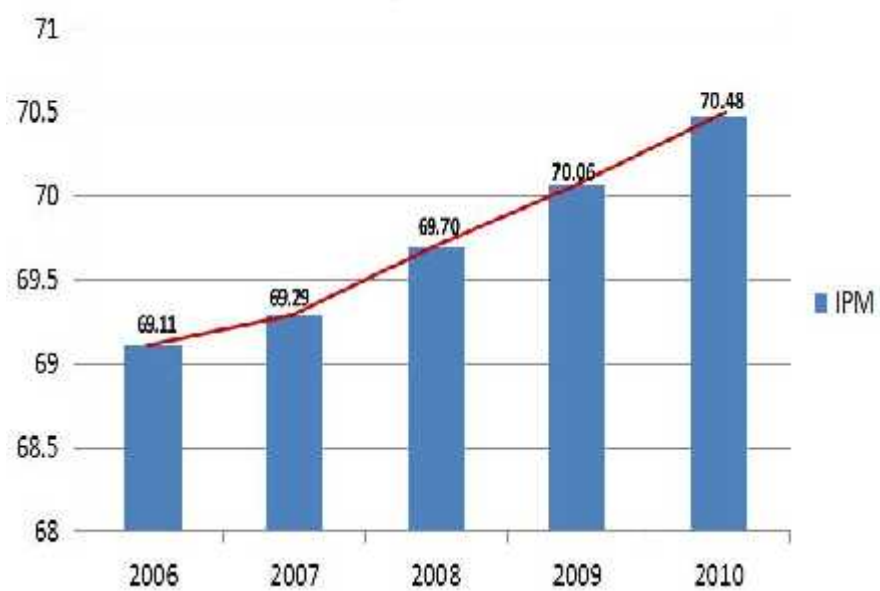
NO	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN		
		2009	2010	2011
Kabupaten :				
1	Pandeglang	4,21	6,77	6,81
2	Lebak	4,10	4,15	4,30
3	Tangerang	4,41	6,71	6,41
4	Serang	3,18	3,87	3,96
Kota :				
5	Tangerang	5,74	6,68	7,01
6	Cilegon	4,83	5,01	5,26
7	Serang	5,44	7,63	7,76
8	Tangerang Selatan	8,49	8,70	8,80
Provinsi Banten		4,69	6,08	6,43
Nasional		4,58	6,10	6,50

Sumber : BPS 2012

Struktur Perekonomian Banten sebagian besar kontribusi dari sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor listrik, gas dan air bersih) sebesar 54,80%, kemudian sebesar 37,14% dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar 8,06% berasal dari sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.

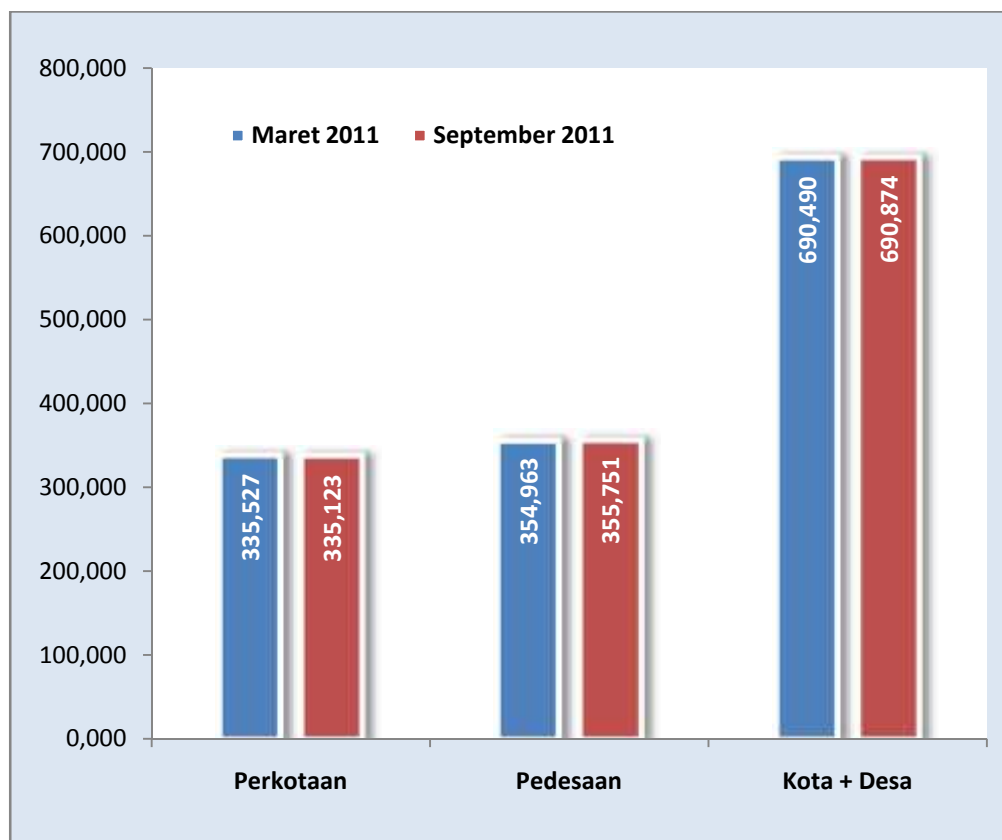


NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
		2009	2010
Kabupaten:			
1	Pandeglang	67,99	68,29
2	Lebak	67,45	67,67
3	Tangerang	71,45	71,76
4	Serang	68,27	68,67
Kota:			
5	Tangerang	74,89	75,17
6	Cilegon	74,99	75,29
7	Serang	69,99	70,61
8	Tangerang Selatan	75,01	75,38
Provinsi Banten		70,06	70,48



Kondisi penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Januari 2012, sampai dengan September 2011 tercatat sebanyak 690.874 jiwa (6,26%), sedangkan pada Maret 2011 tercatat sebanyak 690.490 jiwa (6,32 persen).

Gambar 2.6
Grafik Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret-September 2011



Sumber : BRS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2 Januari 2012

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

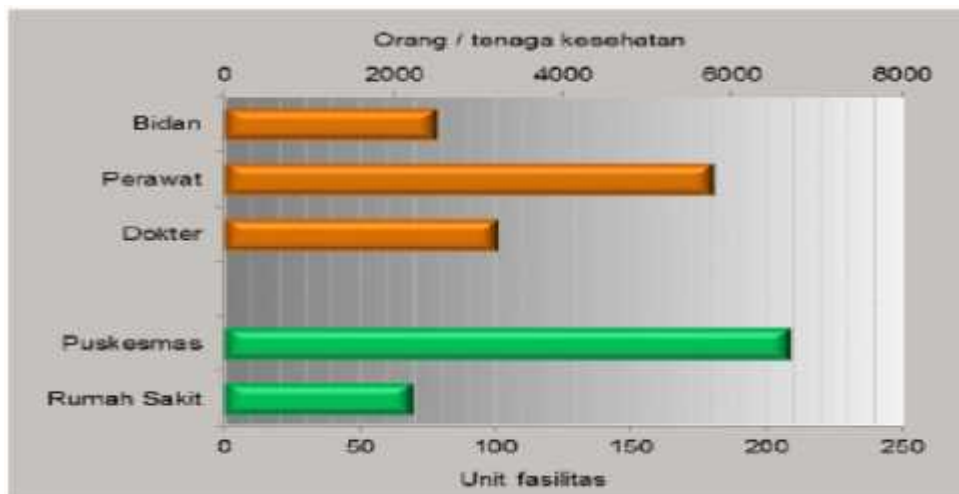
1) Pendidikan

Kinerja layanan pendidikan di Provinsi Banten dari Tahun 2008-2010 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.6.

Uraian	2008	2009	2010
Angka Melek Huruf (persen)	95,60	95,95	96,20
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,10	8,15	8,32
Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
- Usia 7-12 Tahun	97,56	97,85	98,01
- Usia 13-15 Tahun	79,87	80,88	81,70
- Usia 7-15 Tahun	92,03	92,20	92,81
- Usia 16-18 Tahun	48,40	50,00	50,90



NO	INDIKATOR KESEHATAN	2008	2009	2010
1	AKB (Per 100 Kelahiran)	37	36	34
2	AHH (Tahun)	64,60	64,75	64,90
3	Angka Kesakitan (%)	37,17	37,70	33,02
	TEMPAT BEROBAT			
1	Praktek Dokter (%)	38,10	39,30	37,54
2	Petugas Kesehatan (%)	20,10	23,58	20,26
3	Pengobatan Tradisional (%)	1,62	1,08	0,74
4	Lainnya (%)	1,82	1,94	2,64



Uraian	2009	2010
Panjang Jalan (km)		
- Jalan Negara	490,40	476,49
- Jalan Provinsi	889,01	770,09
Jumlah Kendaraan (unit)		
- Mobil Penumpang	63 365	69 909
- Mobil Barang	72 903	80 421
- Mobil Bus	189 097	219 535
- Sepeda Motor	2 027 977	2 451 466
Angkutan Kereta Api		
- Penumpang (orang)	4 555 933	5 508 704
- Barang (tribu on)	1,74	26,00

Uraian	2009	2010
Rumahtangga dengan rumah milik sendiri	74,35	72,33
Rumahtangga dengan luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	71,53	72,18
Rumahtangga dengan lantai rumah bukan tanah	90,17	93,11
Rumahtangga dengan atap rumah dari genteng/beton	87,54	85,60
Rumahtangga dengan dinding rumah dari tembok	80,06	82,25

5) Lingkungan Hidup

Sebagai gambaran, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari).

Kerusakan habitat ekosistem relatif terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku

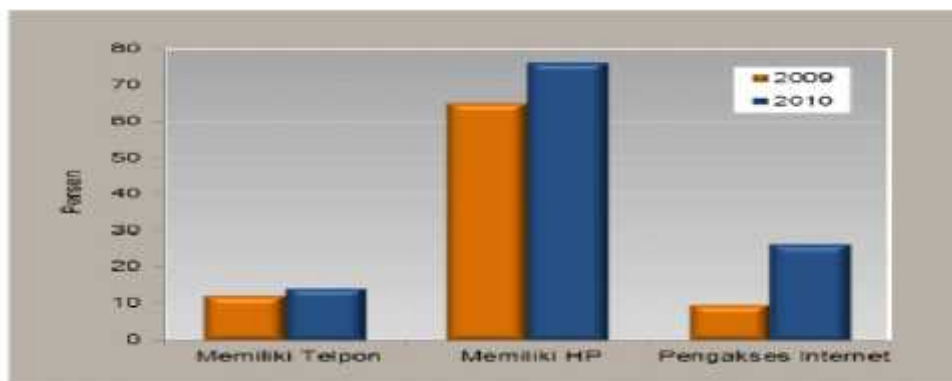
mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar 16.539 m³/hari atau sekitar 5.971.035 m³/tahun. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 5.995 m³/hari, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah 4.000 m³/hari. Pengelolaan persampahan maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan.

Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai masih adanya sejumlah perusahaan yang memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan.

Ancaman bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang yang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibuangan, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervat dan Kali Sabi.

Ancaman gempa bumi yang terjadi selain gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur.



NO	KOTA	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Serang	5.452.690	20,44
2	Cilegon	2.634.540	15,01
3	Tangerang	20.408.291,42	11,16
4	Tangerang Selatan	1.314.470	8,9

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan di tahun 2009 adalah sebesar 16,68%, sedangkan target MDGs pada Tahun 2015 adalah sebesar 26%. Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di tahun 2010 adalah sebesar 11,8%, sedangkan pada tahun 2015 target MDGs adalah sebesar 16%. Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten ditahun 2010 adalah 4,04% sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 6,30%.

Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 (78.649,61 ha) ke tahun 2005 (80.160,11 ha) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96%. Dengan demikian, proporsi hutan negara terhadap luas semakin meningkat, yaitu dari 8,94% menjadi 9,11%. Hingga tahun 2004, sebaran hutan secara dominan terdapat di Kabupaten Pandeglang 38.994,64 ha (48,64%) dan Kabupaten Lebak 35.366,73 ha (44,12%), sedangkan sisanya di Kabupaten Serang 4.384,43 ha (5,46%). Bila ditinjau menurut jenisnya, terjadi pergeseran yang drastis antara komposisi hutan lindung dengan hutan produksi dalam kurun waktu 2003-2004, dimana hutan lindung dengan luasan 25.116,01 ha (31,93% terhadap luas hutan negara) pada tahun 2003 menjadi 7.894,11 ha (9,84%) pada tahun 2004 atau dengan laju penurunan sebesar 69,17% (berkurang 17.221,90 ha). Pergeseran tersebut, khususnya disebabkan karena pengalihan fungsi hutan lindung menjadi 'hutan produksi terbatas' yang terjadi pada hutan lindung di seluruh kabupaten tersebut di atas, khususnya di Kabupaten Pandeglang (yang juga merupakan wilayah dengan keberadaan hutan lindung terluas) dengan laju penurunan mencapai 82,98% (12.689,59 ha).

Kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 223.930,34 ha atau 25,88% dari luas wilayah Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Kawasan Lindung di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAWASAN LINDUNG	LUAS (HA)
1	Hutan Konservasi	126.397,30
2	Hutan Lindung	9.471,39
3	TWA Perairan Laut Sangiang	720,00
4	Perairan Laut TNUK	44.337,00
5	Hutan Bakau di Luar Kawasan Hutan	918,67
6	Kawasan Ulayat Baduy/Cagar Budaya	5.136,58
7	Kawasan Rawan Bencana Alam	36.161,97
8	Kawasan Lindung Sekitar Hulu Air	787,43
Jumlah		223.930,34

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009

Indikasi program untuk pemanfaatan ruang di Provinsi Banten selama jangka waktu 5 tahun berdasarkan program struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis provinsi, dan pengendalian ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
				5 Tahun ke - I					II									
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)									
I STRUKTUR RUANG																		
1 Pengembangan Sistem Parkir	1 PKH Tangerang 2 PKH Tangerang Selatan 3 PKH Serang 4 PKH Cilegon 5 PKW Pandeglang 6 PKW Rangkasbitung 7 PKWP Panimbang 8 PKWP Bayah 9 PKWP Mata 10 PKWP Banjaraja 11 PKWP Teluk Naga 12 PKL Labuan 13 PKL Cibitung 14 PKL Malingping 15 PKL Tigaraksa 16 PKL Krage 17 PKL Anjer 18 PKL Baros 19 PKL Kragilan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dep. PU, Depdagri, Bappeda, Dinas Rina Marga dan Tata Ruang															
2 Pengembangan Sistem Prasarana Utama																		
2.1 Pengembangan sistem jaringan transportasi darat																		
2.1.1 Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Jalan Nasional	1 JORR 3 Jakarta Outer Ring Road III, Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper, Benda - Batu Ceper - Kunciran, Kunciran - Serpong, Serpong - Cinere, Cinere - Cimanggis, Cimanggis - Cibitung, Cibitung - Cikarang 2 Tangerang - Merak 3 Serpong - Tigaraksa - Banjaraja 4 Banjaraja - Teluk Naga - Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara) 5 Cilegon - Bojonegara 6 Jembatan Selat Sunda 7 Merak - Cilegon - Serang - Tangerang - Batas DKI Jakarta 8 Merak - Suralaya - Pulo Ampel Bojonegara - Cilegon 9 Labuan - Saheli - Pandeglang - Rangkasbitung - Cipanas - Batas Provinsi Jawa Barat 10 Bojonegara - Banten Lama - Tirtayasa - Krage - Mauli - Teluknaga - Bandara Soekarno Hatta 11 Merak - Cilegon - Ciwandan - Anjer - Carita - Labuan - Panimbang - Cipeuteuh - Cibitung - Muarabinuangpeun - Malingping - Simbang - Bayah - Cieoek - Batas Provinsi Jawa Barat Merak - Bts Kota Cilegon 13 Jln. Raya Merak (Cilegon) 14 Jln. Raya Cilegon (Cilegon) 15 Bts Kota Cilegon - Bts Kota Serang 16 Jln. Raya Serang (Cilegon) 17 Jln. Raya Cilegon (Serang) 18 Jln. Tirtayasa (Serang) 19 Jln. Maulana Yusuf (Serang) 20 Jln. Mayor Saefi (Serang) 21 Bts Kota Serang - Bts Kota Tangerang 22 Jln. A. Yani (Serang) 23 Jln. Sudirman (Serang) 24 Jln. Raya Serang (Tangerang) 25 Jln. Doan Mogot (Tangerang - Bts DKI) 26 Bts Kota Cilegon - Pasauran 27 Jln. Raya Anjer (Cilegon) 28 Pasauran - Labuhan 29 Labuhan - Simp. Labuhan 30 Simp. Labuhan - Saheli 31 Saheli - Bts Kota Pandeglang 32 Jln. Raya Labuan (Pandeglang)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dep. PU, Deshub, Dep. ESDM, PLH Bappeda, Dinas Perhubungan, Kominfo dan Infomatra, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pertambangan dan Energi															

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				5 Tahun ke - I					II	
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)	
	33 Jln. Abdurrahim (Pandeglang)									
	34 Bte Kota Pandeglang - Bte Kota Rangkasbitung									
	35 Jln. Mayor Widagdo (Pandeglang)									
	36 Jln. Raja Rangkasbitung (Pandeglang)									
	37 Jln. Raja Pandeglang (Rangkasbitung)									
	38 Bte Kota Rangkasbitung - Cibitung bte Prov. Jawa Barat									
	39 Jln. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)									
	40 Jln. Raja Cipanas (Rangkasbitung)									
	41 SP. Labuan - Cibitung									
	42 Cibitung - Cikusek - Muara Binuangseun									
	43 Muara Binuangseun - Sempang									
	44 Sempang - Rajah									
	45 Bayah - Cibarende - Bte. Prov. Jawa Barat									
	46 Bte. Kota Serang - Bte. Kota Pandeglang									
	47 Jln. Yusuf Maraditaga (Serang)									
	48 Jln. TB. A. Khatib (Serang)									
	49 Jln. Raja Pandeglang (Serang)									
	50 Jln. Raja Serang (Pandeglang)									
	51 Jln. A. Yani (Pandeglang)									
	52 Jln. Anasir (Pandeglang)									
	53 Bte. DKG Barden - Gandana/Bte. Depot/ Tangerang (Ciputat - Bogor)									
2.1.2 usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)jalan strategis nasional prospektif yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kragilan (Kabupaten Serang) - Warunggunung (Kabupaten Lebak) - Panimbang (Kabupaten Pandeglang) - Bandar Utara Banten Selatan									
2.1.3 Pengembangan dan Pemertajahan Jaringan Jalan Propinsi	1 Tangerang - Serpong - Batas Provinsi Jawa Barat									
	2 Bayah - Ciboteh - Cibeon - Majasari - Cigeutung - Rangkasbitung - Kopo - Ciseka - Tigaraksa - Serpong									
	3 Pontang - Citrus - Warung Gunung - Gunung Kencana - Malingsing									
	4 Warung Gunung - Cipanas									
	5 Rangkasbitung - Cideras - Tigaraksa									
	6 Panimbang - Angsana - Muncil - Cikusek - Muarabimuangseun									
	7 Panimbang - Cikusek - Banuasih - Cemangga - Cigeutek - Wanasalam - Malingsing									
	8 Cikusek - Cibitung - Cikusek - Wanasalam - Malingsing									
	9 Rajah - Cioarang - Cibareno - Batas Provinsi Jawa Barat									
	10 Ciputat-Cileug									
	11 Jl. Raja Jombang (Cileug)									
	12 Jl. Raja Jombang (Ciputat)									
	13 Jl. Arie Fata (Ciputat)									
	14 Jl. H. Usman (Ciputat)									
	15 Tangerang-Serpong-Bte. Bogor									
	16 Jl. Raja B. Pass (Tangerang)									
	17 Jl. Raja Serpong (Tangerang)									
	18 Sempang Bitung-Curug									
	19 Jl. Benign Raja (Tangerang)									
	20 Jl. Raja Ciponoh									
	21 Jl. Raja Cileug									
	22 Ciputat-Serpong									
	23 Jl. Pasalaran (Ciputat)									
	24 Jl. Puspiteri Raja (Ciputat)									
	25 Curug-Panung Panjang									
	26 Kroya-Mauk									
	27 Mauk-Teluk Naga									
	28 Teluk Naga-Dede									
	29 Cisaat-Jaha									
	30 Malangsing-Tigaraksa									
	31 Karawaci-Leger									
	32 Pamulang Timur-Sp Gajek									
	33 Sp Gajek-Batah Dik									
	34 Pontang-Krono (Tanara-Krono)									
	35 Tigaraksa-Cideras									
	36 Serang-Cadapan									
	37 Jl. Tb. A. Khatib (Serang)									
	38 Jl. Yumaga (Serang)									
	39 Jl. Raja Pandeglang (Serang)									
	40 Cikande-Cideras									
	41 Parupatan-Palima									
	42 Palima-Pasang Temeng									
	43 Tarate-Banten Lama									
	44 Banten Lama-Pontang									
	45 Citrus-Pontang									
	46 Sempu-Bukit Kawung									

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
				5 Tahun ke - I					II	
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)	
	47 Jalan Pang-Sukamanah									
	48 Kramatwatu-Tonjong									
	49 Jl. Trip Jamalsan (Serang)									
	50 Jl. Ayo Usman (Serang)									
	51 Lopang-Banten Lama									
	52 Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan									
	53 Jl. Abdul Hadi (Serang)									
	54 Jl. To. Suwardi (Ling Selatan)									
	55 Jl. Letnan Jidun (Serang)									
	56 Simpang Taltakan-Gunung Sari									
	57 Gunung Sari-Mancai-Anyer									
	58 Kemang-Kaligandu									
	59 Jl. Veteran (Serang)									
	60 Jl. R.H. Byamuk (Serang)									
	61 Ciruas-Pellr-Warunggunung (Sorok)									
	62 Pontang-Kronis (Pontang-Tanara)									
	63 Jl. Yasin Beji (Cilegon)									
	64 Cadasan-Pandeglang									
	65 Jl. To. Asnawi (Pandeglang)									
	66 Jl. A. Yani (Pandeglang)									
	67 Jl. Raya Serang (Pandeglang)									
	68 Saketi-Simpang (Saketi-Picung)									
	69 Cibitung-Sumur									
	70 Cigadung-Cipacung									
	71 Mengger-Mandatawangi-Caringin									
	72 Saketi-Ciandur									
	73 Jl. Jenderal A. Yani (Labuan)									
	74 Picung-Munjul									
	75 Munjul-Citraus									
	76 Munjul-Farimbang									
	77 Ciseureuf-Sobang-Tela									
	78 Saketi-Simpang (Picung-Simpang)									
	79 Bayah-Cikotok									
	80 Gunung Madur-Pulau Manuk									
	81 Citeras-Ranghasbitung									
	82 Jl. B. Pasa (Ranghasbitung)									
	83 Jl. Raya Cilande (Ranghasbitung)									
	84 Cikotok-Bta. Jabar									
	85 Cipanas-Virarung Banten									
	86 Maja-Koleang									
	87 Ciruas-Pellr-Wr-Gunung (Sorok-Wr-Gunung)									
	88 Wr. Gunung-Gunung Kencana									
	89 Gunung Kencana-Malingping									
	90 Gunung Kencana-Barajar San									
2.1.4 Perwujudan dan Pemantapan Terminal	1 Terminal Merah									
	2 Terminal Pakupatan									
	3 Terminal Poris Plawad									
	4 Terminal Bandara Soekarno Hatta									
	5 Terminal Kadubanan									
	6 Terminal Kadugugung									
	7 Terminal Jabuwung									
	8 Terminal Agribisnis (Ciruas, Kabupaten Serang)									
2.1.5 Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Kereta Api	1 Stasiun Tonjong Baru - Perabunan Bojonegara									
	2 Tangerang - Bandara Soekarno Hatta									
	3 Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta									
	4 Cilegon - Serang - Pandeglang - Ranghasbitung									
	5 Labuan - Saketi - Ranghasbitung									
	6 Saketi - Malingping - Bayah									
	7 Ciwandan - Anjer Kidul									
	8 Anjer Kidul - Labuan - Farimbang									
	9 Serpong - Citayam - Nambo - Cikarang									
	10 Double track Jakarta - Kota Tangerang									
	11 Stasiun									
	- Kawasan Merah									

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
				I 5 Tahun ke - 1			II (2016 - 2020)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Kawasan Bojonegara												
	- Kawasan Bandara Soekarno Hatta												
	- Kawasan Bandara Udara Banten Selatan												
2.1.6 Pengembangan Jaringan Penyeberangan	1. Negeri - Bahauheni - Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak V - Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak VI 2. Cibak/Tanjungkamb/Tanjungkamb - Kepulauan Sempu 3. Karangantu - Pulau Tunas 4. Serang - Pulau Panjang 5. Sumur - Pulau Pandan 6. Murambungau - Pulau Deli 7. Labuan - Pulau Sangiang 8. Merak - Kepulauan anah Gunung Krakatau												
2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut													
2.2.1 Pengembangan Pelabuhan Utama													
2.2.2 Pengembangan Pelabuhan Pangumpuan	1. Pelabuhan Bojonegara 2. Pelabuhan Labuan 3. Pelabuhan Anjer 4. Pelabuhan Bayan 5. Pelabuhan Murambungau 6. Pelabuhan Bojonegara Wadas												
2.3 Pengembangan Pelabuhan Pengumpul													
2.4 Pengembangan Terminal Untuk Keperluan Sendiri	1. Pelabuhan Cibeberan 2. Pelabuhan Cibeberan												
2.4.2 Pengembangan Terminal Khusus	1. Kabupaten Labak 2. Kabupaten Pandeglang 3. Kabupaten Serang 4. Kawasan Benteng Teluk Siga Kabupaten Tangerang												
2.5.0 Pemantapan Pelabuhan Perikanan	1. Pelabuhan Riwahguni 2. Pelabuhan Labuan 3. Pelabuhan Cibeberan 4. Pelabuhan Sukarega 5. Pelabuhan Sidarmati 6. Pelabuhan Pasirwangi 7. Pelabuhan Cibeberan 8. Pelabuhan Sumur 9. Pelabuhan Citusik 10. Pelabuhan Tamasanda 11. Pelabuhan Karangantu 12. Pelabuhan Tanjungkarir 13. Pelabuhan Kroyok 14. Pelabuhan Citusik												
2.5 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara													
2.5.1 Pemantapan Bandara Internasional													
2.5.2 Perwujudan Bandara Khusus	Soekarno - Hatta 1. Bandara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang 2. Bandara Sukarega (pusat pendidikan perhubungan) 3. Bandara Sida (Pulau Sasentangan merak)												
2.4 Pengembangan Angkutan Massal	Cilegon - Serang - Pandeglang - Bangkalahung (OSEPARSIF)												
3 Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya													
3.1 Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelembikan	1. PLTU 1 Sukarega 2. PLTU 2 Labuan 3. PLTU 3 Lontar 4. SUKIT 200 kV 5. SUIT 150 kV 6. PLTA Banten 7. PLT Panas Bumi Kubera Danau Banten												
3.2 Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air													
3.2.1 Perwujudan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	1. Bendungan Kallan 2. Bendungan Sidiang Heula 3. Bendungan Pasir Kopo 4. Bendungan Cidahu 5. Bendungan Cibeberan 6. Bendung Cimaran 7. Bendungan Cimabung 8. Bendung Famarayan 9. Bendung Panca Bumi 10. Bendungan Pasar Baru 11. CAY Rawa Danau di Serang - Pandeglang 12. CAY Serang - Tangerang 13. CAY Labuan 14. CAY Halimung 15. CAY Jajaran 16. Situ/Vaduk/Danau/Rawa yang terdapat di Kabupaten Labak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon												
3.2.2 Pengembangan dan Pemantapan Daerah Irigasi (DI)	1. DI Cibeberan 2. DI Cibeberan - di 3. DI Cibeberan - di 4. DI Cibeberan 5. DI Cibeberan 6. DI Cibeberan 7. DI Cibeberan 8. DI Cibeberan 9. DI Cibeberan 10. DI Cibeberan 11. DI Cibeberan 12. DI Cibeberan 13. DI Cibeberan 14. DI Cibeberan												
3.2.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Prasarana Situ/Vaduk/Danau/Rawa	1. Kabupaten Labak 2. Kabupaten Pandeglang 3. Kabupaten Serang 4. Kota Cilegon 5. Kabupaten Tangerang 6. Kota Tangerang Selatan 7. Kota Tangerang												

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
				5 Tahun ke - I					II (2018 - 2020)										
				2011	2012	2013	2014	2015											
3.2.4 Pengembangan Wilayah Sungai (WS)	1 WS Ciantan - Cibungur 2 WS Serang - Ciaswana 3 WS Cidanau - Ciujung - Cidatan - Ciasdana - Ciliwung - Citarum (lintas provinsi)																		
3.3 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya																			
3.3.1 TPA untuk pertambangan	1 TRST Mojong Mendang Kabupaten Serang 2 TRST Ciangra Kabupaten Tangerang																		
3.3.2 Pengelolaan Limbah Industri B3	Kota Cilegon																		
II POLA RUANG																			
1 Rehabilitasi dan Pemertajaaan Kawasan Lindung																			
1 CA 2 Teling Cede	Kabupaten Serang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. Kehutanan, Dep. Budget, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan																
2 CA Kawa Dandu	Kabupaten Serang																		
3 CA Pulau Dua	Kota Serang																		
4 TWA Santa	Kabupaten Pandeglang																		
5 TWA Pulau Samudang	Kabupaten Serang																		
6 TWA Ujung Kidul	Kabupaten Pandeglang																		
7 TH Halimun Salak	Kabupaten Lebak																		
8 Taman Hutan Raya (TAHURA)	Kabupaten Pandeglang																		
9 Hutan Lindung	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak																		
10 Kawasan Sentra Danau atau Waduk	6 Kota Cilegon 1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kota Tangerang 4 Kota Tangerang Selatan 5 Kabupaten Pandeglang 6 Kabupaten Lebak 7 Kota Cilegon																		
11 Sempadan Pantai	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Cilegon																		
12 Sempadan Sungai	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kota Tangerang 4 Kabupaten Pandeglang 5 Kabupaten Lebak																		
13 Kawasan Rawan Bencana Alam	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak																		
14 Kawasan Sekitar Mata Air	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Pandeglang 3 Kabupaten Lebak																		
15 Kawasan Konservasi Cagar Budaya	1 Kawasan Basarabat adat Baduk, Kabupaten Lebak 2 Kawasan Marten Lama, Kota Serang																		
2 Pengembangan Kawasan Budidaya																			
1 Pengembangan Peruntukan Hutan Rakyat	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Pandeglang 3 Kabupaten Lebak	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. PU, Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan																
2 Pengembangan kawasan Peruntukan Pertanian (*) termasuk Lahan rangkai bertanah	1 Kabupaten Serang (*) 2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang (*) 4 Kabupaten Pandeglang (*) 5 Kabupaten Lebak (*) 6 Kota Cilegon																		
3 Pengembangan kawasan Peruntukan Perikanan	1 Kabupaten Serang 2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang 4 Kota Tangerang 5 Kota Tangerang Selatan 6 Kabupaten Pandeglang 7 Kabupaten Lebak 8 Kota Cilegon																		
4 Pengembangan kawasan Peruntukan Perikanan	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak 3 Kabupaten Serang 4 Kabupaten Tangerang 5 Kota Serang																		
5 Pengembangan kawasan Peruntukan Pertambangan	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak																		
6 Pengembangan kawasan Peruntukan Industri	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Tangerang 6 Kota Tangerang Selatan 7 Kota Cilegon 8 Kota Serang																		
7 Pengembangan kawasan Peruntukan Pariwisata	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak 3 Kota Serang 4 Kabupaten Serang 5 Kota Cilegon																		
8 Pengembangan kawasan Peruntukan Perumahan	1 Kabupaten Serang 2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang 4 Kota Tangerang 5 Kota Tangerang Selatan 6 Kabupaten Pandeglang 7 Kabupaten Lebak 8 Kota Cilegon																		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
				5 Tahun ke - I					II										
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)										
9. Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon	Kabupaten Serang dan Kota Cilegon																		
10. Kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya																			
III PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																			
1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. terkait pengembangan kawasan strategis, Dinas/Instansi terkait pengembangan																
1.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	Pulau Deli sebagai Kawasan Pulau Kecil Terluar																		
1.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Selat Sunda 2 Kawasan Jabodetabekpunjur Taman Nasional Ujung Kulon																		
1.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan																			
2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi																			
2.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	1 Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang 2 Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kota Serang 3 Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak 4 Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon 5 Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan																		
2.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang 2 Kawasan Malingging dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak 3 Kawasan Cibaliung dan Sekitarnya di Kabupaten Pandeglang 4 Kawasan Wisata Bayah dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak 5 Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang 6 Kawasan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang 7 Kawasan Kota Keberatan Maja 8 Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara 9 Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon 10 Kawasan Kaki Selat Sunda 11 Kawasan Sport City 12 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 13 Kawasan Banten Water Front City 14 Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan																		
2.3 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Sosial Budaya	1 Kawasan Situs Banten Lama, Kota Serang 2 Kawasan Masyarakat Adat Baduy, Kab. Lebak																		
2.4 Pendaugunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	1 Kawasan PLTU 1 Suralaya 2 Kawasan PLTU 2 Labuan 3 Kawasan PLTU 3 Lontar 4 Bendung Pamaryan 5 Bendung Ranca Sumur 6 Bendungan Kanan 7 Bendungan Pasir Kopo 8 Bendungan Cilawang 9 Bendungan Tanjung 10 Bendungan Sindang Heula 11 Bendungan Krenceng 12 Bendung Ciliman 13 Puspiptek, Kota Tangerang Selatan 14 PLT Panas Bumi kaldera Danau Banten 15 PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten																		
2.5 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	1 Cagar Alam Rawa Danau di Kabupaten Serang 2 Cagar Alam Gunung Tukang Gede di Kabupaten Serang 3 Kawasan Akarsari (Gn. Aseupan, Gn. Karang, dan Gn. Pulosari) Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang 4 Kawasan Penyangga Bandara Soekarno-Hatta																		

8) Tata Kelola Pemerintahan

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2010-2014, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi terwujud dalam pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut guna membentuk birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat supaya hidup lebih aman, nyaman, tentram, rukun, damai, bersatu dan sejahtera.

Penerapan prinsip keterbukaan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini telah dibentuk infrastruktur Pelayanan Informasi Publik (PPID dan PPID Pembantu) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten yang telah berfungsi dalam memfasilitasi berbagai sengketa informasi.

Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa instansi pemerintah secara elektronik (E-Procurement) yaitu Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Tanggal 20 Januari 2012 Nomor 999.05/KEP-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 999.05/KEP.1-Huk/2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Banten sebagai salah satu wujud E-Goverenment. Dalam aspek akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperlukan kerja keras khususnya untuk membenahi kelemahan penataan administrasi aset daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal, merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi

Banten dalam menerapkan efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan perizinan. Hasil kinerja sinergis dari setiap SKPD berdampak pada kondisi Banten yang kondusif, aman, tentram dan nyaman sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan dan meningkatkan nilai investasinya di Banten. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Harmonisasi hubungan antar kelembagaan melalui sasaran penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD, tercermin dalam proses penyusunan produk hukum daerah melalui peraturan daerah, selama kurun waktu 2002-2012 telah diselesaikan sebanyak 41 peraturan daerah, baik yang bersifat usulan dari pemerintahan daerah maupun inisiatif DPRD. Rasio nota kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD mencapai 89,10%, sedangkan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan mencapai 87,98% dari tahun 2011.

Penataan peraturan daerah dilakukan melalui program peningkatan kesadaran dan pengembangan produk hukum melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan nilai capaian tahun 2011 sebesar 97,93%. Selain itu, rasio penegakan peraturan daerah dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda melalui capaian sebesar 99,71%. Dalam rangka penegakan peraturan daerah tersebut, telah dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS secara rutin.

Selama kurun tahun 2007-2011, terkait dengan pembatalan peraturan daerah telah dilakukan pencabutan dan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan oleh Kementerian Keuangan, melalui Surat Rekomendasi Nomor S-148/MK.7/2007 tanggal 16 Juli 2007, dan revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan profesionalisme birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE) dan sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK). Target kedepan akan dikembangkan sistem kepegawaian secara online dan pelayanan kepegawaian satu pintu (one stop service).

Kondisi aparatur birokrasi Provinsi Banten semula berjumlah 2.958 orang (2007), meningkat menjadi 3.868 orang (2011). Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan didominasi lulusan S-1 (50,41%) SLTA (19, 59%), Diploma (16,64%), S-2 (12, 30%) sisanya SD, SLTP dan S-3. Pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari semula 124 pelanggaran (2007) menjadi 51 pelanggaran. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan disiplin pegawai.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan korupsi, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/aset daerah telah dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan nilai capaian kinerja di tahun 2011 sebesar 79,78%. Hal ini perlu ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

9) Ketenagakerjaan

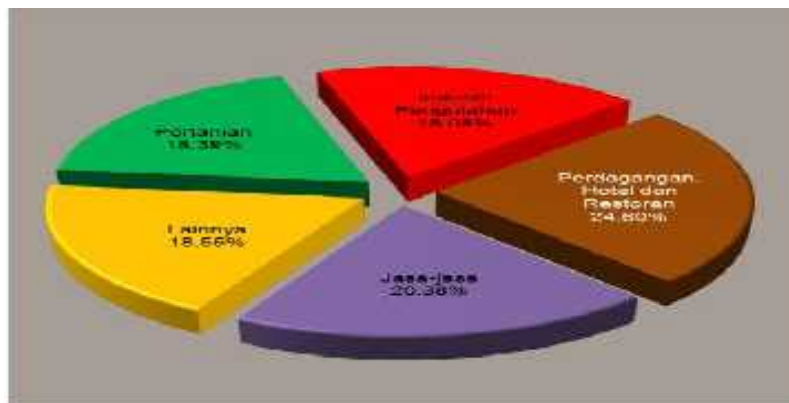
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten
Tahun 2010-2012

NO	KEGIATAN UTAMA	SAT	2010 (FEBRUARI)	2011 (AGUSTUS)	2012 (FEBRUARI)
1	Penduduk Usia >15 tahun	Orang	7.402.379	7.686.359	7.783.259
2	Angkatan Kerja	Orang	4.791.977	5.210.224	5.398.644
	a. Bekerja	Orang	4.113.360	4.529.660	4.818.967
	b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	Orang	678.617	680.564	579.677
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.610.420	2.476.135	2.384.615
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	%	64,74	67,79	69,36
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	%	14,16	13,06	10,74

Sumber : Berita Resmi Statistik (7 Mei 2012)

NO	KABUPATEN/ KOTA	ANGKATAN KERJA	PENGGANGGURAN	TPT(%)	TPAK(%)
Kabupaten:					
1	Pandeglang	513.487	58.108	11.32	64.28
2	Lebak	549.378	66.471	12,10	63.60
3	Tangerang	1.416,780	204,358	14,42	69.46
4	Serang	657,679	87.433	13.29	64.74
Kota:					
5	Tangerang	945.334	121.818	12.89	70.31
6	Cilegon	185.874	24.426	13.14	70.00
7	Serang	274.594	38.015	13.84	68.60
8	Tangerang Selatan	667.099	79.935	11.98	69.64
Jumlah		5.210.224	680.564	13.06	67.79



Tabel 2.15
Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2012

URAIAN	KETERSEDIAAN (TON)	PEMANFAATAN (TON)	KETERANGAN
Cadangan Beras Provinsi	200	-	Di simpan Bulog
Cadangan Beras Kab/Kota			Di simpan Bulog, dan telah disalurkan untuk bantuan masyarakat akibat banjir, nelayan yg tdk bisa melaut, angin puting beliung
a. Kab Serang	100	70	
b. Kab Pandeglang	100	50	
c. Kab Tangerang	100	60	
d. Kab Lebak	100	50	
e. Kota Serang	100	22,5	
f. Kota Cilegon	100	-	
g. Kota Tangerang	100	-	
h. Kota Tangerang Selatan	100	-	
Jumlah	800	252,5	
Cadangan Pangan Provinsi Dana APBD Tahun 2011			Bantuan nelayan Kota Serang, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang.
a. Kerjasama dengan Bulog	124	5	
b. Gapoktan (10)	79	-	
Jumlah	203	5	
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota)			
a. Kab Tangerang	36	-	
b. Kota Cilegon	43	-	
JUMLAH	79	-	
Cadangan Pangan Masyarakat (APBD dan APBN 2011)			
a. Lumbung Pangan (30)	100	-	
b. LDPM (17)	89	-	
Jumlah	189	-	

Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2012 (Februari)

Dari sisi penganekaragaman pangan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan telah dilaksanakan berbagai program diantaranya penelitian komoditas keanekaragaman pangan diikuti dengan sosialisasinya termasuk lomba cipta menu pangan non beras, sebagai salah satu sumber energi dan protein. Adapun konsumsi pangan untuk kebutuhan energi dan protein dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Konsumsi Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA PER HARI					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Energi (kkal/kap/hari)	1996	1927	2015	2038	1958	1957
2	Protein gram/kap/hari)	55.27	53.66	57.65	57.43	59.17	59.98
Skor PPH		79.1	74.9	82.8	81.9	78.8	80.6

Sumber: Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten 2011

Tingkat kerawanan pangan secara umum, Banten masuk dalam kategori 2, yaitu cukup rawan untuk ketersediaan pangan, tetapi berdasarkan indeks komposit penyerapan pangan secara keseluruhan termasuk agak tahan, dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	INDEKS KOMPOSIT GABUNGAN	KETERANGAN
1	Kab.Pandeglang	4,2	Agak tahan
2	Kab. Lebak	4,4	Agak tahan
3	Kab.Serang	4,3	Agak tahan
4	Kab.Tangerang	3,9	Agak tahan
5	Kota Tangerang	3,5	Agak tahan
6	Kota Cilegon	3,5	Agak tahan
7	Kota Serang	4,0	Agak tahan
8	Kota Tangerang Selatan	3,6	Agak tahan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan 2012

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan (3% terhadap produksi nasional) dan menduduki peringkat ke 9 nasional pada tahun 2010. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik, adapun luas lahan sawah di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Luas Lahan Sawah di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAB/KOTA	TEKNIS	$\frac{1}{2}$ TEKNIS	SEDERHANA	DESA	TADAH HUJAN	LAINNYA	JUMLAH
1	Kab.Pandeglang	2.853	5.289	7.575	8.964	30.058	0	54.739
2	Kab. Lebak	4.124	2.365	4.708	11.083	22.503	56	44.839
3	Kab.Serang	22.861	3.021	937	0	13.796	13	40.6284
4	Kab.Tangerang	14.801	6.177	3.578	6.823	14.164	160	45.685
5	Kota Tangerang	534	122	0	0	417	0	1.073
6	Kota Cilegon	115	0	107	167	1.744	0	2.133
7	Kota Serang	3.73	579	284	325	3.403	0	8.321
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	12	53	47	0	112
Jumlah		49.018	17.553	17.201	27.415	86.114	229	197.53

Sumber: BPS Banten 2009

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi pada tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	PADI	JAGUNG	KEDELAI	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG HIJAU
1	Kab.Pandeglang	596.796	1.642	4.043	1.822	964	1.304	452
2	Kab. Lebak	480.483	823	763	1.429	654	526	85
3	Kab.Serang	392.703	150	-	408	104	160	-
4	Kab.Tangerang	381.228	573	130	2.008	848	3.938	252
5	Kota Tangerang	6.671	-	-	5	4	-	-
6	Kota Cilegon	13.918	23	-	66	18	2.54	33
7	Kota Serang	76.082	493	119	391	154	2.267	252
8	Kota Tangsel	1.444	125	35	170	92	180	-
Jumlah		1.949.714	3.828	5.095	6.295	2.839	10.916	1.075

Sumber: BPS Banten 2011

Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, dan Obat-obatan Herbal. Selanjutnya mengenai data produksi buah, bunga dan obat-obatan pada Tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Produksi Buah, Bunga dan Obat-obatan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
I. Buah-buahan(Ton)			
1	Melon	85,90	Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon
2	Pisang	5.837.824	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
3	Jeruk	4.062.937	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Mangga	1.306.043	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang dan Kota Serang
5	Nenas	1.406.438	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
6	Manggis dan durian	493.946	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Buah lainnya	2.504.611	
	Jumlah	15.620.389	
II. Bunga (Batang)			
	Anggrek	2.189.988	Kota Tangerang selatan
	phylodendrun	899.961	Kota Tangerang selatan
	Bunga lainnya	1.365.086	Kota Tangerang selatan, Kota Serang, Kab. Serang
	Jumlah	4.455.035	
III. Obat-obatan(Kg)			
	Non rimpang	67.026.287	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Rimpang	355.297.255	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Jumlah	422.305.542	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Produksi sayur-sayuran menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar pada tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Produksi Sayuran di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
1	Jamur	116.701 ton	Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Tangerang
2	Petai	9.714 ton	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
3	Kacang panjang	20.930	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
4	Cabe besar	4.638	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional. Produksi dan sentra produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Produksi dan Sentra Peternakan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PERINGKAT (NASIONAL)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Sapi	4	20.300	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
2	Kerbau	6	3.700	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
3	Ayam Ras	5	86.100	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Telur	8	41.600	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Gula aren, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, dan coklat merupakan tujuh komoditas andalan perkebunan dengan luas lahan perkebunan rakyat sebesar 173.589 ha, perkebunan besar swasta 6.018 ha, dan PTP seluas 9.578 ha. Selanjutnya mengenai data luas tanam, produksi dan daerah penyebaran komoditas unggulan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Luasan, Produksi dan Daerah Sebaran Komoditas Perkebunan
di Provinsi Banten Tahun 2010

NO	KOMODITAS	LUASAN (HA)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Kelapa	100.058,65	55.541,00	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang
2	Karet	26.492,93	12.547,40	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
3	Kelapa Sawit	18.462,47	25.865,04	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
4	Cengkeh	15.602,40	7.554,5	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang
5	Kopi	9.526,00	2.216,70	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, Kota Serang
6	Kakao	7.248,99	2.107,00	Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang
7	Aren	2.959,85	1.706,67	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang

Sumber: Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011

Taman Hutan Raya merupakan salah satu kebanggaan Provinsi Banten, terletak di Kabupaten Pandeglang. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan konservasi dan agrowisata.

Pemberdayaaan di kawasan ini dilaksanakan dengan pembinaan masyarakat desa disekitar hutan dengan mengembangkan hasil hutan non kayu seperti jamur dan madu.

Sebagai gambaran tentang kondisi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten dapat dilihat dari potensi kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 519 km.

Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untuk wisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil kelautan. Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Produksi Perikanan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)
Perikanan Tangkap		
1	Kerapu	722
2	Manyung	1.369
3	Kakap	1.031
4	Kurisi	2.043
5	Cucut	1.398
6	Selar	2.136
7	Kue	1.158
8	Teri	2.753
9	Tenggiri	2.527
10	Tongkol	26.851
11	Jenis lainnya	21.863
Jumlah		63.150
Perikanan Budidaya		
1	Rumput Laut dan Ikan Bandeng	10.487
2	Udang Windu	44.187
3	Gurame	29.058
4	Ikan Patin	22.627
5	Jenis lainnya	359
Jumlah		106.000

Sumber: Statistik Perikanan Tahun 2011

Eksport produk hasil perikanan merupakan salah satu primadona andalan kelautan dan perikanan, capaian eksport pada tahun ini sebesar 435.642 kg dengan tujuan negara Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Ikan hias juga menjadi salah satu andalan eksport Provinsi Banten.

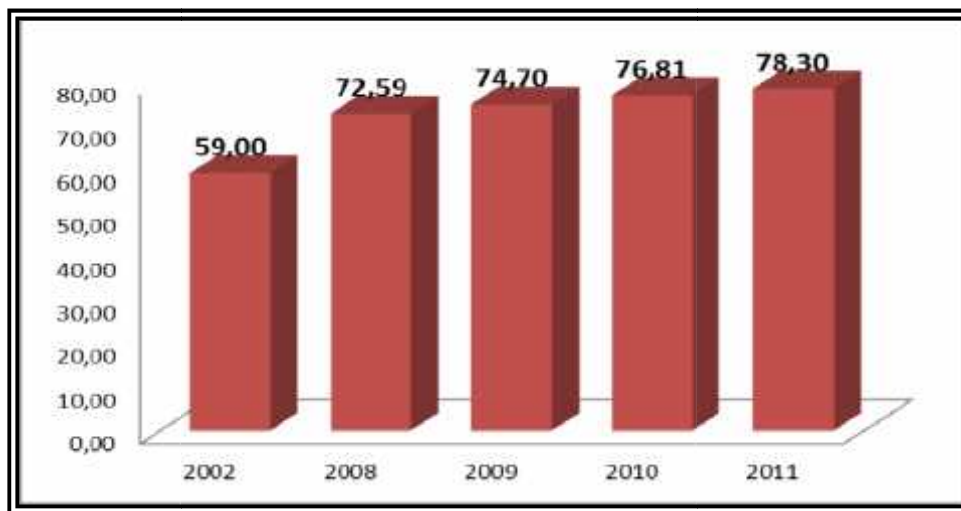
2) Energi dan Sumber Daya Mineral

Peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Banten dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Hal ini setidaknya dapat dikonfirmasi oleh perkembangan jumlah perusahaan/usaha penggalian di Banten selama periode 2007- 2009 yang cenderung berfluktuasi. Meskipun demikian, jumlah pekerja pada periode yang sama meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hanya saja, balas jasa per tenaga kerja setelah sempat naik dari 15,51 juta rupiah menjadi 16,68 juta rupiah pada tahun 2008, pada tahun 2009 akhirnya turun menjadi 13,56 juta rupiah per pekerja.

Sebaliknya, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiganya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Sampai tahun 2011 rasio elektrifikasi di Provinsi Banten mencapai 78,93%, yang berarti masih berada diatas rasio elektrifikasi Nasional maupun rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat. Rata-rata rasio elektrifikasi Nasional 72,95%, serta rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 70.72 %. Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten
Tahun 2002-2011 (%)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

3) Industri dan Perdagangan

Sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang setiap tahun selalu mendominasi perekonomian Banten. Hanya saja, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Banten sepanjang periode 2007-2009 justru mengalami penurunan hingga menjadi 1.695 unit. Penyerapan tenaga kerja juga menurun dari 0,49 juta orang pada tahun 2007 menjadi 0,47 juta orang di tahun 2009. Sebaliknya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan terus meningkat hingga menjadi 79,49 triliun rupiah pada tahun 2009. Akibatnya, NTB per tenaga kerja meningkat dari 123 juta rupiah menjadi 168 juta rupiah pada tahun 2009.

Secara spasial, IBS Banten terkonsentrasi antara lain di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan teknologi produksi kebanyakan padat tenaga kerja. Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang cenderung sebagai daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB untuk ke empat kabupaten/kota tersebut mencapai 92,98%, 93,50% dan 95,70%. Sedangkan perbedaan teknologi produksi antara IBS di kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja IBS padat modal lebih tinggi

dibanding IBS padat tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja untuk Kabupaten Tangerang; Kota Tangerang; Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing sebesar 100,50 juta rupiah; 152,52 juta rupiah; 254,72 juta rupiah dan 696,88 juta rupiah per tenaga kerja.

Menurunnya pertumbuhan ekspor yang lebih besar dari pada impor menyebabkan defisit perdagangan Banten terhadap luar negeri semakin membesar dan mencapai sekitar USD 1,25 miliar. Menurunnya ekspor disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor komoditas utama Banten seperti ekspor kimia dasar, besi/baja, tekstil, kertas dan kayu/gabus. Penurunan ekspor tersebut disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia terutama negara mitra dagang Banten seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang memicu menurunnya permintaan barang dari Banten. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk pada tahun 2012 khususnya permintaan barang dari negara-negara Eropa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang dan USA diperkirakan telah mulai pulih pada tahun 2012.

Tabel 2.25
Perkembangan Ekspor dan Impor di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011

URAIAN		2010				2011			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
Ekspor	Nilai (US Ribu)	1,712,109	1,918,230	1,854,871	2,254,436	2,205,904	2,461,159	2,485,908	1,520,414
	Volume (Ribu Ton)	890	886	925	1,211	987	957	991	551
Impor	Nilai (US Ribu)	3,884,236	3,777,695	3,483,130	4,713,266	4,585,147	5,063,459	5,257,994	3,867,507
	Volume (Ribu Ton)	2,499	2,622	2,715	3,475	3,475	364	3,450	2,019

Sumber: Bank Indonesia 2012

Nilai ekspor Banten pada triwulan IV tahun 2011 masih mengalami peningkatan, tetapi berdasarkan volumenya telah mengalami penurunan yang signifikan pada periode laporan. Akibatnya pertumbuhan ekspor Banten kian melambat. Di sisi lain, nilai impornya secara bulanan semakin meningkat dan pertumbuhannya lebih tinggi dari pada ekspor Banten. Dampaknya, defisit transaksi perdagangan Banten dengan luar negeri semakin

membesar dan mencapai angka sekitar USD 1,25 miliar pada bulan Desember 2011 saja, tetapi jika dikumulatifkan akan mencapai lebih dari USD 7,5 miliar.

Pertumbuhan ekspor Banten pada akhir tahun 2011 ini mendekati posisi tahun 2009 sebagai dampak krisis global sejak tahun 2008. Kondisi ini diperkirakan dapat berulang karena krisis global mulai kembali berkejolak di akhir tahun 2010 yang dampaknya akan mulai dirasakan 1 tahun setelah krisis tersebut dimulai, seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya-upaya strategis perlu dilakukan sejak dari perencanaan bahan baku hingga target pasar oleh industri di wilayah Banten. Namun langkah ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan pihak pemerintah, kestabilan sistem keuangan dan iklim yang kondusif. Kejadian banyaknya perusahaan tekstil dan kimia dasar di Banten yang menutup usahanya pada tahun 2009 perlu dicermati agar tidak berulang pada tahun 2011 hingga di tahun mendatang. Perusahaan yang banyak menampung tenaga kerja di Banten antara lain pabrik tekstil, alas kaki dan industri makanan. Saat ini, dari grafik beberapa komoditas ekspor terlihat adanya penurunan pertumbuhan ekspor pada industri pengolah kayu dan gabus, tekstil, besi/baja dan produk kimia dasar. Ekspor industri mineral tidak mengandung logam termasuk salah satu industri yang masih meningkat eksportnya.

Ekspor luar negeri industri besi/baja Banten menurun lebih disebabkan seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas tersebut cenderung menurun dan meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan biaya produksi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan permintaan. Di sisi lain, penjualan di dalam negeri tetap memiliki prospek yang cerah seiring rencana pemerintah dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang banyak membutuhkan produk besi baja terutama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan konstruksi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, salah satu industri terbesar baja nasional di Banten terus melakukan ekspansi proyek pembangunan pabrik *blast furnace* yang akan segera direalisasikan

setelah mendapat pembiayaan dari salah satu grup besar perbankan besar dunia pada tahun 2012. Selain itu, pembangunan pabrik baja baru yang akan berpatungan dengan perusahaan dari Korea diperkirakan akan menyerap 100.000 tenaga kerja pada tahun 2013. Pabrik baja tersebut akan memproduksi 3 juta ton slab per tahun dan plat baja sebanyak 1,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk kebutuhan produksi pabrik baja patungan itu sendiri di Banten. Kapasitas produksi pada tahun 2011 diperkirakan akan meningkat di akhir tahun 2011 setelah beberapa proyek strategis terkait finalisasi revitalisasi fasilitas produksi *Hot Strip Mill* (HSM) yang telah selesai pada bulan Mei 2011. Peningkatan produksi diperkirakan menjadi 2,4 juta ton per tahun dari sebelumnya hanya 2 juta ton per tahun.

4) Pariwisata

Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2010 di Banten terdapat 228 usaha akomodasi dengan 6.167 kamar dan 9.801 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 39 unit diantaranya merupakan hotel berbintang dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 41,69%, lebih tinggi dibanding hotel non bintang yang hanya 26,18%.

Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2010 mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Uraian	2008	2009	2010
Akomodasi (unit)			
- Hotel Berbintang	37	37	39
- Hotel Non Bintang	189	178	189
- Total	226	215	228
Jumlah Kamar (unit)			
- Hotel Berbintang	2 641	2 775	2 765
- Hotel Non Bintang	3 219	3 014	3 402
- Total	5 860	5 789	6 167
Jumlah Tempat Tidur (unit)			
- Hotel Berbintang	4 248	4 184	4 208
- Hotel Non Bintang	5 722	4 828	5 593
- Total	9 970	9 012	9 801
Tingkat Hunian Kamar (persen)			
- Hotel Berbintang	46,89	42,07	41,69
- Hotel Non Bintang	33,13	30,5	26,18
- Total	39,33	36,05	32,84

NO	URAIAN	KOTA		DESA		KOTA + DESA	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT (Jumlah makanan)	338.137	361.733	234.516	262.388	296.896	328.623
2	Total Pengeluaran RT (Non makanan)	470.739	460.829	160.440	170.402	347.242	365.364
	Jumlah	808.876	822.562	394.956	436.790	644.138	693.987

2) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Selain itu, NTP biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Pencapaian NTP Banten tahun 2011 didapat angka rata-rata 106,54%, dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011

SUB SEKTOR	2010			2011		
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
Tanaman Pangan	128,31	128,21	100,07	140,97	134,30	104,96
Tanaman Hortikultura	134,25	126,68	105,98	144,48	132,56	108,99
Tanaman Perkebunan Rakyat	129,50	126,66	102,24	136,20	132,28	102,97
Peternakan	131,12	124,04	105,71	131,94	129,44	101,94
Perikanan	125,94	129,94	96,93	132,16	135,37	97,63
Gabungan	129,81	127,44	101,86	143,96	135,12	106,54

Keterangan : It = Indeks Yang Diterima

Ib = Indeks Yang Dibayar

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten 2012

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.

1) Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada tahun 2011, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang **852,89** km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar 64.15% (547,1 km) dan

kondisi rusak 35,87% (305,79 km). Dengan tingkat kemantapan sebesar 64.15% tersebut, 35,87% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi rusak. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan di Banten.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Type Permukaan,
Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011

URAIAN	TINGKATAN JALAN	
	JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI
Kondisi Permukaan :		
- Aspal	476,49	758,91
- Berbatu	-	11,18
- Tanah	-	-
Kondisi Jalan :		
- Baik	440,89	335,64
- Cukup	-	211,46
- Rusak	35,60	305,79
- Sangat Rusak	-	-
Jumlah/ Total	476,49	852,89

Sumber: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2011

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda transportasi laut, di dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Provinsi Banten.

2) Listrik dan Energi

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan

rumah tangga, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiganya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhannya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

3) Hotel dan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada

tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

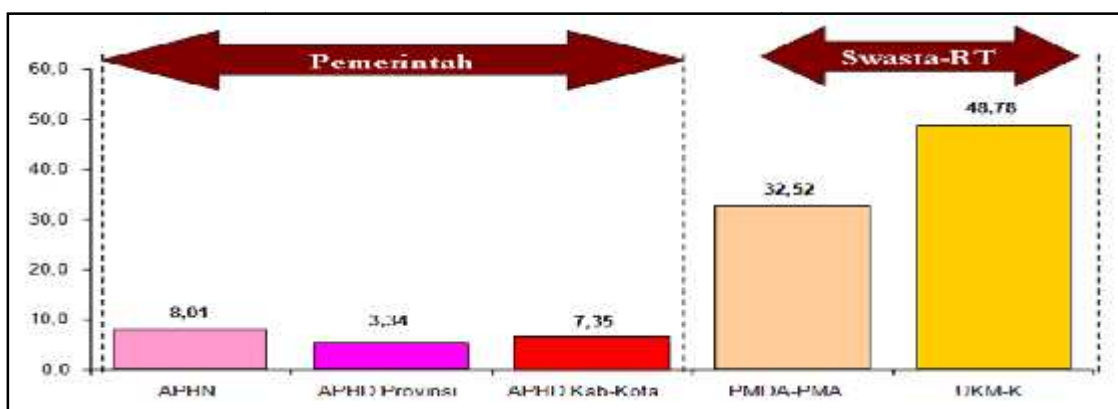
Tabel 2.30
Perkembangan dan Peringkat Investasi di Provinsi Banten
Tahun 2006-2011

Tahun	PMDN		PMA		Total Investasi PMA & PMDN Investasi (dalam rupiah)
	Proyek	Investasi (dalam milyar rupiah)	Proyek	Investasi (dalam US\$. Juta)	
2006	19	3.815,2	84	508,2	4.679.255.200.000
2007	22	1.068,7	78	708,6	7.825.050.000.000
2008	31	1.989,1	99	477,8	6.788.306.105.417
2009	23	4.381,7	92	1.412,0	19.099.114.628.798
2010	76	5.852,5	280	1.544,2	19.710.000.000.000
2011	32	5.979,4	71	1.021,6	15.174.362.066.230

Sumber: Data Perkembangan Penanaman Modal Friki Desember 2011, RKPM RI
Catatan: (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketentuan BI pada masa tahun laporan)

Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%. Perkembangan struktur investasi dapat dilihat pada Gambar 2.12 dibawah ini.

Gambar 2.12
Grafik Struktur Investasi di Provinsi Banten



Sumber: Analisis I-O, BPS Banten – 2000

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan dewasa ini. Jumlah penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan selain diarahkan

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus pula mencakup upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan distribusi penduduk.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten sudah mencapai 10,63 juta orang. Penduduk laki-laki berjumlah 5,44 juta orang, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang hanya 5,19 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Banten pada tahun 2010 sekitar 101,5 atau terdapat 1.015 penduduk laki-laki diantara 1.000 penduduk perempuan.

Dibanding tahun 2000, penduduk Banten tumbuh sangat pesat yaitu rata-rata mencapai 2,78% per tahun. Padahal, penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% per tahun. Akibatnya, persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi 4,48% pada tahun 2010. Disamping itu, pada tahun 2010 Banten juga berhasil menggeser DKI Jakarta sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,12%), Jawa Timur (15,77%), Jawa Tengah (13,63%) dan Sumatera Utara (5,46%).

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor daya saing daerah yang menentukan dalam rangka menarik investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar sekitar 2,35 juta orang tenaga kerja di Provinsi Banten bekerja antara 35 sampai 49 jam per minggu dan berdomisili di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon, yang terkenal sebagai pusat bisnis dan industri. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18% dan 22,77%. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12% dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Setiap tahun selama periode 2009-2011, secara rata-rata dua dari tiga penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Banten

memasuki pasar kerja. Hal ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 dimana jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa dan yang bekerja sebesar 4.153.681 jiwa sehingga TPAK adalah sebesar 65,34% dan angka tingkat ketergantungan adalah sebesar 34,66%.

Jumlah angkatan kerja sendiri cenderung bertambah, dari 4,36 juta orang pada tahun 2009 menjadi 5,16 juta orang pada Februari 2011. Persentase penduduk usia kerja yang bekerja dari tahun 2009 sampai Februari 2011 terus meningkat dari 85,03% menjadi 86,50%. Berarti, tingkat kesempatan kerja di Banten terus meningkat. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga menjadi 13,50% pada february 2011. Meskipun demikian, angka pengangguran ini masih tetap tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar antara 2,67% (Nusa Tenggara Timur) dan 10,83% (DKI Jakarta).

Berdasarkan data pendidikan angkatan kerja menurut kategori penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 total jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2.035.415 jiwa atau 41,93%. Diikuti dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA masing masing sebesar 930.491 jiwa (19,17%) dan 1.432.985 jiwa (20,59%). Sementara tingkat D1 sampai dengan S1,S2, dan S3 hanya berjumlah 455.293 jiwa (18,31). Jumlah angkatan kerja yang terserap berdasarkan pendidikan sebesar 4.153.681 jiwa yang didominasi oleh pendidikan SD kebawah sebesar 1.708.861 jiwa (41,14%) dan pendidikan SLTA sebesar 1.253.488 (30,18%) serta pendidikan SLTP sebesar 759.044 (18,7%), sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi D1 sampai dengan S1,S2 dan S3 sebesar 432.288 (10,41%). Dengan demikian jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 700.503 jiwa yang sebagian besar di dominasi oleh tingkat pendidikan SD sebesar 326.554 jiwa (46,62%), pendidikan SLTP sebesar 171.447 jiwa (24,47%) dan SLTA sebesar 179.497 (25,6%). Sementara yang berpendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1,S2 dan S30 tinggal 23.005 (3,28%).

Tingginya angka pengangguran Banten bila diamati secara spasial sepertinya berkaitan erat dengan fenomena migrasi penduduk. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan TPT di bawah angka pengangguran Banten. Diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang merupakan daerah perdesaan dimana perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, sehingga bukan menjadi daerah tujuan migrasi. Kemudian Kota Tangerang Selatan sebagai daerah termaju di Banten yang perekonomian didominasi oleh sektor ekonomi modern, karena itu relatif kurang menarik untuk menjadi daerah tujuan migrasi dibanding wilayah Tangerang lainnya. Sedangkan lima kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka pengangguran Banten merupakan daerah tujuan migrasi dengan berbagai sebab, antara lain adalah daerah dengan sektor perindustrian yang sangat dominan, ibukota Provinsi Banten dan adanya disparitas tingkat upah.

Upah minimum Provinsi (UMP) di Banten selama periode 2008-2010 secara nominal terus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, UMP riil (dibanding laju inflasi) selama periode tersebut sesungguhnya cenderung mengalami penurunan. UMP Banten sendiri pada tahun 2010 mencapai 955 ribu rupiah, lebih tinggi dibanding rata-rata UMP Nasional yang hanya 908 ribu rupiah.

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di

bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sampai dengan saat ini Pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) bidang SPM, yaitu:

- 1) SPM Bidang Perumahan;
- 2) SPM Bidang Sosial;
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- 6) SPM Bidang Ketahanan pangan;
- 7) SPM Bidang Kesenian;
- 8) SPM Bidang Perhubungan;
- 9) SPM Bidang Penanaman Modal;
- 10) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
- 11) SPM Bidang Kesehatan
- 12) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera
- 13) SPM Bidang Pendidikan
- 14) SPM Bidang Pekerjaan Umum
- 15) SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait

dengan SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025);
 - b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025);
 - c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% pada tahun 2025).
- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - b. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015);
 - c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - d. Persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015);
 - e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015);
 - f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015).
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)

- a. Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70% pada tahun 2013);
 - b. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya (100% pada tahun 2013);
 - c. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (100% pada tahun 2013).
- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (100% pada tahun 2014);
 - b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014);
 - c. Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% pada tahun 2014);
 - f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50% pada tahun 2014);

- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% pada tahun 2014);
 - h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% pada tahun 2014).
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
- a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (50% pada tahun 2016);
 - b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (60% pada tahun 2016);
 - c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60% pada tahun 2016).
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
- a. Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015);
 - b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015);
 - c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015);
 - d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015).
- 7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010)
- a. Cakupan kajian seni (50% pada tahun 2014);
 - b. Cakupan fasilitas seni (30% pada tahun 2014);
 - c. Cakupan gelar seni (75% pada tahun 2014);
 - d. Cakupan misi kesenian (100% pada tahun 2014);
 - e. Cakupan SDM kesenian (25% pada tahun 2014);
 - f. Cakupan tempat (100% pada tahun 2014);
 - g. Cakupan organisasi (34% pada tahun 2014).

- 8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
- a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - b. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2014);
 - c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardriil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - d. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2014);
 - f. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (75% pada tahun 2014);
 - g. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (60% pada tahun 2014);
 - h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - i. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau (100% pada tahun 2014);

- j. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan (75% pada tahun 2014);
 - k. Tersedianya pelabuhan bagi setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan (75% pada tahun 2014);
 - l. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014);
 - m. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan (100% pada tahun 2014);
 - n. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jangkutan jalan (100% pada tahun 2014);
 - o. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - p. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014).
- 9) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
- a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : - Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri,

- perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi (100% pada tahun 2014);
- b. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - c. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (1 sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2014);
 - d. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - e. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - f. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% pada tahun 2014);
 - g. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (100% pada tahun 2014);
 - h. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Provinsi Banten terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan penyediaan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follows function*).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1 PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun 2007-2011 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2007-2011 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi pendapatan daerah.

3.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Periode Tahun 2007-2011

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2007-2011 sebagaimana tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011 *)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	Pendapatan Daerah	1.909.020	2.351.381	2.436.096	3.139.451	3.755.614	18,82
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.298.365	1.661.169	1.687.751	2.321.749	2.895.570	22,96
1.1.1	Pajak Daerah	1.246.281	1.601.611	1.617.822	2.208.083	2.769.882	22,86
1.1.2	Retribusi Daerah	3.052	3.184	2.921	3.195	3.780	5,94
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.835	21.479	29.415	37.874	31.533	17,35
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31.197	34.895	37.592	72.595	90.374	34,30
1.2	Dana Perimbangan	607.804	686.651	744.967	812.654	849.491	8,77
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	277.207	325.810	351.666	417.015	343.927	6,63
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.597	342.744	361.179	381.979	460.384	8,83
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	18.097	32.121	13.661	45.180	83,58
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.850	3.561	3.379	5.049	10.554	44,57
1.3.1	Hibah	2.580	3.561	3.016	4.482	4.373	17,22
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	363	553	4.895	209,47
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	14	1.286	2.324,01

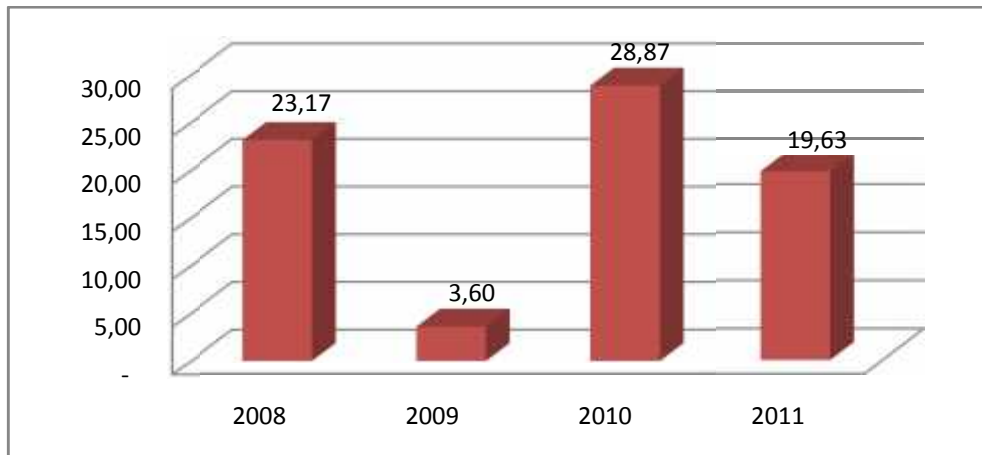
Sumber: Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2007-2010

**) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2011 (un-audited)*

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir (2007-2011) sebesar 18,82% per tahun. Struktur Pendapatan Daerah periode Tahun 2007-2012 secara berurutan didominasi oleh : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan rata-rata pertumbuhan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 22,96% per tahun. Jenis PAD yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pajak Daerah sebesar 22,86% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Retribusi Daerah sebesar 5,94% per tahun.

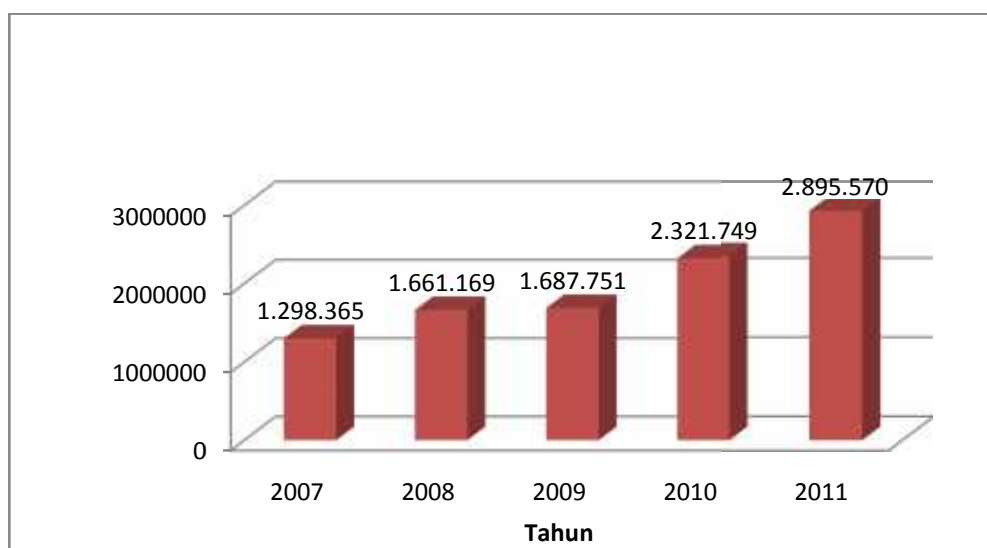
Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Banten
Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Pada grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007 hingga 2011 tidak stabil, terutama dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh situasi nasional pada saat itu, yakni tahun 2009, di saat pemilihan Presiden Republik Indonesia, pendapatan nasional (LPE) mengalami pertumbuhan yang sangat rendah yakni 3,60% dan kembali meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar 28,87%. Demikian pula Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2010 turun menjadi 6,08% dan kembali meningkat menjadi 6,43 % pada Tahun 2011.

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)

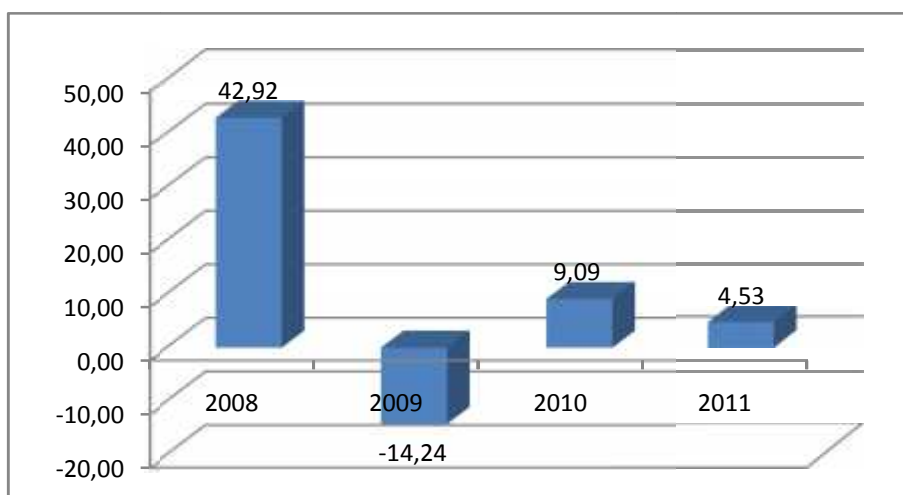


Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2010 terus menunjukkan kenaikan, realisasi penerimaan PAD selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mengelola dan mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada.

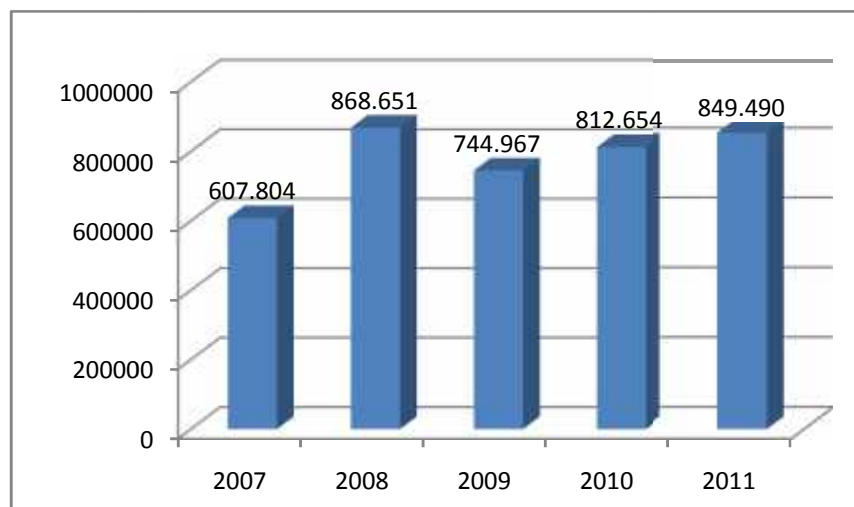
- b. Dana Perimbangan sebesar 8,77% per tahun. Jenis Dana Perimbangan yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Dana Alokasi Khusus sebesar 83,58% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 6,63% per tahun.

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

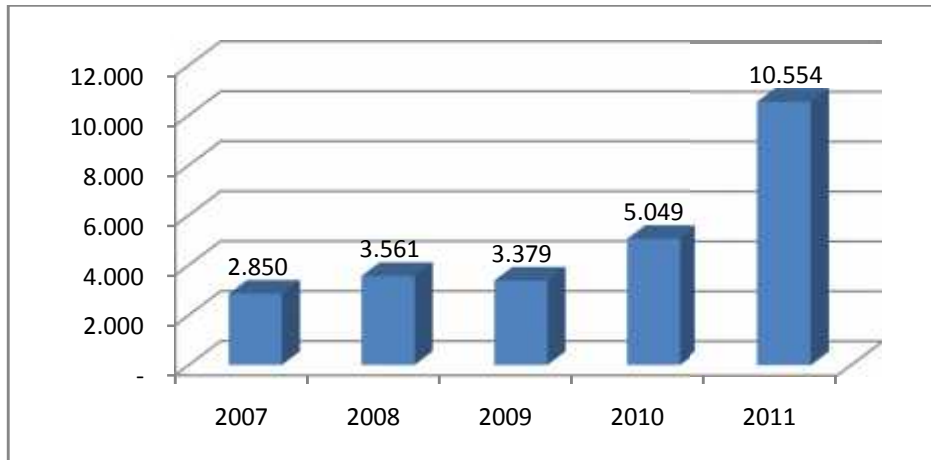
Gambar 3.4
Grafik Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

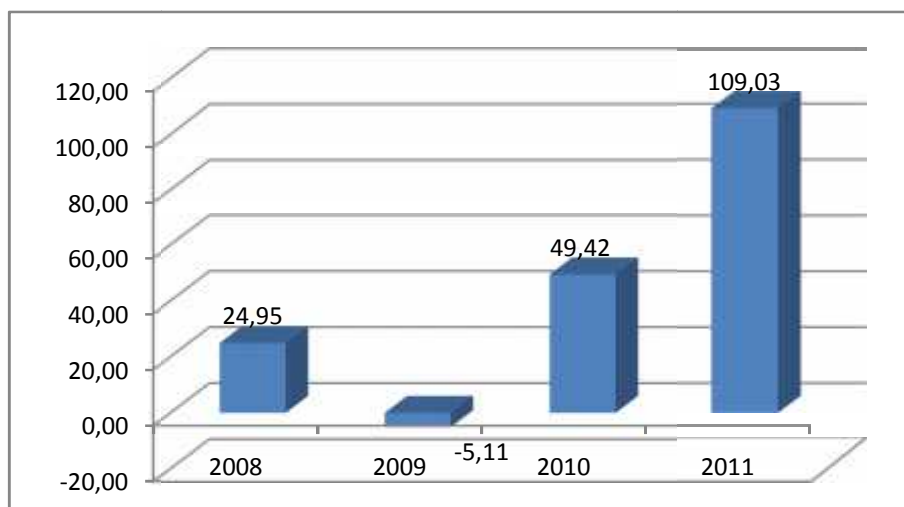
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 44,57% per tahun. Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Pendapatan Lainnya sebesar 2.324,01% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Hibah sebesar 17,22% per tahun.

Gambar 3.5
Grafik Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Gambar 3.6
Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode Tahun 2007-2011

Perbandingan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten periode Tahun 2007-2011 dijelaskan sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
PENDAPATAN DAERAH	1.899.730.331.917	1.908.749.559.388	100,47	2.262.823.333.290	2.351.380.504.656	103,91	2.307.104.222.411	2.436.096.122.341	105,59	2.750.902.035.850	3.139.451.309.696	114,12	3.527.316.555.823	3.755.614.331.680	106,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.306.871.331.917	1.298.365.304.058	99,35	1.601.222.147.490	1.661.168.634.116	103,74	1.539.768.500.936	1.687.750.749.401	109,61	1.924.534.634.850	2.321.748.521.954	120,64	2.672.749.200.000	2.895.569.551.292	108,34
PAJAK DAERAH	1.263.350.000.000	1.246.280.794.884	98,65	1.545.988.000.000	1.601.610.635.447	103,60	1.474.100.000.000	1.617.821.795.281	109,75	1.846.500.000.000	2.208.083.478.083	119,58	2.601.000.000.000	2.769.882.202.622	106,49
Pajak Kendaraan Bermotor	418.500.000.000	410.898.711.332	98,18	473.000.000.000	493.981.945.857	104,44	533.500.000.000	562.722.964.415	105,48	614.500.000.000	689.076.910.840	112,14	803.450.000.000	855.537.327.540	106,48
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	473.500.000.000	500.664.397.353	105,74	691.272.000.000	702.446.796.200	101,62	588.000.000.000	673.401.042.500	114,52	859.000.000.000	1.086.432.898.500	126,48	1.415.550.000.000	1.428.169.574.900	100,89
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	350.000.000.000	313.481.790.539	89,57	360.000.000.000	382.933.300.340	106,37	326.000.000.000	352.625.776.452	108,17	346.000.000.000	400.147.797.867	115,65	368.000.000.000	468.970.596.039	127,44
Pajak Air Bawah Tanah (PABT)	11.283.000.000	10.520.260.991	93,24	10.716.000.000	10.757.853.905	100,39	12.800.000.000	14.250.614.239	111,33	13.000.000.000	15.816.371.231	121,66	-	-	-
Pajak Air Permukaan (PAP)	10.067.000.000	10.715.634.669	106,44	11.000.000.000	11.490.739.145	104,46	13.800.000.000	14.821.397.675	107,40	14.000.000.000	16.609.499.645	118,64	14.000.000.000	17.204.704.143	122,89
RETRIBUSI DAERAH	2.610.000.000	3.052.565.172	116,96	2.733.000.000	3.184.526.651	116,52	2.949.000.000	2.921.743.038	99,08	2.949.000.000	3.195.528.168	108,36	2.818.000.000	3.780.282.690	134,15
RETRIBUSI JASA UMUM	840.000.000	1.021.567.400	121,62	652.000.000	825.762.460	126,65	688.000.000	800.807.690	116,40	688.000.000	889.975.950	129,36	788.000.000	1.244.545.710	157,94
Retribusi Pelayanan Kesehatan	145.000.000	134.999.950	93,10	148.000.000	214.020.440	144,61	159.000.000	217.956.960	137,08	159.000.000	213.657.300	134,38	209.000.000	413.057.160	197,64

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	420.000.000	557.061.500	132,63	504.000.000	611.742.020	121,38	529.000.000	582.850.730	110,18	529.000.000	676.318.650	127,85	579.000.000	831.488.550	143,61
Retribusi Pengujian Hasil	275.000.000	329.505.950	119,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUSI JASA USAHA	310.000.000	474.979.380	153,22	585.000.000	386.787.941	66,12	650.000.000	866.274.508	133,27	650.000.000	653.603.867	100,55	660000000	684243180	103,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	230.000.000	439.143.380	190,93	500.000.000	349.749.441	69,95	550.000.000	821.974.508	149,45	550.000.000	552.788.867	100,51	550.000.000	574.064.180	104,38
Retribusi Balai Benih Ikan	80.000.000	28.834.000	36,04	85.000.000	37.038.500	43,57	100.000.000	44.300.000	44,30	100.000.000	100.815.000	100,82	110.000.000	110.179.000	100,16
Retribusi Perum Damri	-	7.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU	1.460.000.000	1.556.018.392	106,58	1.496.000.000	1.971.976.250	131,82	1.611.000.000	1.254.660.840	77,88	1.611.000.000	1.651.948.350	102,54	1.370.000.000	1.851.493.800	135,15
Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000	7.504.800	150,10	6.000.000	17.971.400	299,52	17.000.000	9.952.000	58,54	17.000.000	10.556.000	62,09	17.000.000	7.992.000	47,01
Retribusi Sertifikasi Pengujian Hasil Mutu Perikanan	15.000.000	15.579.300	103,86	17.000.000	37.527.950	220,75	48.000.000	48.210.490	100,44	48.000.000	64.735.350	134,87	53.000.000	69.911.400	131,91
Retribusi Jasa Perhubungan	1.440.000.000	1.532.934.292	106,45	1.473.000.000	1.916.476.900	130,11	1.546.000.000	1.196.498.350	77,39	1.546.000.000	1.576.657.000	101,98	1.300.000.000	1.773.590.400	136,43

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	17.660.831.917	17.834.634.333	100,98	21.427.147.490	21.478.616.999	100,24	29.341.500.936	29.415.351.892	100,25	37.485.634.850	37.874.447.006	101,04	31.300.000.000	31.532.942.304	100,74
LAIN-LAIN PAD YAN SAH	23.250.500.000	31.197.309.669	134,18	31.074.000.000	34.894.855.019	112,30	33.378.000.000	37.591.859.190	112,62	37.600.000.000	72.595.068.697	193,07	37.631.200.000	90.374.123.676	240,16

Sumber : Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010

Keterangan : *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2011 un-audited

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011 terus menunjukkan kecenderungan kenaikan.

Dengan melihat struktur pendapatan daerah dari tahun 2007-2011, dapat diukur rata-rata rasio kemandirian daerah dari Provinsi Banten, yakni :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{PAD} + \text{Dana Perimbangan} + \text{Sisa Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	TAHUN (RP)					RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011*)	
1	PAD	1.298.365.304.058	1.661.168.634.116	1.687.750.749.401	2.321.748.521.954	2.895.569.551.292	
2	Dana Perimbangan	607.804.085.030	686.851.065.325	744.966.513.378	812.654.173.871	849.490.704.021	
3	Sisa Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
4	Rasio Kemandirian Daerah (RKD)	68,11%	70,75%	69,38%	74,07%	77,32%	71,93%

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010

*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2011, un-audited

Memperhatikan rasio kemandirian daerah tahun 2007-2011 yang cenderung terus meningkat dengan rata-rata rasio kemandirian daerah sebesar 71,93% menunjukkan bahwa kemandirian Provinsi Banten semakin baik.

3.1.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi rata-rata Pendapatan Daerah dalam kurun 5 tahun, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2017 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian regulasi di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 8) Meningkatkan penyertaan modal disetor.

Sedangkan asumsi target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6-7%;
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun;
- c. Pajak Cukai Rokok akan menjadi komponen pajak daerah mulai Tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar Rp 200 Milyar per Tahun;

- d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 4,7%;
- e. Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembaga-lembaga keuangan bank dan PT. Banten Global Development;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang akan berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru terutama bagi masyarakat menengah kebawah;
- g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2013, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 6-7% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;
- b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dijelaskan sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	3.902.075	4,416,108	4,865,860	5,487,742	6,116,841	6,752,923
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.981.553	3,379,795	3,854,000	4,386,000	4,917,000	5,446,000
1.1.1	Pajak Daerah	2.841.335	3,262,546	3,728,262	4,251,171	4,772,425	5,290,972
1.1.2	Retribusi Daerah	5.818	6,109	6,414	6,735	7,072	7,425
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.800	37,460	42,038	46,987	52,345	58,152
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	73.600	73,680	77,286	81,107	85,158	89,451
1.2	Dana Perimbangan	916.372	1,032,777	1,008,127	1,097,799	1,195,676	1,302,524
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	355.852	448,861	365,819	391,261	418,484	447,612
1.2.2	Dana Alokasi Umum	530.833	583,916	642,308	706,539	777,193	854,912
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.687	-	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399
1.3.1	Hibah	4.150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399

Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2012

3.2 BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin yang kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), perluasan lapangan kerja (*pro-job*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan

kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2012-2017 diarahkan untuk mendukung *pencapaian* sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Banten yang terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik.
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten.
- 4) Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.
- 5) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kawasan dan wilayah yang memadai.
- 6) Penurunan prosentase jumlah pengangguran melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan, peningkatan investasi program multi sektor untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- 7) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi.

- 8) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Banten, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- 9) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), dan komitmen pembangunan infrastruktur dengan penganggaran tahun jamak (*multi years*).
- 10) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah kerawanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- e. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang digunakan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus diarahkan dalam rangka mendukung pemerataan/kesenjangan fiskal dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kerawanan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta pengeluaran untuk keperluan belanja yang bersifat mendesak.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2012 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2007		2008		2009		2010		2011		2012
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI
2	BELANJA DAERAH	1,927,221.00	2,029,838.82	2,154,355.04	2,400,889.28	2,366,615.46	2,525,067.96	2,511,267.12	2,981,773.54	3,485,295.19	4,047,764.85	4,134,075.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,047,409.54	1,043,980.18	1,062,050.47	1,218,972.18	1,135,895.70	1,235,697.51	1,146,903.73	1,361,145.38	1,764,096.86	2,133,437.63	2,039,583.00
2.1.1	Belanja Pegawai	198,483.98	216,025.41	225,115.38	254,996.13	304,762.72	324,521.80	353,760.01	322,569.48	345,901.05	326,938.95	367,476.00
2.1.2	Belanja Hibah	0.00	16,000.00	48,078.00	87,948.32	61,591.00	70,691.48	69,705.00	99,155.00	340,463.00	360,163.00	289,420.00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	38,039.77	52,590.54	57,000.00	37,103.72	39,356.25	48,262.50	32,029.94	51,529.94	51,000.00	78,500.00	28,750.00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	540,620.25	550,167.75	576,607.09	620,724.00	575,185.73	589,988.12	601,607.98	742,655.90	730,617.00	1,036,294.86	983,951.00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	260,150.00	201,650.00	147,250.00	211,184.48	150,000.00	197,233.60	79,800.81	140,115.06	291,115.81	316,890.81	364,986.00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9,065.67	6,496.60	8,000.00	7,015.52	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,120.00	5,000.00	14,650.00	5,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Pilkada	1,049.88	1,049.88									
2.2	Belanja Langsung	879,811.46	985,858.64	1,092,304.57	1,181,917.10	1,230,719.77	1,289,370.45	1,364,363.39	1,620,628.17	1,721,198.33	1,914,327.21	2,094,492.00
2.2.1	Belanja Pegawai	158,570.08	160,359.07	149,744.87	151,595.84	108,070.78	111,621.60	108,064.26	114,844.38	130,439.19	136,702.25	142,946.25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	321,603.56	362,576.23	375,876.19	400,786.85	462,842.15	484,630.47	540,140.07	633,755.81	937,361.15	1,029,973.59	916,577.30
2.2.3	Belanja Modal	399,637.83	462,923.33	566,683.51	629,534.41	659,806.84	693,118.39	716,159.05	872,027.97	653,397.99	747,651.37	1,034,968.45

Sumber: Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten TA. 2007 s/d 2012

Gambaran proporsi realisasi jenis belanja terhadap anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten selama 3 tahun terakhir (2009-2011) sebagaimana tertera Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (%)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	RATA-RATA
A	Belanja Tidak Langsung	48,49	46,03	53,36	49,29
1	Belanja Pegawai	12,16	9,89	8,22	10,09
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	2,38	3,26	8,97	4,87
5	Belanja Bantuan Sosial	1,99	1,81	2,01	1,94
6	Belanja Bagi Hasil	24,02	25,99	26,04	25,35
7	Belanja Bantuan Keuangan	7,85	4,92	8,12	6,97
8	Belanja Tidak Terduga	0,08	0,15	0,00	0,08
B	Belanja Langsung	51,51	53,97	46,64	50,71
1	Belanja Pegawai	4,41	3,83	3,32	3,85
2	Belanja Barang dan Jasa	18,91	20,99	24,93	21,61
3	Belanja Modal	28,20	29,16	18,39	25,25

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun 2009 - 2011) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota dengan proporsi rata-rata 25,35%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Modal sebesar 25,25% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 21,61%.

Gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Banten selama 3 tahun terakhir (2009-2011) sebagaimana Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2009	2010	2011
A	Belanja Tidak Langsung	294.424	280.475	317.796
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	130.016	143.221	167.977
2	Belanja Tambahan Penghasilan	76.466	84.350	88.843
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	10.752	12.010	13.090
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	77.191	40.894	47.886
B	Belanja Langsung	267.373	371.147	359.399
1	Belanja Honorarium PNS	21.092	29.393	36.804
2	Belanja Uang Lembur	1.974	1.470	1.911
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20	15	2.428
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.775	1.804	2.440
5	Belanja premi asuransi kesehatan	3.064	3.000	2.415
6	Belanja makanan dan minuman pegawai			
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3.202	2.562	2.447
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.296	5.188	2.983
9	Belanja perjalanan dinas	92.842	107.835	135.756
10	Belanja perjalanan pindah tugas			4
11	Belanja Pemulangan Pegawai	278	560	542
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	139.507	219.321	171.138
Total		560.473	651.622	676.665

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 13,72%. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat digambarkan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PROSENTASE
			(Rp)	
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2009	560.472.852.985,00	2.438.320.941.173,00	(a) / (b) x 100%
2	Tahun Anggaran 2010	651.622.319.373,00	2.839.098.528.450,00	22,99
3	Tahun Anggaran 2011	676.664.631.895,00	3.916.618.114.905,00	22,95
				17,28

Sumber: DPKAD Provinsi Banten Tahun 2012

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Provinsi Banten yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Adapun rata-rata pertumbuhan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2009-2011 sebesar 30,06%. Gambaran Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, tahun 2009-2011 diuraikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	2009	2010	2011	RATA- RATA PERTUM- BUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	722.173.134.586,00	892.000.004.469,00	1.197.136.437.956,00	28,86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	130.015.884.881,00	143.221.149.503,00	167.977.378.667,00	13,72
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	10.751.652.000,00	12.009.801.600,00	13.090.122.000,00	10,35
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
4	Belanja bagi hasil	581.405.597.705,00	736.769.053.366,00	1.016.068.937.289,00	32,32
B	Belanja Langsung	19.272.790.940,00	26.787.803.837,00	30.212.705.884,00	25,89
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	0	0	0	0

2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00	120,83
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	15.988.335.540,00	21.756.634.587,00	25.471.282.839,00	26,58
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	3.264.455.400,00	5.016.169.250,00	4.686.423.045,00	23,54
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0	0	0
C	Pembiayaan Pengeluaran	0	0	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
	TOTAL (A+B+C)	741.445.925.526,00	918.787.808.306,00	1.227.349.143.840,00	28,75

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana Tabel 3.9, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2012-2017) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Rencana Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN STRUKTUR 2013	RANCANGAN STRUKTUR 2014	RANCANGAN STRUKTUR 2015	RANCANGAN STRUKTUR 2016	RANCANGAN STRUKTUR 2017
1	PENDAPATAN DAERAH	3,902,075,000,000	4,416,108,000,000	4,865,860,000,000	5,487,742,000,000	6,116,841,000,000	6,752,923,000,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,981,553,000,000	3,379,795,000,000	3,854,000,000,000	4,386,000,000,000	4,917,000,000,000	5,446,000,000,000
1.1.1	Pajak Daerah	2,841,335,000,000	3,262,546,000,000	3,728,262,000,000	4,251,171,000,000	4,772,425,000,000	5,290,972,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	5,818,000,000	6,109,000,000	6,414,000,000	6,735,000,000	7,072,000,000	7,425,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60,800,000,000	37,460,000,000	42,038,000,000	46,987,000,000	52,345,000,000	58,152,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,600,000,000	73,680,000,000	77,286,000,000	81,107,000,000	85,158,000,000	89,451,000,000
1.2	Dana Perimbangan	916,372,000,000	1,032,777,000,000	1,008,127,000,000	1,097,800,000,000	1,195,677,000,000	1,302,524,000,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	355,852,000,000	448,861,000,000	365,819,000,000	391,261,000,000	418,484,000,000	447,612,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	530,833,000,000	583,916,000,000	642,308,000,000	706,539,000,000	777,193,000,000	854,912,000,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29,687,000,000	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,150,000,000	3,536,000,000	3,733,000,000	3,942,000,000	4,164,000,000	4,399,000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	4,150,000,000	3,536,000,000	3,733,000,000	3,942,000,000	4,164,000,000	4,399,000,000
1.3.2	Dana Penyesuaian (BOS)	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA DAERAH	4,134,075,000,000	4,596,108,000,000	5,030,860,000,000	5,677,742,000,000	6,281,841,000,000	6,892,923,000,000
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,039,583,000,000	2,219,289,000,000	2,398,729,000,000	2,755,222,000,000	2,944,749,000,000	3,188,132,000,000
2.1.1	Belanja Pegawai	367,476,000,000	423,857,000,000	508,628,400,000	620,526,648,000	732,221,444,640	798,121,374,658
2.1.2	Belanja Hibah	289,420,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	28,750,000,000	29,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	983,951,000,000	1,150,012,000,000	1,230,326,460,000	1,402,886,430,000	1,574,900,250,000	1,746,020,760,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	364,986,000,000	381,420,000,000	394,774,140,000	466,808,922,000	372,627,305,360	378,989,865,342
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN STRUKTUR 2013	RANCANGAN STRUKTUR 2014	RANCANGAN STRUKTUR 2015	RANCANGAN STRUKTUR 2016	RANCANGAN STRUKTUR 2017
	(BOS)						
2.2	Belanja Langsung	2,094,492,000,000	2,376,819,000,000	2,632,131,000,000.00	2,992,520,000,000.00	3,337,092,000,000.00	3,704,791,000,000.00
2.2.1	Belanja Pegawai	142,946,249,500	150,000,000,000	160,000,000,000.00	170,000,000,000.00	180,000,000,000.00	190,000,000,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916,577,299,864	950,000,000,000	1,100,000,000,000.00	1,150,000,000,000.00	1,250,000,000,000.00	1,300,000,000,000.00
2.2.3	Belanja Modal	1,034,968,450,636	1,350,641,000,000	1,372,131,000,000.00	1,672,520,000,000.00	1,907,092,000,000.00	2,214,791,000,000.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(232,000,000,000)	(180,000,000,000)	(165,000,000,000.00)	(190,000,000,000.00)	(165,000,000,000.00)	(140,000,000,000.00)
3	PEMBIAYAAN	232,000,000,000	180,000,000,000	165,000,000,000.00	190,000,000,000.00	165,000,000,000.00	140,000,000,000.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	264,000,000,000	240,000,000,000	225,000,000,000.00	200,000,000,000.00	175,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	264,000,000,000	240,000,000,000	225,000,000,000.00	200,000,000,000.00	175,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	32,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	32,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.1.1	LPK/BPR	10,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
3.2.1.2	PT. BGD	10,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1.3	Bank BJB Syariah	12,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1.4	PT. PPKD	-	26,000,000,000	26,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Penjaminan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.3	Pembiayaan Netto	232,000,000,000	180,000,000,000	165,000,000,000.00	190,000,000,000.00	165,000,000,000.00	140,000,000,000.00

Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2012

Gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, tergambar pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
2	BELANJA DAERAH	5,180,595	4,596,108	5,030,860	5,677,742	6,281,841	6,892,923
2.1	Belanja Tidak Langsung	3,086,103	2,219,289	2,398,729	2,755,222	2,944,749	3,188,132
2.1.1	Belanja Pegawai	367,476	423,857	508,628,4	620,526,6	732,221,4	798,121,3
2.1.2	Belanja Hibah	289,420	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	28,750	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	983,951	1,150,012	1,230,326,46	1,402,886,4	1,574,900,2	1,746,020,7
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	364,986	381,420	394,774,14	466,808,9	372,627,3	378,989,8
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.1.7	Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1,046,520	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	2,094,492	2,376,819	2,632,131	2,992,520	3,337,092	3,704,791
2.2.1	Belanja Pegawai	144,083.79	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	919,380.18	950,000	1,100,000	1,150,000	1,250,000	1,300,000
2.2.3	Belanja Modal	1,031,028	1,350,641	1,372,131	1,672,520	1,907,092	2,214,791

Sumber: Bappeda Provinsi Banten 2012

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menunjang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Penyertaan modal diarahkan pada lembaga keuangan bank dan BUMD yang diharapkan ikut menunjang peningkatan aktivitas perekonomian daerah;
3. Penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)

Penutup Defisit Riil Anggaran

Pada tahun 2009 dan 2010 realisasi belanja daerah lebih kecil dari realisasi pendapatan, yang berarti terjadi surplus, namun setelah dikurang pengeluaran pembiayaan, terdapat defisit riil sebesar Rp. 2.224.818.832,00. Demikian pula pada Tahun 2011 realisasi belanja daerah diatas realiasi pendapatan daerah, sehingga harus ditutup oleh realiasasi penerimaan pembiayaan.

3.4 NERACA DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten selama kurun waktu 2007–2011 dijelaskan sebagai berikut:

Selama kurun waktu 2007-2011, rata-rata pertumbuhan jumlah Aset Daerah Pemerintah Provinsi Banten mencapai 31,86% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Rata-rata pertumbuhan aset lancar mencapai 42,31% meskipun piutang menurun sebesar 14,94%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 38,85% dan 126,68%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Provinsi Banten berada pada kondisi sehat.

Tabel 3.12
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	42,31
1.1.1	Kas	38,85
1.1.2	Piutang	-14,94
1.1.3	Persediaan	126,68
1.2	INVESTASI	6,28
1.3	ASET TETAP	34,48
1.3.1	Tanah	54,73
1.3.2	Peralatan dan mesin	12,80
1.3.3	Gedung dan bangunan	38,67
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	24,75
1.3.5	Aset tetap lainnya	10,72
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	97,79
1.4	ASET LAINNYA	782,67
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	-
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	44,31
1.4.3	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.4.4	Aset tak berwujud	
1.4.5	Aset Lain-Lain	421,10
	JUMLAH ASET DAERAH	31,86
2	KEWAJIBAN	112,34
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	112,34
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-2,26
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Pokok Pinjaman	-
2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman	-
2.1.6	Utang Bagi Hasil Pajak kepada PEMKAB/PEMKOT	115,27
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	39,57
3.1.1	SILPA	38,86
3.1.2	Cadangan piutang	-15,24
3.1.3	Cadangan persediaan	126,68
3.1.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-29,61
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	32,47
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	34,48
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	403,62

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
3.2.3	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	32,67

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2011, un-audited

Ekuitas Dana yang meliputi dana lancar, dana investasi, dan dana cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana Pemerintah Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 32,67% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Rasio lancar Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 termasuk kategori lancar dikarenakan rasio lancar menunjukkan angka lebih besar dari satu (100%) yaitu masing-masing sebesar 405,50%, 425,18% dan 449,78%. Artinya bahwa kewajiban yang segera harus dibayar (tidak lebih dari satu tahun) dapat terbayarkan segera dengan mengandalkan aset lancar yang terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Tabel 3.13
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	2009	2010	2011
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>) (%)	405,50	423,18	449,78
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%)	390,48	400,57	343,15
3	Rasio total hutang terhadap total asset (%)	1,45	1,87	1,38
4	Rasio hutang terhadap modal (%)	1,45	1,91	1,40
5	Rata-rata umur piutang (hari)	0,38	0,30	0,23
6	Rata-rata umur persediaan (hari)	55,39	103,50	95,12

Sumber : DPKAD Provinsi Banten 2011

Rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Provinsi Banten juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 390,48% pada tahun 2009. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio total hutang terhadap total asset Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu masing-masing 1,45%, 18,87% dan 1,38%. Dengan demikian hanya sebagian kecil saja aset yang dimiliki yang tidak signifikan terbebani utang jangka pendek.

Rasio utang terhadap modal Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang sangat rendah dan tidak signifikan yaitu masing-masing sebesar 1,45%, 1,91% dan 1,40%. Dengan demikian hanya sebagian kecil modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten yang terbebani kewajiban jangka pendek.

Rata-rata umur piutang Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang rendah (tidak lama) yaitu masing-masing sebesar 0,38 hari, 0,30 hari dan 0,23 hari. Dengan demikian piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten sangat segera berubah bentuk menjadi kas.

Rata-rata umur persediaan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang rendah (tidak lama) yaitu masing-masing sebesar 55,39 hari, 103,5 hari dan 95,12 hari. Dengan demikian bentuk aset lain-lain yang mengendap berupa persediaan relatif lama namun kurang dari satu tahun.

3.5 RENCANA KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan

untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012-2017) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagaimana Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi Banten Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	3,902,075	4,416,108	5,610,535	5,281,287	5,798,515	6,351,292
	Pendapatan Asli Daerah	2,981,553	3,379,795	4,598,675	4,179,546	4,598,675	5,044,369
	Dana Perimbangan	916,372	1,032,777	1,008,127	1,097,799	1,195,676	1,302,524
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399
2	Penerimaan Pembiayaan	264,000	240,000	225,000	200,000	175,000	150,000
	Total penerimaan (1+2)	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
3	Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
	Total Pengeluaran (3)	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
4	Surplus/Defisit Riil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2012 -2017 sebagaimana Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan	4,416,108	5,610,535	5,281,287	5,798,515	6,351,292
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	240,000	225,000	200,000	175,000	150,000
	Total penerimaan	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,368,728	1,465,120	1,672,208	1,813,460	1,967,487
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3,287,380	4,370,415	3,809,079	4,160,055	4,533,805

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi di dunia internasional. Pada hakekatnya kondisi terakhir dunia lebih banyak ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup*, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Millenium Development Goals (MDG's) merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG's, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, *MDG's* mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam *MDG's*. Oleh karena itu, *MDG's* menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Upaya percepatan pencapaian Target MDG's menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Banten ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011. *MDG's* terdiri dari

delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

- 1) *Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;*
- 2) *Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;*
- 3) *Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;*
- 4) *Menurunkan Angka Kematian Anak;*
- 5) *Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;*
- 6) *Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;*
- 7) *Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan*
- 8) *Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.*

Hingga saat ini target-target *MDG's* telah *diarusutamakan* kedalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra dan Renja-SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan *MDG's* tersebut dituangkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015. RAD *MDG's* tersebut disusun dengan maksud dan tujuan agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium.

4.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan

pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional.
- 2) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian.
- 3) Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan.
- 5) Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital.
- 6) Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali.
- 7) Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.
- 8) Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 9) Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya .
- 10) Tingginya kasus tindak pidana korupsi.
- 11) Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta.
- 12) Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
- 13) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

4.2.2 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Rasio pembinaan dan penataan perumahan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 23%.
- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Jumlah bantuan untuk korban bencana pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 29.050 orang (80%);
 - b. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 8.100 KK (70%);
 - c. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan perlindungan dan bimbingan balai perlindungan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 1.812 orang (70%).
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)
 - a. Porsentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan mutu airnya pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%;
 - b. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%.

- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
 - a. Porsentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (dalam dan luar provinsi) pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
 - a. Pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja diharapkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,17%;
 - b. Produktivitas, perluasan, kesempatan kerja dan berusaha dilaksanakan dengan Pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas ketenaga kerjaan guna meningkatnya keterampilan dan kesempatan tenaga kerja pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 688 orang (9,5%).
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
 - a. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013-2017 ditargetkan mencapai 200 Ton tiap tahunnya (60%);
 - b. Jumlah cadangan pangan masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 807 Ton (60%);
 - c. Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 52 Kecamatan (60%).
- 7) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
 - a. Rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan melalui peningkatan fasilitas perhubungan melalui

penyediaan saran dan prasana lalu lintas angkutan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%;

b. Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat, laut dan udara pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

8) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)

a. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Kesenian tidak dicantumkan dalam indikator kinerja program, melainkan akan dituangkan kedalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk target tahunan capaian SPM masing-masing bidang di atas dapat dilihat dalam Tabel 8.1.

4.2.3 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Banten ditetapkan sebagai wilayah yang menempati Koridor II, yakni Jawa, Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini memiliki potensi dan prospek yang luar biasa bagi Banten yang harus dicapai di masa mendatang sesuai dengan target MP3EI hingga 2025.

Salah satu peran penting yang ditumpukan ke Banten adalah sebagai wilayah utama yang akan menyatukan antara Koridor II (Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya) dan Koridor I Sumatera (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang).

Sebagai wilayah penghubung antara koridor II dengan Koridor I, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dijadwalkan akan dimulai pada Tahun 2014 akan sangat strategis dan dibutuhkan. JSS yang diharapkan menjadi ikon Indonesia, akan

menyatukan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menimbulkan dampak ekonomi signifikan terhadap seluruh wilayah Banten.

Posisi geo-strategis Banten dalam Koridor II MP3EI memiliki keunggulan kompetitif. Koridor II dalam MP3EI tersebut, berkonsentrasi pada pendorong industri dan jasa nasional. Koridor II juga akan dijadikan pusat industri tekstil, makanan-minuman, alat transportasi, perlengkapan pertahanan, perkapalan, dan proyek Metropolitan Jakarta Area.

Selain menjadi penyokong pangan nasional, koridor II juga menjadi pusat industri. Hal ini dimulai dengan pembangunan pabrik baja terpadu yang telah dilaporkan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah kepada presiden saat peluncuran MP3EI. Selain menyerap ribuan tenaga kerja, proyek ini juga menimbulkan *multiplier effect* yang sangat besar. Proyek ini akan membuka peluang bagi Banten untuk segera menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan.

Proyek yang dijadwalkan akan selesai pada 2013 ini, akan menghasilkan baja dengan kapasitas 6 juta ton per tahun atau 2 kali lipat dari kapasitas produksi PT KS (Kakata Steel) saat ini. Pabrik patungan ini dibangun di sekitar lokasi pabrik PT KS di areal seluas 400 hektar, dengan konsentrasi produksi berupa slab, plate dan hot rolled untuk memenuhi kekurangan permintaan pasar domestik.

Ground breaking proyek ini pada Mei 2010 dan diharapkan sudah dapat beroperasi mulai 2013 dengan kapasitas awal 2,5 juta ton/tahun. Kemudian, proyek ini akan dilanjutkan sampai 2017 hingga mencapai kapasitas 6 juta ton/tahun. Hal ini dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitar, seperti pengembangan industri hilir, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata serta infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasi perusahaan *joint venture*.

Mengingat potensi, prospek, dan perkembangan Banten akhir-akhir ini, maka program MP3EI yang menetapkan Banten di Koridor II optimis bisa dicapai sesuai rencana. Tentunya, prasyarat utama

serta faktor pendukung seperti JSS, peningkatan etos kerja, pembagunan yang berkelanjutan dan lain-lain perlu diteruskan. Iklim investasi di Banten yang sejauh ini sudah kondusif juga perlu ditingkatkan sehingga pembangunan lebih integral dan holistik.

4.3 ISU STRATEGIS DAERAH

4.3.1 Kesenjangan Wilayah

Provinsi Banten memiliki permasalahan kesenjangan kewilayahan antara Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan. Wilayah Utara terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon, sedangkan Wilayah Selatan terdiri dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Wilayah Utara merupakan wilayah yang mempunyai sektor unggulan yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa. Perkembangan sektor industri ini berkembang karena didukung oleh jaringan Jalan Tol Jakarta–Merak. Perkembangan ini ditunjukkan dari adanya industri-industri di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Peranan sektor industri ini terhadap perkembangan Wilayah Utara berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Utara. Sedangkan potensi yang dimiliki Wilayah Selatan adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang belum dikelola dengan baik serta sebagian besar merupakan kawasan lindung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah di Provinsi Banten antara lain kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dimana wilayah Utara relative lebih baik daripada Selatan.

Khususnya wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih menyandang status daerah tertinggal sesuai Keputusan Menteri Negara PDT Nomor 001/Kep/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dimana terdapat 289 desa tertinggal yang tersebar pada:

- 1) Kabupaten Pandeglang terdapat 141 desa tertinggal dari 335 desa/kelurahan, di 12 kecamatan dari 35 kecamatan,
- 2) Kabupaten Lebak terdapat di 148 desa tertinggal dari 345 desa/kelurahan, di 28 kecamatan.

Berdasarkan data desa tertinggal tersebut, maka ditargetkan pada Tahun 2017 tidak ada lagi status desa tertinggal di Banten.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah, Pemerintah telah menetapkan rencana pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Banten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, yaitu :

- 1) Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dan Kawasan Strategis Taman Nasional Ujung Kulon;
- 2) Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur di wilayah Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sedangkan rencana pengembangan kawasan strategis provinsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 meliputi:

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah:
 - a. Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar;
 - b. Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang;
 - c. Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kabupaten Serang;
 - d. Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
 - e. Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon; dan
 - f. Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi:
 - a. Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang
 - b. Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon;

- c. Banten Water Front City di Kota Serang;
- d. Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang;
- e. Kawasan Sport City di Kota Serang;
- f. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota Serang;
- g. Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;
- h. Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
- i. Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
- j. Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- k. Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang;
- l. Kawasan Kota Keekerabatan Maja di Kabupaten Lebak;
- m. Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda; dan
- n. Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan.

Selain menetapkan rencana Kawasan Strategis, Pemerintah Provinsi Banten juga mengembangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang meliputi:

- 1) Kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata), meliputi:
 - a. Kabupaten Tangerang;
 - b. Kabupaten Serang;
 - c. Kabupaten Lebak;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. kawasan agropolitan lainnya yang disepakati bersama.
- 2) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kabupaten Tangerang,
 - b. Kabupaten Serang,
 - c. Kabupaten Pandeglang,
 - d. Kabupaten Lebak

- e. Kota Cilegon.
 - f. Kota Serang.
- 3) Kawasan pengembangan minapolitan terpadu (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata), meliputi:
- a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kabupaten Lebak;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. Kota Serang;
 - f. kawasan minapolitan lainnya yang disepakati bersama.
- 4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya:
- a. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;
 - b. Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak;
 - c. Kawasan Masyarakat Adat lainnya yang disepakati bersama.
- 5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, meliputi:
- a. PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon;
 - b. PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang;
 - c. PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang;
 - d. PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten;
 - e. PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten;
 - f. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
 - g. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;
 - h. Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;
 - i. Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;
 - j. Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
 - k. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
 - l. Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang;

- m. Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
 - n. Waduk Krenceng di Kota Cilegon;
 - o. Puspipstek di Kota Tangerang Selatan.
- 6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi:
- a. kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - b. kawasan strategis provinsi, meliputi:
 - 1) cagar alam rawa danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang;
 - 2) cagar alam gunung tukung gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang;
 - 3) kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
 - 4) kawasan penyangga bandar udara soekarno-hatta.

Selanjutnya dalam rangka sinergitas pembangunan antar wilayah dilakukan kerjasama pembangunan antar daerah yang merupakan salah satu unsur perekat hubungan antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) kerjasama pembangunan antar daerah
 - a. kerjasama pembangunan wilayah perbatasan (Musrenbangtas) Banten-Jawa Barat;
 - b. kerjasama pembangunan wilayah perbatasan (Rakortas) Banten-Lampung;
 - c. kerjasama pembangunan antar daerah Jabodetabekjur;
 - d. kerjasama pembangunan antar daerah Mitra Praja Utama (MPU).
- 2) kerjasama pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Banten mencakup kawasan perkotaan, kawasan andalan dan kawasan strategis.

- 3) kerjasama pembangunan strategis di Provinsi Banten dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta, meliputi:
 - a. bandara banten selatan, kecamatan panimbang kabupaten pandeglang;
 - b. WTP Bendungan Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
 - c. penyediaan air bersih bendungan karian pada kecamatan sajira, kecamatan cimarga, kecamatan maja dan kecamatan rangkasbitung;
 - d. pelabuhan bojonegara, kabupaten serang;
 - e. rencana jalan tol serang-panimbang;
 - f. pembangunan jembatan selat sunda dan pengembangan kawasan strategis selat sunda.

4.3.2 Isu Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1) Kabupaten Serang

- a. terkendalanya pembangunan pelabuhan internasional bojonegara;
- b. percepatan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang;
- d. belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;
- e. belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa;
- f. rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda;
- g. penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang, Kragilan dan Ciwandan;

- h. taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
- i. pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
- j. rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung;
- k. revitalisasi pasar-pasar tradisional.

2) Kabupaten Pandeglang

- a. perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang;
- b. perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang;
- c. penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang;
- d. aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan;
- e. pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sumur dan Panimbang;
- g. pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi;
- h. perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung Asepun-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air;

- i. perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
- j. perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
- k. percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- l. revitalisasi pasar-pasar tradisional.

3) Kabupaten Lebak

- a. perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;
- b. perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
- c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan Cibinuangan;
- d. Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong;
- e. Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;
- g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;

- h. perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air;
- i. perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok-Bogor-Lebak-Pelabuhan Ratu Sukabumi;
- j. percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- k. percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;.
- l. percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
- m. penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya;
- n. revitalisasi pasar-pasar tradisional.

4) Kabupaten Tangerang

- a. rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis Tangerang Internasional City;
- b. revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- c. kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten masih relatif rendah;
- d. percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- e. coastal road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai;
- f. penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi;
- g. percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;

- h. perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase;
- i. penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- j. belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo.

5) Kota Serang

- a. pengembangan Kawasan Strategis Banten Water Front City sebagai wajah Ibukota Provinsi Banten menghadap kelaut;
- b. percepatan pembangunan Bendungan Sindangheula untuk penyediaan air baku bagi Kawasan Industri Serang-Cilegondan permukiman penduduk.
- c. pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tinggi dan Kawasan Sport City.
- d. pelestarian Situs Benda Purbakala dan Masjid Banten Lama;
- e. revitalisasi Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Angkutan Kota Cipocok dan Kepandean;
- f. revitalisasi penataan Geometri perempatan jalan perkotaan untuk mengatasi kemacetan;
- g. revitaliasi penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Serang sebagai pusat kegiatan rekreasi dan olahraga masyarakat;
- h. revitaliasi Drainase kota Serang untuk menangani banjir perkotaan;
- i. revitalisasi pasar-pasar tradisional;
- j. belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kasemen.

6) Kota Cilegon

- a. percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak;
- b. optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
- c. penanganan banjir perkotaan akibat luapan Sungai Cijalupang;
- d. rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
- e. optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-Cilegon (Seragon);
- g. belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon.

7) Kota Tangerang

- a. pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- b. peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
- c. revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Dadap, Sungai Mookervat;

- d. perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang;
- e. penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- f. revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;
- g. optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing.

8) Kota Tangerang Selatan

- a. peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-Parung;
- b. peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gaplek-Sawangan;
- c. penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
- d. perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
- e. percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;
- f. percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta;
- g. pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Setu;
- h. percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- i. mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
- j. kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal;
- k. revitalisasi Pasar-pasar Tradisional.

4.4 ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

Berdasarkan isu-isu yang dijelaskan sebagaimana di atas, selanjutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang (2012-2017), maka ditetapkan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 meliputi infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

4.4.1 Infrastruktur Wilayah/Kawasan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berdampak selain pada tingkat kualitas pelayanan dasar juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan provinsi Banten saat ini dalam kondisi baik walaupun di beberapa tempat terdapat kerusakan ringan. Penanganan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan terutama dalam menunjang percepatan pembangunan wilayah dan kawasan strategis pada koridor ekonomi Jawa-Sumatera (MP3EI). Sehingga untuk mengatasi pemerataan pembangunan antar daerah, pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pada 5 tahun mendatang.

Penataan sistem transportasi wilayah terutama di perkotaan saat ini sangat diperlukan guna mengatasi kepadatan, kemacetan, keamanan dan keselamatan transportasi yang didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi massal yang handal. Menghadapi pertumbuhan pergerakan orang, barang dan jasa yang pesat dalam setiap tahunnya, maka selain upaya revitalisasi jaringan dan pembangunan simpul terpadu antar moda (terminal, stasiun KA, pelabuhan dan bandar udara) juga perlu didukung usaha kerja sama investasi melalui sinergitas program pembangunan pusat dan daerah. Pada dimensi lain penataan dan pengendalian sistem informasi-komunikasi termasuk pos dan telekomunikasi tetap ditingkatkan guna membangun kualitas

masyarakat di perkotaan dan perdesaan agar siap menghadapi tantangan informasi global.

Percepatan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Pembinaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi serta perusahaan pertambangan mineral, panas bumi dan air tanah perlu memperhatikan aspek geologi dan mitigasi bencana. Saat ini ratio elektrifikasi listrik sudah sebesar 78,93% namun kebutuhan energi listrik untuk kawasan industri, pariwisata dan infrastruktur transportasi perkotaan masih perlu dipenuhi untuk kurun waktu mendatang. Penyediaan listrik pedesaan khususnya pada kawasan sentra produksi dan kawasan tertinggal tetap menjadi perhatian utama. Pemanfaatan energi terbarukan juga sangat dibutuhkan terutama pada kawasan pedesaan terisolir yang belum terjangkau jaringan listrik.

Saat ini masalah lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara dan tanah telah dikelola dengan baik. Namun pada masa mendatang, tantangan kinerja kualitas pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting khususnya menghadapi perubahan iklim. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Penanganan masalah persampahan dan sanitasi terutama di perkotaan harus dikelola secara terintegrasi dan terpadu antar wilayah. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional menjadi prioritas dan perlu diusahakan melalui kerja sama pembangunan antar daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian khusus dalam periode mendatang. Saat ini kondisi rumah tidak layak huni masih banyak. Pembangunan Perumahan dan Permukiman tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota tetapi juga seluruh stakeholder di daerah

termasuk pemerintah Provinsi. Searah dengan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perumahan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan maka peningkatan kualitas perumahan dan infrastruktur lingkungan melalui pembangunan jalan lingkungan dan jembatan, penyediaan air bersih, perbaikan drainase dan sanitasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan pada sinergitas pusat dan daerah di kawasan pusat pertumbuhan (agropolitan, minapolitan, pariwisata, sentra produksi) dan kawasan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan peningkatan kualitas perumahan dilaksanakan melalui penataan rumah dan pembinaan swadaya masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menyewa, memiliki, memperbaiki dan membangun rumah layak huni.

Kebutuhan air baku baik untuk industri, pertanian dan rumah tangga perlu mendapat perhatian khususnya air minum/air bersih pada daerah rawan air seperti pantura. Disisi lain pembangunan rehabilitasi sungai dan pantai tetap terus dikerjakan untuk mengatasi banjir dan kekeringan. Perhatian pembangunan tidak saja pada wilayah sungai Cidurian, Ciujung dan Cisadane di Utara Banten (Serang dan Tangerang) tetapi juga pada wilayah sungai di Selatan Banten (Lebak dan Pandeglang). Seiring dengan upaya konservasi hulu-hilir sumber air (mata air, situ, waduk) dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) maka pembangunan bendungan (Karian, Sindang Heula) dan tandon air menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan air tersebut.

4.4.2 Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ketahun. Pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan

kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Berdasarkan analisis Indeks Komposit Gabungan dari keempat dimensi kerawanan pangan, menunjukkan kondisi yang relatif seragam, dalam arti seluruh kabupaten dan kota berada pada satu katagori agak tahan.

Pada demensi ketersediaan pangan yang dicerminkan dari rasio normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan pangan, Kabupaten Pandeglang (nilai rasio 0,322) dan Kabupaten Lebak (nilai rasio 0,409) memiliki kondisi sangat tahan, Kabupaten Serang (nilai rasio 0,538) dengan kondisi cukup tahan, kondisi agak rawan ditempati oleh Kabupaten Tangerang (nilai rasio 34,9), Kota Serang (nilai rasio 1,22), Kota Cilegon (nilai rasio 4,095) dan Kota Tangerang Selatan (nilai rasio 2,037).

Hasil analisis dimensi akses pangan dan mata pencaharian dengan beberapa indikator(persentase penduduk miskin, persentase desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan akses listrik) menunjukkan hasil yang lebih baik, tidak terdapat kabupaten dan kota yang berada pada konsisi sangat rawan, cukup rawan dan agak rawan. Kondisi terbaik sangat tahan ditempati oleh Kota Tangerang (nilai komposit 5,67), cukup tahan ditempati oleh 5 kabupaten dan kota lainnya (nilai komposit 5), kondisi agak tahan ditempati oleh Kabupaten Lebak (nilai komposit 4,0) dan Kabupaten Pandeglang (nilai komposit 3,67).

Pada dimensi kerentanan pangan yang dicerminkan oleh indikator persentase daerah berhutan, areal tanaman padi yang mengalami puso dan areal lahan yang terdegradasi, memberikan gambaran yang relatif tidak terlalu bervariasi, kondisi agak tahan terjadi di Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang (nilai indeks komposit 4,33), Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (nilai komposit 4,00), Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan(nilai komposit 3,67), sedangkan Kota Tangerang menyandang kondisi agak rawan dengan nilai indeks komposit 3,33.

Dimensi penyerapan pangan atau pemanfaatan pangan, dibangun oleh lima indikator (berat badan balita dibawah standart, angka kematian bayi, akses penduduk pada air bersih, persentase penduduk yang dilayani Puskesmas, dan rasio jumlah dokter terhadap kepadatan penduduk), Kota Tangerang Selatan (indeks komposit 4,8) memiliki kondisi cukup tahan, sementara agak tahan terdapat di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (indeks komposit 4,4), Kota Serang, Kota Cilegon (indeks komposit 3,4), kondisi agak rawan dengan nilai komposit 3, terdapat di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Permasalahan yang muncul dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat diantaranya rendahnya kualitas ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan, belum optimalnya produktivitas dan sistem distribusi stok bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok dan masih kurangnya stok pangan dimasyarakat.

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan diperdesaan pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, daging sapi, jagung kedelai, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi. Sedangkan tantangan kedepannya adalah diperkirakan konsumsi pangan masyarakat meningkat dan berkurangnya faktor produksi pertanian serta produktivitas lahan yang terus menurun.

4.4.3 Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Banten pada maret 2011 sebesar 690.874 jiwa atau sebesar 6,32% dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2010 yang berjumlah 751.000 atau sebesar (7,02%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 60.126 orang. Tingkat kemiskinan terbesar terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, masing-masing sebesar 11,14% dan 10,38%. Mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang

mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi pada penduduk yang bekerja di sektor informal seperti pertanian. Dari sisi keekonomian ketenagakerjaan pada sektor pertanian terdapat 42,77% tenaga kerja setengah pengangguran yang artinya nilai produktifitas dan pendapatan yang sangat rendah karena jam kerja dibawah normal.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) didaerah pedesaan sedikit lebih tinggi dari pada perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan didaerah pedesaan lebih buruk dari daerah perkotaan. Terbukti dengan semakin jauhnya jarak pendapatan penduduk miskin di perdesaan terhadap garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di kota.

Secara umum masyarakat miskin perdesaan di Provinsi Banten dihadapkan dengan masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya kepemilikan lahan, rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. Masyarakat miskin dipedesaan sebagian besar bekerja sebagai petani gurem dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 ha dan sebagai buruh tani.

Masyarakat miskin perkotaan pada umumnya bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal dipermukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran. Jumlah masyarakat miskin di perkotaan memiliki kecenderungan untuk bertambah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh urbanisasi yang diakibatkan tekanan ekonomi di wilayah perdesaan.

Masyarakat miskin di kawasan pesisir pada umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung dengan alam (musim) dan rentan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan pesisir. Masyarakat miskin di wilayah pesisir adalah rumah tangga perikanan laut yang bekerja sebagai nelayan kecil,

buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena hanya memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil.

Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan pangan yang tidak tercukupi yang menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi, daya beli yang rendah.

Secara prosentase tingkat pengangguran terbuka tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,28%, dimana jumlah pengangguran terbuka menurun sebesar 49.436 orang. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota Cilegon sebesar 16,4%.

Memperhatikan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat tidak hanya berdasarkan penambahan penduduk alamiah saja tetapi arus urbanisasi usia angkatan kerja menambah beban dalam penyediaan lapangan pekerjaan di provinsi Banten.

Selain dihadapkan pada masalah pengangguran, Pemerintah Provinsi Banten juga dihadapkan pada permasalahan setengah pengangguran, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu. Hal ini menyebabkan produktivitasnya rendah dan upah yang diterima pun rendah. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka akan semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan pekerjapun rendah dan tidak ada jaminan social atas pekerja. Hal ini sering terjadi di sektor informal. Kecenderungan seseorang masuk sebagai setengah pengangguran adalah tingkat kesempatan kerja yang semakin lama semakin kecil yang membuat para pekerja menerima bekerja walaupun berada dibawah jam kerja normal.

Setengah pengangguran menurut lapangan usaha yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 42,77%. Artinya hampir separuh dari tenaga kerja di sektor pertanian kurang produktif. Hal ini memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan kemiskinan, dimana jumlah kemiskinan terbesar pun berada pada sektor pertanian dan di wilayah perdesaan.

Berdasarkan data sampai dengan Agustus 2010, tenaga kerja setengah pengangguran mencapai 982 ribu orang atau mencapai

21,43% dari tenaga kerja penuh. Jika jumlah pengangguran terbuka ditambah dengan jumlah setengah pengangguran, maka total pengangguran nyata sebesar 32,18% dari total angkatan kerja.

Korelasi pengangguran dan kemiskinan sangat kuat. Artinya terjadinya kemiskinan karena lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan sangat terbatas. Tekanan pertumbuhan penduduk, khususnya akibat urbanisasi yang umumnya pada usia kerja menambah tekanan pada penyediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja setengah pengangguran pun demikian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang besar tidak serta merta menciptakan lapangan kerja yang besar sebagaimana 10-20 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi dan persaingan usaha telah menjadikan aktivitas ekonomi yang semakin efisien dan lebih banyak mempergunakan mesin pengganti tenaga kerja manusia, khususnya pada industri manufaktur. Untuk itu dalam penciptaan lapangan kerja perlu kebijakan pembangunan dan investasi yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja padat karya, khususnya pada sektor manufaktur. Sementara untuk pertanian perlu peningkatan aktivitas ekonomi produksi yang mengarah pada peningkatan nilai ekonomis lahan.

4.4.4 Pendidikan dan Kesehatan

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten, perlu pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Banten dilakukan melalui 3 (tiga) pilar pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pilar pertama pemerataan dan peningkatan akses pendidikan mulai dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), dimana indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang ini di Provinsi Banten pada tahun 2010 baru mencapai 20%. PAUD dan TK dimaksudkan untuk menyiapkan dan memaksimalkan potensi perkembangan otak anak pada usia emas atau golden age melalui stimulus yang

terprogram, terbimbing guna menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Disamping pemerataan dan perluasan akses pada jenjang ini juga harus dilaksanakan upaya peningkatan mutu melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu tenaga pendidik.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Propinsi Banten secara umum telah tercapai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, hal ini ditandai oleh capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2010 sebesar 98,76%. Dengan demikian program percepatan wajib belajar yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil. Namun demikian tetap harus dilaksanakan upaya pemeliharaan agar target yang telah dicapai tetap dapat berjalan stabil yaitu dengan program rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Dalam upaya mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) perlu dilaksanakan program pendidikan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan sebesar kurang lebih 1,24%. Ditengarai kelompok ini adalah anak-anak yang termarginalkan oleh karena kondisi fisik dan mentalnya atau karena kondisi ekonomi sosialnya. Untuk itu perlu dikembangkan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SD diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan Sekolah Berstandar Nasional (SBN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu dilakukan program percepatan pemerataan, perluasan akses dan peningkatan mutu secara simultan. Jika kita lihat indikator capaian APM SMP/MTS/Paket B di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 78,88%. Dengan demikian masih tersisa target sasaran sekitar 21,22%. Kendala utama pemerataan pendidikan pada jenjang ini adalah karena kurangnya lembaga sekolah dan masalah hambatan biaya pendidikan. Untuk itu pada jenjang ini perlu dilaksanakan ekspansi penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang telah ada, pembangunan Unit Sekolah Baru dan

menghilangkan biaya pendidikan melalui pembebasan biaya sekolah, SPP dan sejenisnya. Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SMP/MTS/Paket B diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, aplikasi pendidikan berbasis TIK, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan SBN dan SBI.

Pengembangan program pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C difokuskan pada pemerataan dan perluasan akses, dan peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Hal ini dilakukan guna menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan sebagian kecil untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jika kita lihat indikator capaian APM SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Banten pada tahun 2010 baru mencapai 49,58. Ini berarti baru setengah dari penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan setingkat pendidikan menengah. Dengan demikian perlu usaha keras dan masif untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang terampil dan unggul guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Kendala utama pemerataan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C adalah terbatasnya lembaga sekolah yang melayani dan masalah biaya pendidikan. Oleh karena itu pengembangan program pemerataan pendidikan pada jenjang ini diarahkan pada penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang telah ada, membangun unit sekolah baru dan meringankan biaya pendidikan dengan pendampingan BOS SMA/SMK/MA/Paket C. Dalam rangka menyiapkan tenaga terampil ditingkat menengah, dilakukan dengan memperbanyak membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan program magang dan praktek kerja industri di dalam maupun diluar negeri. Dengan demikian diharapkan lulusan SMK dapat langsung siap bekerja atau dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C diarahkan pada peningkatan

sarana prasarana pendidikan, aplikasi pendidikan berbasis TIK, program magang, praktek kerja industri, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan SBN dan SBI.

Untuk melayani pendidikan bagi mereka yang putus sekolah dan mereka yang tidak terjangkau lembaga sekolah jenjang tingkat dasar dan menengah dikembangkan program Pendidikan Non Formal Informal melalui program kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA. Sedangkan untuk menyiapkan keterampilan operasional bagi angkatan kerja dilakukan pembinaan kursus-kursus keahlian dengan standarisasi asosiasi keahlian secara nasional.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan juga dilakukan dengan upaya standarisasi tenaga pendidik. Dari jumlah guru di Provinsi Banten sebanyak 88.317 orang, hingga tahun 2011 telah berkualifikasi S1 sebanyak 53.173 orang. Sisa sebanyak 35.144 orang masih dalam proses peningkatan kualifikasi kejenjang S1 baik melalui program pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun mandiri dan diharapkan tuntas pada tahun 2014.

Program pengembangan pilar ketiga peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan dikembangkan melalui aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Sekolah Berbasis Masyarakat (SBM), peningkatan peran Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Aplikasi Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), Pengembangan Infrastruktur Pendidikan Berbasis Website dan TIK, Evaluasi Pendidikan Berstandar Nasional, Kegiatan Lomba-lomba, Olimpiade berjenjang Nasional maupun Internasional, penerapan ISO pada lembaga sekolah dan Standar Pelayanan Minimal.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat Banten yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus

pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama pada pembangunan kesehatan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMN, RPJMD dan MDG's. Ke 3 (tiga) indikator tersebut merupakan indikator utama dari bidang kesehatan untuk pencapaian IPM.

Pada tahun 2010 AKB mencapai 34,2/1.000 Kelahiran Hidup (KH) dan pada tahun 2012 menurun menjadi 28,90/1.000 KH. AKB ini diharapkan terus mengalami penurunan yang pada akhirnya tahun 2014 AKB di Provinsi Banten turun menjadi 27,60/1.000 KH, sementara target yang dicanangkan dalam RPJMN dan MDG,s yaitu 24/1.000 KH. Sementara untuk AKI di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 191,3/100.000 KH dan pada tahun 2012 menurun menjadi 165/100.000 KH. AKI ini diharapkan terus mengalami penurunan, yang pada tahun 2014 dapat turun mencapai 125/100.000 KH sehingga dapat melampaui atau minimal menyamai apa yang ditargetkan dalam RPJMN yang pada tahun 2014 targetnya adalah 118/100.000 KH, sementara dalam MDG,s pada tahun 2015 AKI diharapkan menjadi 102/100.000. Untuk UHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 64,9 tahun dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 66,5 tahun, pada tahun-tahun berikutnya diharapkan terus meningkat dan pada tahun 2014 diharapkan UHH di Provinsi Banten mencapai 67,30 tahun.

Selain indikator utama seperti tersebut diatas, masih banyak indikator-indikator capaian program yang trendnya menunjukkan peningkatan yang ini mencerminkan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) yang pada tahun 2010 baru mencapai 84%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 88%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (PN) yang pada tahun 2010 baru mencapai 85,5%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 88,6%.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Banten yang setinggi-tingginya, telah dirumuskan 3 (tiga) kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten yaitu 1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan, 2) meningkatkan pengembangan kesehatan berbasis masyarakat, 3) meningkatkan pelayanan KIA dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi diantaranya pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan mutu sumberdaya kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.

Program-program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan meningkatkan pengembangan kesehatan berbasis masyarakat adalah promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan, pengembangan lingkungan sehat. Sementara kebijakan meningkatkan pelayanan KIA dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan revitalisasi keluarga berencana.

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mengendalikan dan mengurangi kejadian penularan penyakit, baik penyakit menular seperti penyakit HIV/AIDS, TBC, Malaria, Hepatitis, DBD, dll maupun penyakit tidak menular seperti penyakit Diabetes Melitus, penyakit Kardiovaskuler dan lain-lain, melalui kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan, peningkatan sarana untuk penanggulangan penularan penyakit, peningkatan sarana imunisasi, penyediaan alat untuk pemeriksaan HIV/AIDS, penyediaan sarana untuk pemberantasan vector penyebar penyakit, dll.

Program perbaikan gizi masyarakat terutama diarahkan untuk peningkatan status gizi pada bayi dan balita dan ibu hamil yang merupakan kelompok khusus. Upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya peningkatan kapasitas petugas dipelayanan kesehatan dalam menangani kejadian-kejadian yang

berhubungan dengan masalah gizi, melaksanakan revitalisasi Posyandu untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal oleh lingkungannya, pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita yang mengalami masalah gizi, peningkatan sarana dan prasarana posyandu.

Peningkatan mutu sumberdaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya meningkatkan kemampuan petugas kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan kesehatan yang ada sehingga semuanya terakreditasi, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kesehatan, pembinaan organisasi profesi kesehatan yang ada di Banten

Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil serta meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan diantaranya pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun Poskestren, revitalisasi Puskesmas, peningkatan Puskesmas non perawatan menjadi Puskesmas perawatan dan Puskesmas Poned, peningkatan kapasitas petugas dipusat-pusat pelayanan kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai buffer, peningkatan perlengkapan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun Poskestren, penempatan tenaga kesehatan (bidan, perawat) hingga ketiap desa terisi oleh tenaga kesehatan. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dan Labkesda seluruh kabupaten/kota sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota serta juga sedang melaksanakan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi Banten baik fisik maupun peralatannya.

Program promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan diarahkan

untuk memberdayakan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan kesehatan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pengembangan desa siaga aktif, penggalakan PHBS, peningkatan promosi kesehatan melalui berbagai media, peningkatana pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin melalui pengobatan masal bagi Gakin, pemberian Jamkesda, dan lain-lain.

Pengembangan lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, peningkatan penggunaan jamban sehat. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya mengadakan MCK-plus sebagai percontohan di masyarakat, melakukan pembinaan kabupaten/kota sehat, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas air yg digunakan masyarakat.

Untuk program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan revitalisasi keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta revitalisasi keluarga berencana. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya penempatan bidan di tiap desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, revitalisasi Posyandu, peningkatan P4K, peningkatan Puskesmas mampu rawat inap dan mampu Poned, peningkatan desa siaga, program Jampersal dengan sasaran masyarakat miskin dimana proses persalinan dilakukan oleh tenaga medis secara gratis, persalinan harus dengan tenaga Kesehatan, pemeriksaan kehamilan beresiko secara rutin, program PKH oleh Dinas Sosial, program KB untuk pencegahan kehamilan dini, penundaan usia perkawinan, mendekatkan layanan kesehatan dan lain-lain. Dengan program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB yang pada gilirannya dapat meningkatkan UHH.

4.4.5 Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

- 1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah.
- 2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.
- 3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai.
- 4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan.
- 5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat.
- 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2012-2017 merupakan Tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu:

- 1) Ketahanan pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Pemantapan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian;
- 4) Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
- 5) Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- 6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; dan
- 7) Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Sekurang-kurangnya tujuh fokus pembangunan tersebut merupakan mandat yang harus tertuang pada setiap periode RPJMD dan diemban oleh Gubernur Banten selama periode kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka visi, misi, dan program pokok kepala daerah harus merupakan pengejawantahan dari ketujuh fokus pembangunan tersebut yang akan diimplementasikan selama masa jabatannya.

5.1 VISI

Dengan melandasi kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: *penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;*

pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (*development agent*) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah:

***“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”***

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang,

diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu Mewujudkan :

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat Banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.

Rakyat Banten Sejahtera :

Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri.

Iman dan Taqwa :

Merupakan do'a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017.

5.2 MISI

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi

segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya harus dilandasi nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta mempedomani prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance** (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity** (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and accountability** (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi** (satu data dan informasi banten) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pada pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Visi : Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasa n Berwawasan Lingkungan	Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasa n guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	71,15	78,15	85,15	92,15	99,15	100
			Tingkat Kemantapan Jembatan (%)	86,00	88	90	92	94	96
		2 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	17.029,64	18.218,52	19.407,39	20.596,26	21.785,14	22.974,00

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
		3 Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;	Rasio Elektrifikasi (%)	81,04	83,04	85,04	87,04	89,04	91,04
		4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)	27,47	32,87	37,48	42,48	47,49	52,50
			Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)	67,01	70,53	74,05	77,57	81,09	84,61
		5 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi	40	50	60	70	80	80
		6 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)	62	62,5	63	63,5	64	64,5
			Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)	360	360	360	360	360	360
			Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)	20	19	18	17	16	15

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
		7 Meningkatkan fungsi kawasan lindung Banten;	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten (%)	15,74	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
			Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)	2.767,82	3.754,79	4.741,77	5.728,745	6.715,72	6.710,00
		8 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,0	4,5	4,67	4,83	5,17	6,50
		9 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.	Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit)	86	106	312	345	408	514

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat	1 Meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;	Indek Gini	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
			PDRB Per Kapita (Rp)	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
			Daya Beli Masyarakat (Rp)	634.938	637.406	639.873	642.341	644.809	647.276
			Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	350.196	394.893	429.550	464.287	498.984	533.681
			Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	402.873	439.822	476.672	513.521	550.371	587.220
			Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	11	11	11	11	11	11
			Pertumbuhan Sektor Peternakan (%)	10	10	10	10	10	10
			Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
			Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
			Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)	15	15	15	15	15	15
Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
			Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11	11	11	11	11	11
			Pertumbuhan Sektor Industri (%)	10	10	10	10	10	10
		2 Meningkatkan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,24	72,54	74,85	77,155	79,46	81,13
		3 Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal;	Persentase Wirausaha Baru (%)	16,66	17,33	18,00	18,67	19,34	20,66
		4 Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;	Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)	13,35	13,38	13,41	13,43	13,47	13,70
		5 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)	200	200	200	200	200	1.000
			Indeks Tanam (Padi)	204	204	204	204	204	204

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI	Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing	1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;	Angka Melek Huruf (%)	96,20	96,36	96,52	96,68	96,84	97,00
		2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencaanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,09	9,19	9,29	9,47	9,65
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,76	99	99,24	99,48	99,72	99,95
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	71,45	72,87	74,32	75,80	77,31	78,85
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	48,43	49,39	50,37	51,37	52,39	53,43
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	117,88	118,11	118,34	118,70	118,80	119,03
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	98,88	99,10	99,32	99,54	99,76	100

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	61,87	65,87	69,87	73,87	77,87	81,87
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (%)	81,70	81,86	82,02	82,18	82,34	82,50
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)	50,90	51,00	51,10	51,20	51,30	51,40
		3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,10	66,70	67,30	67,90	68,50	69,10
			Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)	28,90	28,20	27,60	26,98	26,40	25,70
			Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)	165	155	125	115	105	100
		4 Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;	Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	30	35	40	45	50	50
		5 Meningkatkan kesetaraan gender;	Indeks Pembangunan Gender (%)	64,38	65,09	65,99	67,09	68,29	69,39
			Indeks Pemberdayaan Gender (%)	67,05	67,26	67,40	68,45	68,77	68,98

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6 Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.	Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan	60	65	70	75	80	80
			Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	17	19	21	23	25	25
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang	Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten;	1 Meningkatkan pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat;	Cakupan Pelayanan PMKS (%)	4,28	5,27	6,26	7,25	8,24	14,23
		2 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0
		3 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah	60	65	70	75	80	80
		4 Terkendalinya pertumbuhan, penambahan jumlah serta persebaran penduduk;	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,00	1,98	1,95	1,92	1,89	1,86
		5 Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah	4	4	4	4	4	4

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	1 Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;	Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)	74,06	74,53	75	75,47	75,94	80
		2 Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;	Rasio Kemandirian Daerah	76,4	76,7	77	77,3	77,6	77,8
			Opini Audit BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3 Meningkatkan pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;	Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,5

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
		4 Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)	5	5,5	6	6,5	7	7
		5 Meningkatkan pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;	Cakupan Penyelesaian PERDA (%)	80	85	90	95	100	100
		6 Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;	Cakupan Penegakan PERDA (%)	80	85	90	95	100	100
			Angka Kriminalitas	2.329	2.228	2.127	2.026	1.925	1.804
			Cakupan Mitigasi Kebencanaan	60	65	70	75	80	80
		7 Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan;	Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)	80	55	60	70	80	90
		8 Meningkatkan kualitas Demokrasi di daerah	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	-	-	64,40	-	-	66,33
			Indeks Demokrasi Indonesia	70,98	71,98	72,98	73,98	74,98	75,98

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 STRATEGI

Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi, dirumuskan sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak;
3. mengembangkan sistem transportasi massal (*mass rapid*) dan antar moda;
4. meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
5. meningkatkan fasilitas keselamatan, pengendalian dan pengamanan perhubungan;
6. tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara di Banten;
7. meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor;
8. mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
9. mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
10. meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
11. meningkatkan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energy;

12. meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan;
13. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
14. mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
15. meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
16. meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman;
17. meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
18. meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi;
19. meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
20. meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik;
21. meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
22. mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya);
23. meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
24. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK);
25. meningkatnya pengelolaan kawasan lindung;
26. mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang;
27. mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
28. meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
29. mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten;

30. meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi.

Misi ke-2 :

Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan dan peternakan;
2. meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
4. meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
5. mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah (*pilgrimage tourism*);
6. meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis/aquabisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
7. meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu hasil perikanan, penyuluhan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan

- pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan;
8. meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
 9. memantapkan pranata pengelolaan energi serta mengembangkan pemanfaatan sumur migas;
 10. meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
 11. penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, integrasi perdagangan antar wilayah, peningkatan promosi ekspor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga;
 12. meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
 13. menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan K-UMKM;
 14. mewujudkan harmonisasi dan integritas peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;
 15. memfasilitasi pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum;
 16. meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Banten serta kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal diantaranya percepatan proses perizinan penanaman modal;
 17. membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama;
 18. meningkatnya promosi terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta;
 19. menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras;

20. memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten;
21. meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen.

Misi ke-3 :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan AMH;
2. meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C;
3. meningkatkan SDM pengelola perpustakaan di desa/kelurahan;
4. meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di desa/kelurahan;
5. meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di desa/kelurahan;
6. meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK;
7. meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTS Sederajat;
8. meningkatkan APK dan SMA/MA Sederajat;
9. meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTS ke SMA/SMK;
10. tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
11. meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP;
12. meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional;
13. mengembangkan pendidikan inklusif;
14. sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat);
15. meningkatkan APK PAUD non formal;
16. meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD;

17. meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
18. meningkatkan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) ;
19. meningkatkan mutu penyelenggaraan PK dan PLK;
20. meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK;
21. meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK;
22. menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau;
23. meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik;
24. membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan;
25. meningkatkan jumlah anggaran insentif guru;
26. meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1;
27. meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi;
28. meningkatkan sekolah berbasis TIK;
29. menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan;
30. meningkatkan Keluarga Sadar Gizi;
31. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;
32. meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas PONEB;
33. meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
34. meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
35. mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten;
36. meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten;

37. meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota;
38. meningkatkan peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat;
39. mewujudkan sistem informasi dan Surveillance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional;
40. meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
41. menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
42. meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
43. meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
44. mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
45. mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
46. meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
47. mengembangkan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah;
48. pemberdayaan sarana hubungan industrial;
49. pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam;
50. meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
51. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
52. membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten;
53. merehabilitasi dan merekonsiliasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana;

54. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
55. meningkatkan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan.

Misi ke-4 :

Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin;
2. memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
3. memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana;
4. meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
5. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara professional;
6. meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana;
7. meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
8. memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
9. meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan;
10. meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana;
11. meningkatkan rata-rata usia kawin pertama;
12. meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi;
13. mewujudkan kerjasama bidang ketrasmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran;

14. meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri;
15. penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di Anyer-Serang.

Misi ke-5 :

Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
2. meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
3. menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
4. meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
5. meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD;
6. menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. meningkatkan penegasan batas wilayah;
8. melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
9. terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;
10. meningkatkan penerimaan yang sesuai dengan potensi;
11. meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota;
12. meningkatkan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian;
13. merestrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;

14. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
15. mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil;
16. menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten;
17. menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah;
18. meningkatnya pelayanan informasi yang sehat, layak dan maslahat kepada masyarakat;
19. menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan;
20. mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;
21. menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan taat hukum;
22. mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
23. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas;
24. meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
25. meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
26. pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
27. memantapkan semangat kebangsaan;
28. terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
29. meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten).

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi dari setiap Misi yang selanjutnya merupakan landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagaimana Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi Pertama:			
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan			
Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	<p>1 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat</p> <p>2 Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak</p> <p>3 Mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid) dan antar moda</p>	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>1 Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik</p> <p>2 Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Banten untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, penyelesaian penanganan dan peningkatan jalan horizontal dan vertikal di Banten bagian selatan antara lain peningkatan dan pengembangan jalur vertikal pada poros Serang-Pandeglang-Lebak, peningkatan status jalan horizontal di Banten bagian selatan, serta fasilitasi penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata;</p> <p>3 Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan <i>fly over</i>, pada ruas-ruas strategis di Banten;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>4 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>5 Meningkatkan fasilitas keselamatan, pengendalian dan pengamanan perhubungan</p> <p>6 Tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara di Banten</p> <p>7 Meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor</p>	<p>4 Terimplementasikan nya kebijakan pendanaan untuk pembangunan jalan melalui konsep <i>multi years project</i> pada 6 ruas jalan provinsi meliputi Saketi - Malingping, Citeras - Maja - Cisoka - Tigaraksa, Pakupatan - Palima, Palima - Pasar Teneng, Simpang Munjul - Pamulang - Pajajaran, Jl. Hasyim Ashari.</p> <p>5 Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan;</p> <p>6 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan jembatan pada proses perencanaan dan penganggaran;</p> <p>Bidang Perhubungan</p> <p>1 Terlaksananya pengembangan angkutan massal, melalui fasilitasi pengembangan jalur kereta api (KA).</p> <p>2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;</p> <p>3 Meningkatnya pengendalian muatan sumbu terberat kendaraan pada jaringan jalan di Banten;</p> <p>4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>5 meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ;</p> <p>6 Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum;</p> <p>7 Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;</p> <p>8 Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;</p> <p>9 Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Banten.</p> <p>10 Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Banten.</p> <p>11 Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan;</p> <p>12 Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Banten;</p> <p>13 Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Banten.</p> <p>14 Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;</p> <p>15 Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>16 Rencana pembangunan Bandara Panimbang dan Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>17 Rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara Karanghantu Kota Serang</p> <p>18 Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan;</p>
	<p>2 Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air</p>	<p>1 Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>2 Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</p> <p>3 Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</p>	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>1 Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;</p> <p>2 Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung;</p> <p>3 Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.</p> <p>4 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal melalui fasilitasi pengembangan sistem instalasi pengolahan air bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3 Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi 2 Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan 	<p>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Terjaganya pasokan energi di Banten, melalui peningkatan pasokan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi batubara di PLTU Merak, Labuan dan Tangerang; 2 Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Banten, melalui peningkatan kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik; 3 Tersedianya pranata serta rencana pengelolaan energi di Banten. 4 meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Banten, melalui fasilitasi pengembangan sumber energi panas bumi;
	4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal 2 Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat 	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik <p>Bidang Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>3 Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana</p> <p>4 Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman</p> <p>5 Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan</p>	<p>3 Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.</p> <p>4 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</p> <p>5 Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.</p> <p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>6 meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui, pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Sampah (TPPS), pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah.</p>
	<p>5 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur</p>	<p>1 Meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>2 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara</p>	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>1 meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggara jasa konstruksi.</p> <p>Bidang Perumahan</p> <p>1 terkendalinya proses alih status gedung/rumah Negara</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>6 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim</p>	<p>1 Meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik</p> <p>2 Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>3 Mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya)</p>	<p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>1 Berkurangnya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik, melalui penanganan daerah hulu dan hilir sungai prioritas;</p> <p>2 Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;</p> <p>3 Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya;</p> <p>4 Berkembangnya produksi yang lebih bersih (<i>Cleaner Production</i>) dan EPCM (<i>Environmental Pollution Control Manager</i>).</p> <p>5 Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);</p> <p>6 Tertanggulangnya kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA, dan bencana;</p> <p>7 Meningkatnya konservasi air bawah tanah terutama di wilayah Cekungan Banten;</p> <p>8 Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUL), Pulau Burung dan lainnya.</p> <p>9 Meningkatnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7 Meningkatkan fungsi kawasan lindung Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2 Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK) 3 Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung 	<p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 meningkatnya peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau. 2 Terlaksananya penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; 3 Meningkatnya pengamanan dan perlindungan kawasan lindung; 4 Berkembangnya kawasan lindung baru; 5 Meningkatnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung. 6 Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Banten; 7 Meningkatnya vegetasi pelindung pantai di kawasan wisata pantai utara dan selatan Banten; 8 Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil
	8 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang 	<p>Bidang Penataan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, dan mewujudkan pengembangan kewilayahan Banten khususnya Banten bagian selatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>2 Mengembangkan data dan informasi spasial Banten yang handal, efektif dan efisien</p> <p>3 Mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah</p> <p>4 Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang</p> <p>5 Mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten</p>	<p>2 Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;</p> <p>3 Terlaksananya koordinasi pengaturan dan perijinan pemanfaatan ruang;</p> <p>4 Transformasi orientasi permukiman dari bidang horizontal menjadi bidang vertikal;</p> <p>5 Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Banten yang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang terdiri dari pengembangan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP).</p> <p>6 Tersedianya pranata pendukung pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>7 Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi;</p> <p>8 Harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota;</p> <p>9 Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Banten, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>10 Pengendalian pemanfaatan ruang agar produktif, harmonis, dan</p> <p>11 berkelanjutan. Terasilitasnya pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Banten sebagai kawasan pusat pemerintahan RI dalam rangka menangkap peluang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI di Banten.</p>
	<p>9 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya</p>	<p>1 Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi</p>	<p>Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</p> <p>1 Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya;</p> <p>2 Meningkatnya penggunaan energi alternatif, melalui pengembangan sumber-sumber energi listrik mikro hidro di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; pengembangan sumber-sumber energi listrik tenaga surya, tenaga angin, serta biogas di wilayah perdesaan potensial dan serta belum terjangkau oleh sistem jaringan listrik, dan pengembangan desa mandiri energi terbarukan;</p> <p>3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Misi Ke-2 : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>			
<p>Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>1 Meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal</p>	<p>1 Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan dan peternakan</p> <p>2 Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</p> <p>3 Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</p> <p>4 Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan.</p>	<p>Bidang Pertanian</p> <p>1 Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p> <p>2 Meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p> <p>3 Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p> <p>4 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>5 Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah (<i>pilgrimage tourism</i>)</p> <p>6 Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis/aqua bisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan</p> <p>7 Meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu hasil perikanan, penyuluhan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan</p>	<p>5 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p> <p>6 Meningkatnya diversifikasi produk usaha peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;</p> <p>7 Berkembangan Kawasan Agribisnis melalui penerapan model pengembangan kawasan yang teruji, seperti agropolitanda minapolitan;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>8 Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral</p> <p>9 Memantapkan pranata pengelolaan energi serta pengembangan pemanfaatan sumur migas</p> <p>10 Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)</p> <p>11 Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, integrasi perdagangan antar wilayah, peningkatan promosi ekspor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga</p>	<p>8 Terlaksananya inovasi dan teknologi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan;</p> <p>9 Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;</p> <p>10 Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.</p> <p>11 Meningkatnya kinerja sumber daya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Banten;</p> <p>12 Meningkatnya penyuluhan terhadap petani, peternak, pekebun, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil dan pemasar hasil perikanan;</p> <p>13 Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>14 Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertaniandan perikanan serta pencetakan lahan persawahan dan budidaya perikanan.</p> <p>15 Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</p> <p>16 Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;</p> <p>17 Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</p> <p>18 Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</p> <p>19 Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</p> <p>20 Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.</p> <p>Bidang Kehutanan</p> <p>21 Terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan;</p> <p>22 Terbinanya dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan;</p> <p>23 Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Bidang Pariwisata</p> <p>24 Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali;</p> <p>25 Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (<i>pilgrimage tourism</i>);</p> <p>26 Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>27 Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;</p> <p>28 Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata;</p> <p>29 Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata;</p> <p>30 Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi parawisata;</p> <p>31 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banten.</p> <p>Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>32 Meningkatnya Penataan, Konservasi Sumberdaya Ikan dan Daya Dukung Lingkungan melalui Rehabilitasi Ekosistem Lautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>33 Perairan Provinsi Banten bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <p>34 Meningkatkan peran pelaku utama dalam penguasaan teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim</p> <p>35 Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui fasilitasi, pembinaan atau bantuan kepada masyarakat serta rehabilitasi lingkungan</p> <p>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>36 Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil;</p> <p>37 Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;</p> <p>38 Pemantapan pranata pengelolaan energi. mengembangkan pemanfaatan sumur migas.</p> <p>Bidang Industri</p> <p>39 Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;</p> <p>40 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;</p> <p>41 Meningkatnya kemitraan antar industri;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>42 Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM.</p> <p>43 Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);</p> <p>44 Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;</p> <p>45 Meningkatnya penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil dan produk tekstil, industri keramik, industry logam, serta teknologi informasi komunikasi;</p> <p>46 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.</p> <p>Bidang Perdagangan</p> <p>47 Meningkatnya perluasan pasar ekspor produk Banten;</p> <p>48 Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Banten;</p> <p>49 Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;</p> <p>50 Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien;</p> <p>51 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>52 Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;</p> <p>53 Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			54 Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa; 55 Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen; 56 Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.
	2 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	1 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Bidang Ketenagakerjaan 1 meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
	3 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing	1 Menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan K-UMKM	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis; 2 Fasilitasi lembaga penjaminan kredit daerah untuk meningkatkan akses permodalan bagi K-UMKM bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro; 3 Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi K-UMKM; 4 Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk K-UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha. 5 Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>6 Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.</p> <p>7 Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan.</p>
	<p>4 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja</p>	<p>1 Mewujudkan harmonisasi dan intergrit peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah</p> <p>2 Memfasilitasi pemberian fasilitasi penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum</p> <p>3 Meningkatkan pelaksana kebijakan investasi serta perbaikan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal</p> <p>4 Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama</p> <p>5 Meningkatnya promosi terintegritasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta</p>	<p>Bidang Penanaman Modal</p> <p>1 Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung di bidang penanaman modal;</p> <p>2 Terfasilitasinya keamanan dan kepastian hukum di bidang penanaman modal;</p> <p>3 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Banten;</p> <p>4 Meningkatnya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;</p> <p>5 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal</p> <p>6 Terbentuknya forum interaksi investor mitra Banten;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>7 Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten;</p> <p>8 Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;</p> <p>9 Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;</p> <p>10 Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;</p> <p>11 Terfasilitasinya penyediaan <i>promotion and business center</i> yang representatif.</p>
	<p>5 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat</p>	<p>1 Meningkatkan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan bahan pangan yang cukup memadai</p> <p>2 Menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras</p> <p>3 Memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten</p> <p>4 Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen</p>	<p>Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>1 Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok(beras jagung dan kedelai);</p> <p>2 Meningkatnya keanekaragaman pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok;</p> <p>3 Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;</p> <p>4 Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan</p> <p>5 Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;</p> <p>6 Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi Ke-3 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI			
Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing	1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan AMH 2 Meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C 3 Meningkatkan kelembagaan teknis perpustakaan di desa/kelurahan 4 Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan di desa/kelurahan 5 Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di desa/kelurahan 6 Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK 	Bidang Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) 2 Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket A, B dan C; 3 Meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 4 Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat. Bidang Perpustakaan <ol style="list-style-type: none"> 5 Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan ; 6 Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa.kelurahan ; 7 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/kelurahan ; 8 Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Banten. 9 Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum kabupaten/kota berbasis TIK di Banten; 10 Meningkatnya pemberdayaan layanan perpustakaan keliling berbasis TIK di Banten; 11 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perpustakaan pasca bencana;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			12 Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pustakawan korban bencana alam.
	2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	<p>1 Meningkatkan APM SD/MI Sederajat</p> <p>2 Meningkatkan APK SMP/MTS dan SMA/MA Sederajat</p> <p>3 Meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS</p> <p>4 Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi</p> <p>5 Meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP</p> <p>6 Meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional</p> <p>7 Meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional</p> <p>8 Mengembangkan pendidikan inklusif</p>	<p>Bidang Pendidikan</p> <p>1 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;</p> <p>2 Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;</p> <p>3 Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat.</p> <p>4 Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;</p> <p>5 Meningkatkan pemerataan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.</p> <p>6 Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;</p> <p>7 Tersedianya beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.</p> <p>8 Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		9 Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat)	9 Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SD dan SMP;
		10 Meningkatkan APK PAUD non formal	10 Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;
		11 Meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD	11 Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK
		12 Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD	12 Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional;
		13 Meningkatkan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK)	13 Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SMA dan SMK;
		14 Meningkatkan mutu penyelenggara n PK dan PLK	14 Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;
		15 Meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK	15 Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40;
		16 Meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK	16 Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
		17 Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau	17 Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerintah, secara melembaga, dalam upaya membangun Banten.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		18 Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik	18 Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK.
		19 Membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan	19 Meningkatnya APK PAUD Non Formal;
		20 Meningkatkan jumlah anggaran insentif guru	20 Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
		21 Meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1	21 Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.
		22 Meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi	22 Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);
		23 Meningkatkan sekolah berbasis TIK	23 Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
			24 Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.
			25 Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;
			26 Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;
			27 Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
			28 Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
			29 Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>30 Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK;</p> <p>31 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana;</p> <p>32 Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pendidikan korban bencana alam.</p> <p>33 Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi;</p> <p>34 Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);</p> <p>35 Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum;</p> <p>36 Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi;</p> <p>37 Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN);</p> <p>38 Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah.</p> <p>39 Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;</p> <p>40 Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;</p> <p>41 Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.</p> <p>42 meningkatnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi dan penataan serta pengembangan kawasan pendidikan tinggi.</p> <p>43 Meningkatnya sekolah berbasis TIK;</p> <p>44 Meningkatnya SDM pendidikan berbasis TIK.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas 2 Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi 3 Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 4 Meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas Poned 5 Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, 6 Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten 7 Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten 	<p>Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi; 2 Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi; 3 Meningkatnya jumlah Puskesmas Pelayanan Obsetri Neonatal dan Emergency Dasar (PONED); 4 Meningkatnya jumlah rumah sakit yang melaksanakan Pelayanan Penanganan Obstetri Komprehensif (PONEK). 5 Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 6 Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur. 7 Meningkatnya penggunaan obat-obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>8 Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota</p> <p>9 Meningkatkan peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja</p> <p>10 Mewujudkan sistem informasi dan Surveillance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional</p> <p>11 Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan</p>	<p>8 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;</p> <p>9 Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan.</p> <p>10 Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;</p> <p>11 Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi <i>Center of Excellent</i>/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan <i>gerontology</i>) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>12 Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas</p> <p>13 Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya</p> <p>14 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit</p> <p>15 Menyusun berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan</p> <p>16 Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi</p>	<p>12 Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten (diantaranya HIV dan Flu Burung);</p> <p>13 Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di provinsi serta kabupaten dan kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (<i>preventif dan promotif</i>);</p> <p>14 Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;</p> <p>15 Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;</p> <p>16 Terwujudnya sistem informasi dan <i>surveillance</i> epidemiologi kesehatan yang <i>evidence base</i>, akurat diseluruh kabupaten/kota, Provinsi Banten dan <i>on line</i> dengan nasional;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>17 Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;</p> <p>18 Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu;</p> <p>19 Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.</p> <p>20 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>21 Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;</p> <p>22 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan.</p> <p>23 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana;</p> <p>24 Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kesehatan dan KB korban bencana alam.</p> <p>25 Meningkatnya jumlah persentase desa mencapai <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>;</p> <p>26 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (<i>global warming</i>);</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>27 Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit <i>cardio vascular</i>(stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja;</p> <p>28 Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat;</p> <p>29 Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;</p> <p>30 Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;</p> <p>31 Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama didaerah lintas batas kabupaten dan kota sertaprovinci;</p> <p>32 Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar;</p> <p>33 Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan;</p> <p>34 Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			35 Meningkatkan Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya; 36 Meningkatkan jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.
	4 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja	1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan 2 Mengembangkan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah 3 Pemberdayaan sarana hubungan industrial 4 Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam	Bidang Ketenagakerjaan 1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; 2 Standardisasi dan sertifikasi; 3 Pemagangan; 4 Pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah; 5 Meningkatnya sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. 6 Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial; 7 Pemberdayaan sarana hubungan industrial; 8 Pengembangan sistem pengupahan; 9 Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja. 10 Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam; 11 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana BLK pasca bencana.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5 Meningkatkan kesetaraan gender	1 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	<p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>1 Meningkatkan indeks pemberdayaan gender;</p> <p>2 Meningkatkan indeks pembangunan gender.</p> <p>3 meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak pasca bencana dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak korban bencana alam</p>
	6 Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat	<p>1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri</p> <p>2 Membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten</p> <p>3 Merehabilitasi dan merekonsiliasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana</p> <p>4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga</p> <p>5 Meningkatkan a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan</p>	<p>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;</p> <p>2 Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan;</p> <p>3 Terbentuknya semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan di kalangan pemuda Banten;</p> <p>4 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana;</p> <p>5 Pemberdayaan dan perlindungan SDM di bidang pemuda dan olahraga korban bencana alam.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>6 Meningkatkan mutu dan persebaran sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik;</p> <p>7 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga;</p> <p>8 Meningkatkan kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan;</p> <p>9 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan;</p> <p>10 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat pelatihan dan pertandingan;</p>
<p>Misi Ke-4 : Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang</p>			
<p>Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten</p>	<p>1 Meningkatkan pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat</p>	<p>1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin</p> <p>2 Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya</p> <p>3 Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana</p>	<p>Bidang Sosial</p> <p>1 meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar;</p> <p>2 Terlindunginya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;</p> <p>3 Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>4 Meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>5 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional</p> <p>6 Meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana</p>	<p>4 tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.</p> <p>5 Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>6 Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional;</p> <p>7 Meningkatnya sumber dana sosial;</p> <p>8 Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial;</p> <p>9 Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana;</p> <p>10 Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;</p> <p>11 Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.</p>
	<p>2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</p>	<p>1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>Bidang Sosial</p> <p>1 Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif</p> <p>2 Mengadakan fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal)</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan
	3 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	1 Memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah 2 Penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di Anyer-Serang.	Bidang Kebudayaan 1 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah 2 Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Banten 3 Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya 4 Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta 5 Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representative 6 Memperkaya khasanah sarana prasarana ibadah untuk penguatan nilai budaya religius dalam kehidupan bermasyarakat.
	4 Terkendalinya pertumbuhan, penambahan jumlah serta persebaran penduduk	1 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana 3 Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama 4 Meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Terpeliharanya database penduduk Banten; 2 Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Banten. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5 Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran	4 Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan); 5 Meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KSI serta pengembangan bina keluarga. Bidang Ketransmigrasian 6 Terselenggaranya kerjasama bidang ketransmigrasian antar provinsi di luar Pulau Jawa dengan kabupaten/kota di Banten; 7 Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan <i>resettlement</i> pada bidang wirausaha.
	5 Terwujudnya Sinergitas kerjasama daerah dan perencanaan pembangunan yang partisipatif	1 Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri	Bidang Perencanaan Pembangunan 1 Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri; 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Misi Ke-5 : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien			
Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	1 Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	1 Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah 2 Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Meningkatnya kinerja aparatur; 2 Meningkatnya disiplin aparatur;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>3 Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur</p> <p>4 Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak (<i>Mobile Services Option</i>)</p> <p>5 Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD</p>	<p>3 Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas;</p> <p>4 Terlaksananya pemanfaatan aparatur provinsi untuk menangani program dan kegiatan strategis Banten (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan penyuluh lapangan) di kabupaten dan kota.</p> <p>5 Meningkatnya kualitas aparatur daerah;</p> <p>6 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;</p> <p>7 Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah.</p> <p>8 Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>9 Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat;</p> <p>10 Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi;</p> <p>11 Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD;</p> <p>12 Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>2 Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi</p>	<p>1 Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</p> <p>2 meningkatkan penegasan batas wilayah</p> <p>3 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)</p> <p>4 Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD</p> <p>5 Meningkatkan penerimaan yang sesuai dengan potensi</p> <p>6 Meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota</p>	<p>Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>1 Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;</p> <p>2 Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah;</p> <p>3 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pengembangan <i>virtual office</i>;</p> <p>4 Diterapkannya insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>5 Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Banten, penataan dan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Banten;</p> <p>6 Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>7 Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian</p> <p>8 Merestrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah</p> <p>9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi</p> <p>10 Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil</p> <p>11 Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten).</p>	<p>7 Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Banten.</p> <p>8 Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;</p> <p>9 Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Banten di kabupaten dan kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah;</p> <p>10 Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian;</p> <p>11 Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;</p> <p>12 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;</p> <p>13 Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil;</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>14 Meningkatnya perolehan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;</p> <p>15 Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;</p> <p>16 Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD.</p> <p>17 Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD;</p> <p>18 Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.</p> <p>19 Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) Tahun 2014</p>
	<p>3 Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>1 Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten</p> <p>2 Menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah</p> <p>3 Meningkatkan pelayanan informasi yang sehat, layak dan maslahat kepada masyarakat</p> <p>4 Mengispirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan</p>	<p>Bidang Statistik</p> <p>1 tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten</p> <p>Bidang Kearsipan</p> <p>2 Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah;</p> <p>3 Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip;</p> <p>4 Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju <i>cyber province</i>; 6 Meningkatkan peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab; 7 Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, 8 Meningkatkan transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan, dan 9 Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.
	<p>4 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan</p>	<p>1 Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; 2 Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan. 3 meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengembangan model-model pembangunan secara komprehensif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>5 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah</p>	<p>1 Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan taat hukum</p>	<p>Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>1 Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>2 Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;</p> <p>3 Meningkatnya budaya taat hukum;</p> <p>4 Terwujudnya harmonisasi produk hukum provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dan kota untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik;</p> <p>5 Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;</p>
	<p>6 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana</p>	<p>1 Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas</p> <p>3 Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana</p>	<p>Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>1 Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Banten;</p> <p>3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas.;</p> <p>4 Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana;</p> <p>5 Meningkatnya peran serta dan kualitas aparatur dan masyarakat dalam tanggap bencana.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan	1 Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	<p>Bidang Perencanaan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik. 2 Terkendalinya program-program pembangunan daerah; 3 Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
	8 Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik; 2 Pengembangan kelembagaan demokrasi local; 3 Memantapkan semangat kebangsaan; 4 Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 	<p>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik; 2 Pemantapan semangat kebangsaan; 3 berkembangnya kelembagaan demokrasi lokal. 4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; 5 Meningkatnya peran serta masyarakat madani (<i>civil society</i>). 6 Meningkatnya stabilitas daerah. <p>Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel; 8 Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintahan daerah dan DPRD.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target indikator kinerja serta program, bidang urusan urusan dan SKPD penanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Misi ke-1 :

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Umum
 - a. memantapkan kondisi jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
 - b. meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.
 - c. meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
2. Perhubungan
 - a. meningkatkan penataan pelayanan transportasi wilayah khususnya perhubungan darat (ASDP, LLAJ dan KA) di perkotaan dan antar wilayah;
 - b. mengembangkan kerjasama pembangunan investasi infrastruktur transportasi laut dan udara (Pelabuhan dan Bandara).
3. Perumahan
 - a. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan gedung dan rumah negara;

- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman.
 - c. mengembangkan pembinaan dan penataan perumahan;
 - d. meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah.
4. Penataan Ruang
- a. meningkatkan koordinasi penataan ruang wilayah dan kawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;
 - c. memantapkan peran Provinsi dalam koordinasi penataan ruang.
5. Lingkungan Hidup
- a. membina dan mengusahakan kerjasama pembangunan antar daerah terkait pengelolaan sampah terpadu regional;
 - b. meningkatkan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah terkait Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GTR);
 - c. mengembangkan pola kemitraan jasa lingkungan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam, hutan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.
6. Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. meningkatkan pengelolaan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan listrik mendukung kawasan strategis ekonomi dan usaha masyarakat pedesaan;
 - b. meningkatkan pengusahaan pertambangan dan energy alternatif/energi terbarukan dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
 - c. membina dan mengembangkan bidang ketenagalistrikan dan energi.

Misi ke-2 :

Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar K-UMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.
2. ketenagakerjaan
Perluasan kesempatan kerja.
3. pertanian
Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.
4. pariwisata
Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat.
5. industri
Meningkatkan daya saing industri.
6. perdagangan
Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional.
7. energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral;
8. kelautan dan perikanan
Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan.
9. ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan.

10. kehutanan

Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan.

11. penanaman Modal

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;
- b. membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Misi ke-3 :

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Pendidikan

- a. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Menuntaskan Banten bebas buta aksara;
- c. Mewujudkan Banten bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas sembilan tahun;
- d. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
- f. Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi;
- g. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi);
- h. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK);

- i. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan;
 - j. Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis Website dan TIK.
2. Perpustakaan
 - a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
3. Kesehatan
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak);
 - b. Menyusun kebijakan standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan, pedoman dan regulasi kesehatan.
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular;
 - d. Mengembangkan sistem kesehatan;
 - e. Meningkatkan kecukupan obat dan peralatan kesehatan
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - g. Meningkatkan jumlah dan mengembangkan sarana dan prasarana Puskesmas termasuk Puskesmas PONED;
4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.
5. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Mewujudkan pemuda Banten yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.
6. Ketenagakerjaan
- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
 - b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Misi ke-4 :

Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Sosial

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;
- b. Meningkatkan pembinaan lembaga sosial, keagamaan, Perayaan Hari Besar Keagamaan, dan kerukunan antar umat beragama.

2. Kebudayaan

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Banten.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

5. Ketrasmigrasian

Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.

6. Perencanaan Pembangunan

Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan.

Misi ke-5 :

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik;
 - b. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.
2. Komunikasi dan Informatika
 - a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah.
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*;
 - c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
 - d. Menata sistem hukum di daerah;
 - e. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
 - f. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - g. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;

4. Statistik

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

5. Kearsipan

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik, organisasi masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat;
- b. Meningkatkan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2012-2017, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Secara garis besar dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi maka dituangkan kedalam 12 (dua belas) program unggulan yang meliputi:

- 1) Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan kawasan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh dan perbatasan;
- 2) Program peningkatan pengelolaan sumber daya alam, ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Program peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja;
- 4) Program pengembangan produk unggulan daerah yang inovatif;

- 5) Program peningkatan aksesibilitas ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan;
- 6) Program peningkatan kesadaran beragama dan keragaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- 7) Program peningkatan taraf pendidikan, kesehatan dan produktivitas sumber daya manusia Banten yang sehat, berkualitas, agamis dan berdaya saing;
- 8) Program pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi dalam mendukung daya saing daerah;
- 9) Program peningkatan partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan daerah;
- 10) Program penguatan peran pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan daerah yang didukung dengan kondisi masyarakat Banten yang rukun damai, bersatu dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam membangun Banten;
- 11) Program peningkatan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan pembangunan;
- 12) Program peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

Disamping memperhatikan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur terpilih, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Implementasi kebijakan pembangunan pusat dan provinsi, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk program *Millenium Development Goals* (MDGs), disajikan pada skema persandingan dibawah ini:

Gambar 7.1
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional



Tabel 7.1
Program Pemerintah Provinsi Banten dalam Merespon Program MDGs

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)	PROGRAM DALAM RPJMD BANTEN TAHUN 2012-2017
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin b. Pembinaan Upaya Kesehatan c. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM d. Ketahanan Pangan Masyarakat
2	Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; c. Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Menurunkan angka kematian anak	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5	Meningkatkan kesehatan ibu	a. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak b. Kependudukan dan Keluarga Berencana
6	Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya	a. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

		b. Rehabilitasi Sosial
7	Memastikan kelestarian lingkungan	a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
8	Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan	Peningkatan Iklim Investasi;

Dari ke 12 (dua belas) Program Unggulan di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi Program Prioritas yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program yang dirumpunkan kedalam 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2
Program Prioritas RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
Urusan Wajib				
1	Pendidikan;	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindik
		2	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	Dindik
		3	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Dindik
		4	Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindik
		5	Pendidikan Tinggi	Dindik
		6	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Dindik
		7	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Dindik
2	Kesehatan;	8	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
		9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinkes
		10	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Dinkes
		11	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
		12	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinkes/RSU Malimping
		13	Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat	Dinkes/RSU Malingping

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
3	Pekerjaan umum;	14	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas BMTR
		15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas SDAP
		16	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Dinas SDAP
4	Perumahan;	17	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Dinas SDAP
5	Penataan ruang;	18	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Bappeda/BMTR
6	Perencanaan pembangunan;	19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Bappeda
		20	Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Ekbang
		21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Pemerintahan
7	Perhubungan;	22	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Dishubkominfo
8	Lingkungan hidup;	23	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	BLHD
		24	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	BLHD/Dishutbun
10	Kependudukan dan catatan sipil;	25	Penataan Administrasi Kependudukan	Biro Pemerintahan
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	26	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	27	Kependudukan dan Keluarga Berencana	BPPMD
13	Sosial;	28	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Dinsos/BPPMD
		29	Rehabilitasi Sosial	Dinsos
		30	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		31	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Dinsos/Biro Kesra
14	Ketenagakerjaan;	32	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		33	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Disnakertrans

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
		34	Keterampilan Tenaga Kerja	Disnakertrans
15	Koperasi dan usaha kecil dan menengah;	35	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		36	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		37	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Dinkop dan UMKM
16	Penanaman modal;	38	Peningkatan Iklim Investasi	BKPMPT
		39	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPMPT
17	Kebudayaan;	40	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Disbudpar
18	Kepemudaan dan olahraga;	41	Kepemudaan dan Kepramukaan	Dispورا
		42	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Dispورا
19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	43	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;	44	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro Humas dan Protokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung
		45	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		46	Penanggulangan Bencana	BPBD
		47	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Biro Perlengkapan dan Aset
		48	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	DPPKD
		49	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
		50	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	BKD
		51	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Badiklat
		52	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh SKPD
		53	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Seluruh SKPD
		54	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat
		55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Set DPRD

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
		56	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Biro Hukum
		57	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK	Balitbangda
21	Ketahanan pangan;	58	Ketahanan Pangan Masyarakat	BKPP
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa;	59	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	BPPMD
23	Statistik;	60	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Seluruh SKPD
24	Kearsipan	61	Pembinaan Kearsipan Daerah	Baperpus-arda
25	Komunikasi dan informatika;	62	Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Telematika	Dishubkominfo/Set. KPID
26	Perpustakaan.	63	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Baperpus-arda
		64	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Baperpus-arda
Urusan Pilihan				
1	Pertanian;	65	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/DKP/Dishutbun
		66	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/DKP/Dishutbun
		67	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/BKPP/Dishutbun
		68	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Distanak
2	Kehutanan;	69	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan	Dishutbun
3	Energi dan Sumber Daya Mineral;	70	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Distamben
		71	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Distamben
		72	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Distamben

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
4	Pariwisata;	73	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Disbudpar
		74	Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	Disbudpar
5	Kelautan dan perikanan;	75	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	DKP
6	Perdagangan;	76	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Disperindag
7	Industri;	77	Peningkatan Daya Saing Industri	Disperindag
8	Ketrasmigrasian.	78	Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Disnakertrans
Jumlah		78 Program		

Adapun hubungan antara kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikator kinerja program, bidang urusan dan SKPD penanggung jawab diuraikan sebagaimana Tabel 7.3:

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Pertama:							
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan							
1	Memantapkan kondisi jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	71,15%	100%	Pekerjaan Umum	Dinas BMTR
2	Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	86%	96%	Pekerjaan Umum	Dinas BMTR
3	Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	35	46,2	Pekerjaan Umum	Dinas SDAP
			Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)	1360	15118,5	Pekerjaan Umum	Dinas SDAP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
4	Meningkatkan penataan pelayanan transportasi wilayah khususnya perhubungan darat (ASDP,LLAJ dan KA) di perkotaan dan antar wilayah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	8,69%	19,90%	Perhubungan	Dishubkominfo
5	Mengembangkan kerjasama pembangunan investasi infrastruktur transportasi laut dan udara (Pelabuhan dan Bandara)		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017	10,55%	100,00%	Perhubungan	Dishubkominfo
6	Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	45	100%	Perumahan	Dinas SDAP
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman						

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
8	Mengembangkan pembinaan dan penataan perumahan						
9	Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah						
10	Meningkatkan koordinasi penataan ruang wilayah dan kawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3	15	Penataan Ruang	Bappeda
11	Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,00%	14,17%	Penataan Ruang	BMTR
12	Memantapkan peran Provinsi dalam koordinasi penataan ruang		Rasio Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	5 Paket	Penataan Ruang	BMTR

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
13	Membina dan mengusahakan kerjasama pembangunan antar daerah terkait pengelolaan sampah terpadu regional	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	40%	100%	Lingkungan Hidup	BLHD
14	Meningkatkan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah terkait Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GTR)		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20	100	Lingkungan Hidup	BLHD
15	Mengembangkan pola kemitraan jasa lingkungan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam, hutan pesisir laut dan pulau-pulau kecil	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000	40.000	Lingkungan Hidup	Hutbun

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
16	Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20	100	Lingkungan Hidup	BLHD
17	Meningkatkan pengelolaan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan listrik dan energi mendukung kawasan strategis ekonomi dan usaha masyarakat pedesaan	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	25.000	125000	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbaru (Unit)	106	1353	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	80%	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
18	Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan energy alternatif/energy terbaharukan dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi,	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	10	58	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
19	Membina dan mengembangkan bidang ketenagalistikan dan energi	Program Pengembangan, pengusaha Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	10	50	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	4	5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
Misi Ke-2 :							
Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat							
1	Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar K-UMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	0%	18,28%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
			Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	0%	18,28%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
		Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	0%	29,00%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	0%	29,00%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
		Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	0%	20,66%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
			Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	0%	20,66%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
2	Perluasan kesempatan kerja	Program peningkatan produktifitas tenaga kerja, Perluasan kesempatan kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya	12,56%	10,60%	Ketenagakerjaan	Disnakertrans
3	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.017.956	2.396.699	Pertanian	Distanak
			Surplus Beras (ton)	15.693	88.270	Pertanian	Distanak

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	24.000	34.000	Pertanian	Distanak
			Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	50.000	100.000	Pertanian	Distanak
			Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	31.421	33.967	Pertanian	Distanak
			Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	27.124.558	37.069.669	Pertanian	Distanak
			Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500	500	Pertanian	Hutbun
			Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	4	3	Pertanian	Hutbun
			Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1	1	Pertanian	Hutbun
			cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3	3	Pertanian	Hutbun
			Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	65.000	107.000	Pertanian	Hutbun
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	66.427	70.050	Pertanian	DKP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115	> 100	Pertanian	DKP
			Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1	1,70	Pertanian	DKP
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	143607	190.000	Pertanian	DKP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5	5	Pertanian	Distanak
			Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	20	30	Pertanian	Distanak
			Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	2	2	Pertanian	Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	20	20	Pertanian	BKPP
		Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	104	106	Pertanian	Distanak
			Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	2	3	Pertanian	Distanak
			Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	5	11	Pertanian	Distanak
			Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6	6	Pertanian	Hutbun
			Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)	150	250	Pertanian	Hutbun

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,70%	0,85%	Pertanian	DKP
			Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	1000	5000	Pertanian	DKP
			Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	25	30	Pertanian	DKP
		Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Pertanian	Cakupan ketersediaan Taktor (unit)	14	40	Pertanian	Distanak
			Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)	2	5	Pertanian	Distanak
			Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	8200	4.000	Pertanian	Distanak
4	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%)	17%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan instansi lainnya (%)	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
5	Meningkatkan daya saing industri	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
6	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	15%	100%	Perdagangan	Disperindag
			Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	15%	100%	Perdagangan	Disperindag

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
7	Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	10	58	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
8	Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1	1	Kelautan dan Perikanan	DKP
			Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12	12	Kelautan dan Perikanan	DKP
9	Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan panga	Program Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200	200	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	426,9837	807	Ketahanan Pangan	BKPP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga)	0	1	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	42	82	Ketahanan Pangan	BKPP
			Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	-	100	Ketahanan Pangan	BKPP
			Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)	84	96	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	10	52	Ketahanan Pangan	BKPP
10	Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan.	Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6	6	Kehutanan	Dishutbun
			Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	5	10	Kehutanan	Dishutbun
11	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	Program Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25%	100%	Penanaman Modal	BKPMPT
12	Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	8,1 Trilyun	10.85 Trilyun	Penanaman Modal	BKPMPT
			Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	3,5 Trilyun	4.69 Trilyun	Penanaman Modal	BKPMPT

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Ke-3 :							
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI							
1	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	32	60	Pendidikan	Dindik
2	Menuntaskan Banten Bebas Buta Aksara	Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	98,76	99,95	Pendidikan	Dindik
3	Mewujudkan Banten Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun	Belajar 9 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	98,88	100	Pendidikan	Dindik
4	Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	59,87	65,92	Pendidikan	Dindik
5	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	53173	60,323	Pendidikan	Dindik
6	Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Tinggi	Program Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA	6,64	7,31	Pendidikan	Dindik
			Jumlah Prodi yang terakreditasi	1	25	Pendidikan	Dindik

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
7	Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal)	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	218750	67500	Pendidikan	Dindik
8	Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK dan PKL)						
9	Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	8,99	9,65	Pendidikan	Dindik
10	Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis Website dan TIK		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	45%	100%	Pendidikan	Dindik
11	Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	200 (40%)	500 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda
			Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	10	125 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
12	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	1 (2%)	42 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda
13	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	66	86	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	88,7	92	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	90%	92%	Kesehatan	Dinkes
14	Menyusun kebijakan standar pelayanan kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	60	77	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	30	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	60	100	Kesehatan	Dinkes
15	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi bawah 1 tahun / UCI (%)	85	97,5	Kesehatan	Dinkes
			Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun (%)	<0,5	<0,5	Kesehatan	Dinkes
			Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	90	92	Kesehatan	Dinkes
			Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1	≤1	Kesehatan	Dinkes
			Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	10	60	Kesehatan	Dinkes
			Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	74	79	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
16	Mengembangkan sistem kesehatan	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)	90	100	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase promkesja dan surveilen kesehatan kerja (%)	65	95	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100%	100%	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	1000	Kesehatan	Dinkes
17	Meningkatkan kecukupan obat dan peralatan kesehatan	Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	35	80	Kesehatan	Dinkes
18	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	66	86	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%)	10	40	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Presentase jumlah kab/kota yang minimal mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja (%)	65	100	Kesehatan	Dinkes
			Presentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	75	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Pembinaan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	60	100	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	34	29	Kesehatan	RSUD Malingping
19	Meningkatkan jumlah dan mengembangkan sarana dan prasarana Puskesmas termasuk Puskesmas PONED	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Presentase promkesja dan surveilen kesehatan kerja (%)	70	95	Kesehatan	Dinkes
			Presentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100%	100%	Kesehatan	RSUD Malingping
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	1000	Kesehatan	RSUD Malingping
20	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	8 kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
21	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Pembinaan TKP3	100%		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)	90%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
22	Mewujudkan pemuda Banten yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan	Program Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)	0	45 kwartir	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 klp	62 klp		
23	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga	Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%)	17 cabor / 15 event	94 cabor/ 88 event	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga	0	5 unit		
24	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Program Keterampilan Tenaga Kerja	Meningkatnya Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	12,56%	10,60%	Ketenagakerjaan	Disnakertrasn
25	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	280 orang	2.640 org	Ketenagakerjaan	Disnakertrasn

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Ke-4 :							
Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang							
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi, jaminan, perlindungan dan pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.540 KK	8.010 KK	Sosial	Dinsos
			Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan	120 KK	1.325 KK	Sosial	Dinsos
			Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)	30%	50%	Sosial	Dinsos
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	851 Org	5428 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	1096 Org	6.819 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	530 Org	3180 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah lembaga sosial anak yang dibina	16 Lbg	108 Lbg	Sosial	Dinsos
			Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	650 Org	4020 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	277 Org	1.812 Org	Sosial	Dinsos

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	282 Org	2.562 Org	Sosial	Dinsos
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi	40 Org	290 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah bantuan untuk korban bencana	3.800 Org	29050 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih	1.286 Org	7.716 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial	286 Org	2116 Org	Sosial	Dinsos
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga sosial, keagamaan, Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	559 Org	3579 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina	280 Lbg	3030 Lbg	Sosial	Dinsos
			Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan (NK3)	350 Org	2350 Org	Sosial	Dinsos

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	154 Org	1.108 Org	Sosial	Dinsos
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 keg	12 keg.	Sosial	Biro Kesra
			Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan	600 lembaga	600 lembaga	Sosial	Biro Kesra
3	Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Banten	program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
4	Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100%	100%	Kependudukan dan Catatan Sipil	Biro Pemerintahan
5	Revitalisasi Program Keluarga Berencana.	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)	80 Orang	480 Orang	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
6	Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi	Program Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)	350 KK	350 KK	Ketransmigrasian	Disnakertrans
			Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	155 KK	200 KK	Ketransmigrasian	Disnakertrans
7	Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (Dok)	3	15	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
Misi Ke-5 :							
Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien							
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik	Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Rasio pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
3	Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017.	6,2%	100%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
4	Pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	20%	75%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
			Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	20%	75%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
			Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100%	100%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
5	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, inovasi, IPTEK dan pengadaan secara elektronik	Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum,	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemerintahan

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dok	10 Dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah	5%	3%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	10 Unit	45 unit	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dok	50 dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Humas
			Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Humas
			Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kantor Penghubung

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8 dok	16 dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Kesra
		Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)	8	170 Dokumen	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Balitbangda
		Program Penataan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
6	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance	Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
		Program Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
			Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badiklat
			Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badiklat

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
		Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
		Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	4.891 T	7.256 T	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Perlengkapan dan Aset
			Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Perlengkapan dan Aset
7	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah	Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3	3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
			Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.981 T	4.431 T	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)	2	2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
8	Menata sistem hukum di daerah	Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum
			Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
9	Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Gubernur, Wakil Sekretaris daerah	Pengawasan Gubernur,	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP	
			Rasio Pemeliharaan dan Ketertiban Umum	Ketenteraman		100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP
			Rasio Penegakan Perundang-undangan	Peraturan		100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP
10	Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
			Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
11	Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
12	Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)	41 Paket	205 Paket	Statistik	Seluruh SKPD
13	Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Program Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	17 (40%)	41 (100%)	Kearsipan	Baperpus-arda
			Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	17 (40%)	41	Kearsipan	Baperpus-arda

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
14	Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	47,72%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel	10,06%	13%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	1 Posyantek	10 Posyantek	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes)	79,34%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)	2,42%	30.02 %	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM)	3,62%	40.52 %	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 desa/kel	6 desa/kel	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio pengembangan Pemerintahan Desa	1261 desa	1261 desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
15	Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik	Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)	1643	1643	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
16	Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Bangsa dan Politik	Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	2104	2104	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	6 Keg	100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	1	URUSAN WAJIB															
1	1	Pendidikan;															
1	1	1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			18.000.000.000		19.933.515.341		22.662.794.264		25.272.288.719		28.056.927.347		113.925.525.671		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	32,00	37,00		42,00		47,00		52,00		60,00		60,00			Dindik
1	1	2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun			70.000.000.000		77.519.226.327		88.133.088.805		98.281.122.795		109.110.273.016		443.043.710.943		
		APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	98,76	99		99,24		99,48		99,72		99,95		99,95			Dindik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	98,88	99,10		99,32		99,54		99,76		100		100			Dindik
1	1	3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun			38.000.000.000		42.081.865.721		47.843.676.780		53.352.609.517		59.231.291.066		240.509.443.083		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	59,87	61,06		62,28		63,52		64,72		65,92		65,92			Dindik
1	1	4 Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			10.000.000.000		11.074.175.190		12.590.441.258		14.040.160.399		15.587.181.859		63.291.958.706		
		Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	53173	2,383		2,383		2,383		2,383		2,383		60,323			Dindik
1	1	5 Pendidikan Tinggi			20.000.000.000		22.148.350.379		25.180.882.516		28.080.320.799		31.174.363.719		126.583.917.412		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA	6,64	6,77		6,9		7,03		7,17		7,31		7,31			Dindik
		Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)	1	5		5		5		5		5		25			Dindik
1	1	6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)			10.000.000.000		11.074.175.190		12.590.441.258		14.040.160.399		15.587.181.859		63.291.958.706		
		Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	218750	100000		12500		12500		15000		17500		67500			Dindik
1	1	7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan			12.000.000.000		13.289.010.228		15.108.529.509		16.848.192.479		18.704.618.231		75.950.350.447		
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,99	9,09		9,19		9,29		9,47		9,65		9,65			Dindik
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	45%	15%		10%		10%		10%		10%		100%			Dindik
1	2	Kesehatan;															
1	2	1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak			15.000.000.000		16.611.262.784		18.885.661.887		21.060.240.599		23.380.772.789		94.937.938.059		
		Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	66	70		74		78		82		86		86			Dinkes
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	88,7	89		90		91		91,5		92		92			Dinkes
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	90%	90,5%		91%		91,5%		92%		92,5%		92,5%			Dinkes
1	2	2 Pembinaan Upaya Kesehatan			110.000.000.000		121.815.927.086		138.494.853.836		154.441.764.392		171.459.000.454		696.211.545.768		
		Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	60	65		70		72		75		77		77			Dinkes
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	30	35		90		92		95		100		100			Dinkes
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	80	90		100		100		100		100		100			Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	60	75		85		90		95		100		100			Dinkes
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONEK	80	90		100		100		100		100		100			Dinkes
1	2	3 Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan			25.000.000.000		27.685.437.974		31.476.103.145		35.100.400.998		38.967.954.649		158.229.896.765		
		Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Univrsal Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	85	90		100		100		100		100		100			Dinkes
		Prevalensi HIV (%)	<0,5	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5			Dinkes
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	89	90		90		91		91		92		92			Dinkes
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1	≤1		≤1		≤1		≤1		≤1		≤1			Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	10	20	30	40	50	60	60	60	60	60	60	60		Dinkes
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	74	75	76	77	78	79	79	79	79	79	79	79		Dinkes
1	2	4 Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan			7.500.000.000		8.305.631.392		9.442.830.943		10.530.120.299		11.690.386.395		47.468.969.030	
		Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinkes
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	35	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80		Dinkes
1	2	5 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan			50.000.000.000		55.370.875.948		62.952.206.289		70.200.801.996		77.935.909.297		316.459.793.531	
		Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinkes
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA	78	98	123	153	188	222	222	222	222	222	222	222		Dinkes
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	65	75	40	50	55	60	60	60	60	60	60	60		Dinkes
		Presentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	0	20	50	80	90	100	100	100	100	100	100	100		Dinkes
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	0	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinkes
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	34	34	23	32	27	29	29	29	29	29	29	29		RSUD Malingping
1	2	6 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat			40.000.000.000		44.296.700.758		50.361.765.031		56.160.641.597		62.348.727.438		253.167.834.825	
		Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)	0	75	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100		Dinkes
		Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1000		Dinkes
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	0	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80		Dinkes
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		RSUD Malingping
		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		RSUD Malingping
1	3	Pekerjaan umum;														
1	3	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			988.000.000.000		1.094.128.508.734		1.243.935.596.274		1.387.167.847.447		1.540.013.567.714		6.253.245.520.168	
		Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	68%	75,00%	82,00%	89,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		BMTR
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	86%	88,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%		BMTR
1	3	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air			62.000.000.000		68.659.886.176		78.060.735.799		87.048.994.475		96.640.527.529		392.410.143.978	
		Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	-	4,99	8,14	10,05%	10,92	12,11	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2		SDAP
		Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)	1360	1071,72	2448,88	2534,82	3911,98	5151,1	15118,5	15118,5	15118,5	15118,5	15118,5	15118,5		SDAP
1	3	3 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Perumahan			177.000.000.000		196.012.900.856		222.850.810.264		248.510.839.067		275.893.118.912		1.120.267.669.099	
		Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	-	1.976,25 m3	1.537,5 m3	1.826,25 m3	1.830 m3	1.983,75 m3	9.153,75 m3	9.153,75 m3	9.153,75 m3	9.153,75 m3	9.153,75 m3	9.153,75 m3		SDAP
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/ke (lokasi)	-	112	111	112	112	113	560	560	560	560	560	560		SDAP
		Penyelesaian Gedung KP3B	-	1	2	1	1	6	6	6	6	6	6	6		SDAP
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	-	3	3	3	3	3	15	15	15	15	15	15		SDAP
1	4	Perumahan;														
1	4	1 Pembinaan dan Penataan Perumahan			12.000.000.000		13.289.010.228		15.108.529.509		16.848.192.479		18.704.618.231		75.950.350.447	
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%		SDAP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 5	Penataan ruang;																
1 5 1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan				3.500.000.000		3.875.961.316		4.406.654.440		4.914.056.140		5.455.513.651		22.152.185.547		
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3	3		3		3		3		3		15			Bappeda
		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,00%	4,50%		4,67%		3,83%		3,17%		2,50%		14,17%			BMTR
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket			BMTR
1 6	Perencanaan pembangunan;																
1 6 1	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				12.000.000.000		13.289.010.228		15.108.529.509		16.848.192.479		18.704.618.231		75.950.350.447		
		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Bappeda
1 6 2	Pengendalian Pembangunan Daerah				2.150.000.000		2.380.947.666		2.706.944.870		3.018.634.486		3.351.244.100		13.607.771.122		
		Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Bappeda
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Biro Ekbang
1 6 3	Kerjasama Pembangunan Daerah				1.200.000.000		1.328.901.023		1.510.852.951		1.684.819.248		1.870.461.823		7.595.035.045		
		Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 Dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			Bappeda
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Biro Pemerintahan
1 7	Perhubungan;																
1 7 1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian				10.000.000.000		11.074.175.190		12.590.441.258		14.040.160.399		15.587.181.859		63.291.958.706		
		Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	8,69%	29,99%		35,85%		40,22%		44,30%		48,91%		19,90%			Dishubkominfo
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017	10,55%	39,72%		39,72%		54,06%		54,06%		60,63%		100,00%			Dishubkominfo
1 8	Lingkungan hidup;																
1 8 1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482		
		Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	40%	20%		20%		20%		20%		20%		100%			BLHD
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	-	20		20		20		20		20		100			BLHD
1 8 2	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				3.000.000.000		3.322.252.557		3.777.132.377		4.212.048.120		4.676.154.558		18.987.587.612		
		Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		40.000			Hutbun
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20	20		20		20		20		20		100			BLHD
1 10	Kependudukan dan catatan sipil;																
1 10 1	Penataan Administrasi Kependudukan				1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871		
		Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Biro Pemerintahan
1 11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;																
1 11 1	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.000.000.000		3.322.252.557		3.777.132.377		4.212.048.120		4.676.154.558		18.987.587.612		
		Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota		1 Kab/Kota		2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		1 Kab/Kota		8 kab/Kota			BPPMD
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP, PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPPMD
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya		20%		20%		20%		20%		20%		100%			BPPMD
		Rasio Pembinaan TKP3	100%														BPPMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPPMD	
		Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPPMD	
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS,GSI,APE)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPPMD	
		Presentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)	90%	95%		100%		100%		100%		100%		100%			BPPMD	
1	12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;																
1	12	1 Kependudukan dan Keluarga Berencana				1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871		
		Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)	80 Orang	80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		480 Orang		BPPMD
1	13	Sosial;																
1	13	1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin				3.500.000.000		3.875.961.316		4.406.654.440		4.914.056.140		5.455.513.651		22.152.185.547		
		Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.540 KK	1.115 KK		1.215 KK		1.330 KK		1.370 KK		1.420 KK		8.010 KK			Dinsos	
		Jumlah komunitas masyarakat terpicil yang diberdayakan	120 KK	200 KK		220 KK		250 KK		260 KK		275 KK		1.325 KK			Dinsos	
		Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)	30%	35%		40%		45%		50%		55%		50%			BPPMD	
1	13	2 Rehabilitasi Sosial				6.500.000.000		7.198.213.873		8.183.786.818		9.126.104.260		10.131.668.209		41.139.773.159		
		Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	851 Org	851 Org		901 Org		905 Org		950 Org		950 Org		5428 Org			Dinsos	
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	1096 Org	1.111 Org		1.122 Org		1.156 Org		1.167 Org		1.167 Org		6.819 Org			Dinsos	
		Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	530 Org	530 Org		530 Org		530 Org		530 Org		530 Org		3180 Org			Dinsos	
		Jumlah lembaga sosial anak yang dibina	16 Lbg	16 Lbg		16 Lbg		20 Lbg		20 Lbg		20 Lbg		108 Lbg			Dinsos	
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	650 Org	660 Org		660 Org		680 Org		680 Org		680 Org		4020 Org			Dinsos	
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	277 Org	307 Org		307 Org		307 Org		307 Org		307 Org		1.812 Org			Dinsos	
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	282 Org	340 Org		390 Org		450 Org		550 Org		550 Org		2.562 Org			Dinsos	
1	13	3 Perlindungan dan Jaminan Sosial				2.600.000.000		2.879.285.549		3.273.514.727		3.650.441.704		4.052.667.283		16.455.909.264		
		Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi	40 Org	50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		290 Org			Dinsos	
		Jumlah bantuan untuk korban bencana	3.800 Org	4.000 Org		4.350 Org		4.500 Org		5.000 Org		6.300 Org		29050 Org			Dinsos	
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih	1.286 Org	1.286 Org		1.286 Org		1.286 Org		1.286 Org		1.286 Org		7.716 Org			Dinsos	
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial	286 Org	366 Org		366 Org		366 Org		366 Org		366 Org		2116 Org			Dinsos	
1	13	4 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan				29.400.000.000		32.558.075.057		37.015.897.298		41.278.071.574		45.826.314.667		186.078.358.596		
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	559 Org	604 Org		604 Org		604 Org		604 Org		604 Org		3579 Org			Dinsos	
		Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina	280 Lbg	550 Lbg		550 Lbg		550 Lbg		550 Lbg		550 Lbg		3030 Lbg			Dinsos	
		Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	350 Org	400 Org		400 Org		400 Org		400 Org		400 Org		2350 Org			Dinsos	
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	154 Org	154 Org		200 Org		200 Org		200 Org		200 Org		1.108 Org			Dinsos	
		Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 keg	12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.		12 keg.			Biro Kesra	
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/ lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 lembaga	600 lembaga		600 lembaga		600 lembaga		600 lembaga		600 lembaga		600 lembaga			Biro Kesra	
1	14	Ketenagakerjaan;																
1	14	1 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja				1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871		
		Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	3,85%	4,29%		4,73%		4,29%		4,73%		5,17%		5,17%			Disnakertrans	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 14 2	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha				4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya (%)	12,56%	12,06%			11,56%		11,06%		10,56%		10,06%		10,60%	Disnakertrans
1 14 3	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja				2.000.000.000		2.214.835.038		2.518.088.252		2.808.032.080		3.117.436.372		12.658.391.741	
		Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	280 orang	368 org			448 org		528 org		608 org		688 org		2.640 org	Disnakertrans
1 15	Koperasi dan usaha kecil dan menengah;															
1 15 1	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM				2.000.000.000		2.214.835.038		2.518.088.252		2.808.032.080		3.117.436.372		12.658.391.741	
		Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	0%	14,28%			15,28%		16,28%		17,28%		18,28%		18,28%	K-UMKM
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	0%	14,28%			15,28%		16,28%		17,28%		18,28%		18,28%	K-UMKM
1 15 2	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM				1.500.000.000		1.661.126.278		1.888.566.189		2.106.024.060		2.338.077.279		9.493.793.806	
		Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	0%	25,00%			26,00%		27,00%		28,00%		29,00%		29,00%	K-UMKM
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	0%	14,32%			26,00%		27,00%		28,00%		29,00%		29,00%	K-UMKM
1 15 3	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM				1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871	
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	0%	16,66%			17,66%		18,66%		19,66%		20,66%		20,66%	K-UMKM
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	0%	16,66%			17,66%		18,66%		19,66%		20,66%		20,66%	K-UMKM
1 16	Penanaman modal;															
1 16 1	Peningkatan Iklim Investasi				1.500.000.000		1.661.126.278		1.888.566.189		2.106.024.060		2.338.077.279		9.493.793.806	
		Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25%	20%			15%		25%		25%		15%		100%	BKPMPT
1 16 2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				2.500.000.000		2.768.543.797		3.147.610.314		3.510.040.100		3.896.795.465		15.822.989.677	
		Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	8,1 Trilyun	8,51 Trilyun			8,93 Trilyun		9,38 Trilyun		9,85 Trilyun		10,34 Trilyun		10,85 Trilyun	BKPMPT
		Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	3,5 Trilyun	3,68 Trilyun			3,86 Trilyun		4,05 Trilyun		4,25 Trilyun		4,47 Trilyun		4,69 Trilyun	BKPMPT
1 17	Kebudayaan;															
1 17 1	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya				2.500.000.000		2.768.543.797		3.147.610.314		3.510.040.100		3.896.795.465		15.822.989.677	
		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan		20%			20%		20%		20%		20%		100%	Disbudpar
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat		20%			20%		20%		20%		20%		100%	Disbudpar
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal		26,47%			23,53%		17,65%		17,65%		14,71%		1,00	Disbudpar
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan		22,22%			18,52%		20,37%		18,52%		20,37%		100%	Disbudpar
1 18	Kepemudaan dan olah raga;															
1 18 1	Kepemudaan dan Kepramukaan				2.000.000.000		2.214.835.038		2.518.088.252		2.808.032.080		3.117.436.372		12.658.391.741	
		Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)	0	9 kwartir			9 kwartir		9 kwartir		9 kwartir		9 kwartir		45 kwartir	Dispora
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 klp	12 klp			14 klp		16 klp		10 klp		10 klp		62 klp	Dispora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 18 2	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga				3.500.000.000		3.875.961.316		4.406.654.440		4.914.056.140		5.455.513.651		22.152.185.547	
		Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%)	17 cabor / 15 event	17 cabor / 17 event		18 cabor / 17 event		19 cabor / 18 event		20 cabor / 18 event		20 cabor / 18 event				Dispora
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				Dispora
1 19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;															
1 19 1	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik				5.000.000.000		5.537.087.595		6.295.220.629		7.020.080.200		7.793.590.930		31.645.979.353	
		Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)	1643	343		353		363		368		368		1643		Badan Kesbangpol
		Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	2104	407		414		426		426		431		2104		Badan Kesbangpol
		Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	6 Keg	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Kesbangpol
1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;															
1 20 1	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum				17.050.000.000		18.881.468.698		21.466.702.345		23.938.473.481		26.576.145.070		107.912.789.594	
		Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Pemerintahan
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro
		Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dok	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok		Biro Ekbang
		Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Ekbang
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah	5%	5%		5%		4,5%		4%		3,5%		3%		Biro Ekbang
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	10 Unit	3 unit		6 unit		9 unit		12 unit		15 unit		45 unit		Biro Ekbang
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dok	10 dok		10 dok		10 dok		10 dok		10 dok		50 dok		Biro Ekbang
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Humas
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Humas
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kantor
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8 dok	16 dok		16 dok		16 dok		16 dok		16 dok		16 dok		Biro Kesra
1 20 2	Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482	
		Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pol PP
		Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pol PP
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pol PP
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Pol PP
1 20 3	Penanggulangan Bencana				5.000.000.000		5.537.087.595		6.295.220.629		7.020.080.200		7.793.590.930		31.645.979.353	
		Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
1 20 4	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah				120.000.000.000		132.890.102.275		151.085.295.094		168.481.924.791		187.046.182.313		759.503.504.474	
		Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Perlengkapan
		Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	4.891 T	5.364 T		5.837 T		6.310 T		6783 T		7256 T		7256 T		Biro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20	5	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		24.000.000.000		26.578.020.455		30.217.059.019		33.696.384.958		37.409.236.463		151.900.700.895		
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.981 T		3.120 T		3.572 T		3.838 T		4.123 T		4.431 T		4.431 T	DPPKD
			Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang	2		2		2		2		2		2		2	DPPKD
			Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3		3		3		3		3		3		3	DPPKD
			Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah	100		100		100		100		100		100		100	DPPKD
			Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100		100		100		100		100		100		100	DPPKD
1	20	6	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah		3.750.000.000		4.152.815.696		4.721.415.472		5.265.060.150		5.845.193.197		23.734.484.515		
			Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Biro Organisasi
1	20	7	Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian		7.350.000.000		8.139.518.764		9.253.974.325		10.319.517.893		11.456.578.667		46.519.589.649		
			Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	BKD
			Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	BKD
			Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	BKD
1	20	8	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		10.000.000.000		11.074.175.190		12.590.441.258		14.040.160.399		15.587.181.859		63.291.958.706		
			Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek	100%		100%		100%		100%		1,00		100%		100%	Badan Diklat
			Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Badan Diklat
1	20	9	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		40.000.000.000		44.296.700.758		50.361.765.031		56.160.641.597		62.348.727.438		253.167.834.825		
			Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
			Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
1	20	10	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		188.619.000.000		208.879.985.009		237.479.643.961		264.824.101.435		294.003.865.515		1.193.806.595.920		
			Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
			Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
			Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seluruh SKPD
1	20	11	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		7.000.000.000		7.751.922.633		8.813.308.880		9.828.112.279		10.911.027.302		44.304.371.094		
			Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Inspektorat
1	20	12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		60.000.000.000		66.445.051.138		75.542.647.547		84.240.962.396		93.523.091.157		379.751.752.237		
			Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	1		1		100%		100%		100%		100%		100%	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	1		1		100%		100%		100%		100%		100%	Set DPRD
			Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	1		1		100%		100%		100%		100%		100%	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	1		1		100%		100%		100%		100%		100%	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1		1		100%		100%		100%		100%		100%	Set DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	1	1		100%		100%		100%		100%		100%			Set DPRD
1	20	13 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM			4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482		
		Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	100%	20%		20%		20%		20%		20%		100%			Biro Hukum
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Biro Hukum
1	20	14 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK			4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482		
		Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	8	34 Dokumen		34 Dokumen		34 Dokumen		34 Dokumen		34 Dokumen		170 Dokumen			Balitbangda
1	21	Ketahanan pangan;															
1	21	1 Ketahanan Pangan Masyarakat			4.500.000.000		4.983.378.835		5.665.698.566		6.318.072.180		7.014.231.837		28.481.381.418		
		Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200	200		200		200		200		200		200			BKPP
		Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	426,9837	521,9676		617,0322		712,0161		807		807		807			BKPP
		Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga)	0	0		0		0		1		0		1			BKPP
		Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	42	52		62		72		82		82		82			BKPP
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	-	100		100		100		100		100		100			BKPP
		Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)	84	87		90		93		96		96		96			BKPP
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	10	10		10		10		11		11		52			BKPP
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	30	40		50		60		70		80		80			BKPP
1	22	Pemberdayaan masyarakat dan desa;															
1	22	1 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan			5.000.000.000		5.537.087.595		6.295.220.629		7.020.080.200		7.793.590.930		31.645.979.353		
		Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	47,72%	60%		70%		80%		90%		100%		100%			BPPMD
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kecamatan	10,06%	11%		11%		12%		12,5 %		13%		13%			BPPMD
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna	1 Posyantek	3 Posyantek		2 Posyantek		Gelar TTG Tingkat		2 Posyantek		2 Posyantek		10 Posyantek			BPPMD
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa)	79,34%	79,34%		85%		85%		90%		100%		100%			BPPMD
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)	2,42%	3,8 %		3,8 %		5%		5%		5%		30,02 %			BPPMD
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan)	3,62%	5%		6,38 %		6,38 %		6,38 %		6,38 %		40,52 %			BPPMD
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 desa/kecamatan	6 desa/kecamatan		6 desa/kecamatan		6 desa/kecamatan		6 desa/kecamatan		6 desa/kecamatan		6 desa/kecamatan			BPPMD
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1261 desa	1261 desa		1261 desa		1261 desa		1261 DESA		1261 desa		1261 desa			BPPMD
1	23	Statistik;															
1	23	1 Penyediaan Data Pembangunan			8.200.000.000		9.080.823.655		10.324.161.831		11.512.931.527		12.781.489.125		51.899.406.139		
		Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	41 Paket	41 Paket		41 Paket		41 Paket		41 Paket		41 Paket		205 Paket			Seluruh SKPD
1	24	Kearsipan															
1	24	1 Pembinaan Kearsipan Daerah			1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871		
		Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	17 (40%)	22 (51%)		27 (63%)		32 (74%)		38 (88%)		41 (100%)		41 (100%)			BPAD
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	17 (40%)	22 (51%)		27 (63%)		32 (74%)		38 (88%)		41		41			BPAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	25	Komunikasi dan Informatika;															
1	25	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika			2.500.000.000		2.768.543.797		3.147.610.314		3.510.040.100		3.896.795.465		15.822.989.677		
		Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017.	6,2%	55,79%		68,42		85,26		86,84		100%		100%			Dishubkominfo
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	20%	20%		30%		40%		60%		75%		75%			Set KPID
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	20%	20%		30%		40%		60%		75%		75%			Set KPID
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Set KPID
1	26	Perpustakaan.															
1	26	1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca			1.500.000.000		1.661.126.278		1.888.566.189		2.106.024.060		2.338.077.279		9.493.793.806		
		Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	200 (40%)	240 (48%)		280 (56%)		320 (64%)		360 (72%)		500 (100%)		500 (100%)			BPAD
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	0	60 (48%)		70 (56%)		80 (64%)		90 (72%)		125 (100%)		125 (100%)			BPAD
1	26	2 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan			1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871		
		Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	1 (2%)	9 (21%)		18 (43%)		26 (62%)		34 (81%)		42 (100%)		42 (100%)			BPAD
2		URUSAN PILIHAN															
2	1	Pertanian;															
2	1	1 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan			7.500.000.000		8.305.631.392		9.442.830.943		10.530.120.299		11.690.386.395		47.468.969.030		
		Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.017.956	2.088.584		2.088.584		2.237.344		2.315.651		2.396.699		2.396.699			Distanak
		Surplus Beras (ton)	15.693	28.642		43.360		56.855		72.154		88.270		88.270			Distanak
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	24.000	26.000		28.000		30.000		32.000		34.000		34.000			Distanak
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	50.000	60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		100.000			Distanak
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	31.421	26.165		27.766		29.342		30.809		32.350		33.967			Distanak
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	27.124.558	28.845.149		30.690.558		32.669.754		34.792.645		37.069.669		37.069.669			Distanak
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500	500		500		500		500		500		500			Hutbun
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	4	4		3		3		3		3		3			Hutbun
		Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1	1		1		1		1		1		1			Hutbun
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3	3		3		3		3		3		3			Hutbun
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	65.000	65.000		85.000		107.000		107.000		107.000		107.000			Hutbun
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	66.427	66.950		67.150		68.025		69.200		70.050		70.050			DKP
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115	> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100			DKP
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1	1		1		1,50		1,60		1,70		1,70			DKP
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	143.607	150.000		160.000		170.000		180.000		190.000		190.000			DKP
2	1	2 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan			6.000.000.000		6.644.505.114		7.554.264.755		8.424.096.240		9.352.309.116		37.975.175.224		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	104	104		105		105		105		106		106			Distanak
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	2	4		4		4		3		3		3			Distanak
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	5	7		8		9		10		11		11			Distanak
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6	6		6		6		6		6		6			Hutbun
		Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan	150	250		250		250		250		250		250			Hutbun
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,70%	0,72%		0,75%		0,77%		0,80%		0,85%		0,85%			DKP
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	1000	1750		2500		3250		4000		5000		5000			DKP
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	25	26		27		28		29		30		30			DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	1	3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan		3.750.000.000		4.152.815.696		4.721.415.472		5.265.060.150		5.845.193.197		23.734.484.515	
			Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		Distanak
			Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	20	22	24	26	28	30	30	30	30	30	30		Distanak
			Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		BKPP
2	1	4	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian		2.500.000.000		2.768.543.797		3.147.610.314		3.510.040.100		3.896.795.465		15.822.989.677	
			Cakupan ketersediaan Traktor (unit)	14	20	27	31	35	40	40	40	40	40	40		Distanak
			Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Distanak
			Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	8200	3000	3200	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Distanak
2	2		Kehutanan;													
2	2	1	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan		1.250.000.000		1.384.271.899		1.573.805.157		1.755.020.050		1.948.397.732		7.911.494.838	
			Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Hutbun
2	3		Energi dan Sumber Daya Mineral;													
2	3	1	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi		40.000.000.000		44.296.700.758		50.361.765.031		56.160.641.597		62.348.727.438		253.167.834.825	
			Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125000		Distamben
			Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)		106	312	314	480	314	480	314	1353	1353			Distamben
			Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)		85	90	100	0	0	0	0	100	100			Distamben
2	3	2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi		4.000.000.000		4.429.670.076		5.036.176.503		5.616.064.160		6.234.872.744		25.316.783.482	
			Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok)		12	14	9	12	11	11	11	11	58			Distamben
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)		4	4	4	4	4	4	4	4	20			Distamben
2	3	3	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi		2.000.000.000		2.214.835.038		2.518.088.252		2.808.032.080		3.117.436.372		12.658.391.741	
			Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi		10	10	10	10	10	10	10	10	50			Distamben
			Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)		1	1	1	1	1	1	1	5				Distamben
			Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)		4	4	4	4	4	4	4	20				Distamben
2	4		Pariwisata;													
2	4	1	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata		4.500.000.000		4.983.378.835		5.665.698.566		6.318.072.180		7.014.231.837		28.481.381.418	
			Meningkatnya pengembangan daya tarik		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%				Disbudpar
			Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi		23,08%	15%	23,08%	15,38%	23,08%	100%	100%	100%				Disbudpar
			Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%				Disbudpar
			Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri		20,11%	20%	19,84%	20,11%	20,11%	100%	100%	100%				Disbudpar
2	4	2	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata		3.000.000.000		3.322.252.557		3.777.132.377		4.212.048.120		4.676.154.558		18.987.587.612	
			Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%				Disbudpar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)		21,34%		20%		19,67%		19,67%		19,67%		100%		Disbudpar
		Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya		21,88%		21%		19,53%		18,75%		18,75%		100%		Disbudpar
2	5	Kelautan dan perikanan;														
2	5	1 Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil			1.500.000.000		1.661.126.278		1.888.566.189		2.106.024.060		2.338.077.279		9.493.793.806	
		Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1	1		1		1		1		1		1		DKP
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12	12		12		12		12		12		12		DKP
2	6	Perdagangan;														
2	6	1 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan			3.500.000.000		3.875.961.316		4.406.654.440		4.914.056.140		5.455.513.651		22.152.185.547	
		Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
2	7	Industri;														
2	7	1 Peningkatan Daya Saing Industri			2.000.000.000		2.214.835.038		2.518.088.252		2.808.032.080		3.117.436.372		12.658.391.741	
		Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)		20%		20%		20%		20%		20%		100%		Disperindag
2	8	Ketransmigrasian														
2	8	1 Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi			1.000.000.000		1.107.417.519		1.259.044.126		1.404.016.040		1.558.718.186		6.329.195.871	
		Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita	350 KK	350 KK		350 KK		350 KK		350 KK		350 KK		350 KK		Disnakertrans
		Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	155 KK	165 KK		175 KK		185 KK		190 KK		200 KK		200 KK		Disnakertrans
Jumlah					2.376.819.000.000,00		2.632.131.000.000,00		2.992.520.000.000		3.337.092.000.000		3.704.791.000.000		15.043.353.000.001	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2012-2017 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Dalam hal penetapan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada :

- 1) Sasaran Pembangunan Provinsi Banten berdasarkan RPJMN 2010-2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
- 2) Tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs);
- 3) Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2007-2011, untuk proyeksi 2012-2017.

Setelah melalui penelaahan capaian IPM tahun 2007-2012 dan menggali kembali asal mula proyeksi indikator makro pembangunan Banten tahun 2001-2010 perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sepanjang periode 2008-2010 meningkat cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya

kuantitas penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis (AMH) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk hingga masing-masing mencapai 96,20% dan 8,32 tahun pada tahun 2010. Disamping itu, kualitas penduduk Banten secara rata-rata lebih tinggi dibanding nasional karena AMH dan RLS nasional hanya 92,91% dan 7,92 tahun.

Meningkatnya kualitas penduduk Banten didorong oleh semakin bertambahnya akses penduduk terhadap pendidikan, yang dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Sepanjang periode 2008-2010, APS penduduk Banten untuk berbagai kelompok umur terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, tingkat partisipasi sekolah penduduk Banten pada tahun 2010 ternyata masih lebih rendah dibanding Nasional yang rata-rata mencapai 98,02% (umur 7-12 tahun), 86,24% (umur 13-15 tahun) dan 56,01% (umur 16-18 tahun).

Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan Target Indikator Makro, selain mendasarkan situasi dan kondisi yang ada juga memperhatikan target capaian yang ada di RPJMN 2009-2014 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Berikut target Indikator Makro Pembangunan berdasarkan RPJMN Tahun 2009-2014 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang menjadi perhatian dalam menentukan target Indikator Makro Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 9.1, 9.2, 9.3, dan 9.4.

Tabel 9.1
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran
di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2014

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMISKINAN		PENGANGGURAN	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	6,5 – 7,1	6,9 – 7,7	2,75 -2,69	0,54 – 0,53	10,3 – 11,4	8,3 – 9,2
Jawa Barat	5,0 – 5,6	6,2 - 6,8	9,12 – 8,91	4,15 - 4,12	10,4 – 11,5	8,8 – 9,8
Jawa Tengah	6,2 – 6,8	7,1 – 7,7	14,92 – 14,34	11,58 – 11,37	7,1 – 7,8	5,4 – 6,0
DI Yogyakarta	4,8 – 5,3	6,2 – 6,9	15,36 – 15,03	11,87 – 10,76	5,5 – 6,1	4,3 – 4,7
Jawa Timur	5,8 – 6,4	7,1 – 7,8	14,62 – 14,24	11,23 – 10,95	6,5 – 7,2	5,7 – 6,3
Banten	5,9 – 6,4	6,5 – 7,2	6,79 – 6,23	3,13 – 3,09	15,4 – 17,0	14,9 – 16,5
Bali	5,8 – 6,1	6,8 – 7,3	4,12 – 4,01	1,12 – 1,11	4,4 – 4,9	3,4 – 3,7
Nasional	5,5 - 5,6	7,0 - 7,7	12,0 - 13,5	8,0 - 10,0	7.6	5,0 - 6,0

Sumber : RPJMN 2009-2014

Tabel 9.2
Sasaran Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Jawa Bali Tahun 2010-2014

PROVINSI	ANGKA KEMATIAN BAYI		RATA-RATA LAMA SEKOLAH		ANGKA HARAPAN HIDUP		PENDAPATAN PERKAPITA (RP.RIBU)	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	8	7	11,6	12,4	75,84	76,51	41.394,40	48.539,90
Jawa Barat	27	24	8,10	8,70	70,36	71,41	7.535,00	8.650,10
Jawa Tengah	21	18	7,44	8,08	72,21	73,06	6.183,00	8.402,80
DI Yogyakarta	9	8	8,98	9,46	75,62	76,39	6.346,40	8.372,40
Jawa Timur	25	21	7,46	8,02	71,09	72,27	9.458,60	12.228,40
Banten	32	29	8,50	8,90	69,26	70,06	8.665,00	11.724,10
Bali	13	12	8,24	8,88	70,09	74,48	8.096,20	10.311,10

Sumber : RPJMN 2009-2014

Tabel 9.3
Capaian dan Estimasi Tahun Perencanaan Indikator Makro Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN				
			2008	2012	2017	2022	2025	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,82	6,5 – 6,8	6,8 – 7,0	7,0 – 7,4	7,4 – 7,8	
2	PDRB a.d.h. Berlaku	Rp. Trilyun	122,497	180,68	282,96	430,13	548,88	
3	PDRB a.d.h. Konstan	Rp. Trilyun	68,83	87,75	119,95	166,24	203,60	
4	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	12,76	17,14	24,52	34,12	45,06	
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.602.445	10.501.425	11.526.493	12.626.715	13.164.799	
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,15	2,00	1,86	1,71	1,62	
7	Persentase Pengangguran Terbuka	%	6,8	5,6 – 5,2	5,2 – 4,8	4,8 – 4,4	4,4 – 4,0	
8	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	816.742	650.000 – 600.000	600.000 – 550.000	550.000 – 500.000	500.000 – 450.000	
9	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	33,04	25,0 – 23,0	20,0 – 15,0	15,0 – 10,0	10,0 – 5,0	
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,7	72,88	75,48	78,08	80,08	

Sumber : RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025

Tabel 9.4
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2010-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	CAPAIAN		TARGET					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,48	72,47	72,92	73,47	74,02	74,57	75,13	75,69
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	6,43	6,0-6,45	6,5-6,7	6,6-6,8	6,7-6,8	6,8-6,9	6,8-7,0
3	Porsentase Penduduk Miskin	%	7,06	6,26	5,79-5,34	5,5-5,2	5,3-5,0	5,1-4,8	4,9-4,7	4,8-4,6
4	Porsentase Pengangguran Terbuka	%	13,68	13,06	10,74	10,24	9,74	9,24	8,74	8,24

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pencapaian target pada indikator makro pembangunan tersebut diperlukan angka proyeksi yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 dan 9.12.

Tabel 9.5
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Serang
Tahun 2009-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KOTA SERANG 2008-2013 (PERDA NO. 25 TAHUN 2011)					PROYEKSI
			2009	2010	2011	2012	2013	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Poin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	71,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,44	7,63	5,56	5,63	5,63	7,8
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,0
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	16,0

Tabel 9.6
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Cilegon
Tahun 2011-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KOTA CILEGON 2011-2015 (PERDA NO. 21 TAHUN 2010)					PROYEKSI
			2011	2012	2013	2014	2015	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Poin	75,60	75,90	76,20	76,61	76,81	76,85
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,26	5,44	5,57	5,66	5,86	6,10
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4,00
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	(%)	16,4	14,9	13,4	11,8	10,1	9,50

Tabel 9.7
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Tangerang
Tahun 2009-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KOTA TANGERANG 2009-2013 (PERDA NO. 1 TAHUN 2009)					PROYEKSI
			2009	2010	2011	2012	2013	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	76,30
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	4,82	5,37	6,56	6,89	6,94	7,15
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,10
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13,50

Tabel 9.8
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kota Tangerang Selatan
Tahun 2011-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN 2011-2016 (PERDA NO. 11 TAHUN 2011)						PROYEKSI
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,74	75,94	76,14	76,33
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	8,80
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	1,65-1,66	1,64-1,65	1,63-1,64	1,62-1,63	1,61-1,62	1,60-1,61	1,58
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	7,89-8,1	7,58-8,0	7,27-7,9	6,98-7,90	6,70-7,82	6,70-7,82	7,30

Tabel 9.9
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Serang
Tahun 2009-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KAB.SERANG 2009-2014 (PERDA NO. 4 TAHUN 2011)						PROYEKSI
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017
			1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,30	67,64	67,94	68,24
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	3,26	3,79	4,00	4,20	4,35	4,60	4,90
3	Prosentase Penduduk Sangat Miskin	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,00
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	(%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	15,10

Tabel 9.10
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KAB.PANDEGLANG 2011-2016 (PERDA NO. 9 TAHUN 2011)						PROYEKSI
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,87	70,59	71,31	72,03
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,00	5,10	5,10	5,20	5,20	5,30	6,90
3	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	jiwa	129.922	126.246	122.673	119.201	115.828	115.828	115.500 (10,8%)
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	10,36	10,11	9,85	9,59	9,34	9,08	9,00

Tabel 9.11
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2017

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KAB.LEBAK 2009-2014 (PERDA NO. 7 TAHUN 2011)						PROYEKSI
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017
			1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,30	67,64	67,94	68,24
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	3,26	3,79	4,00	4,20	4,35	4,60	4,80
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	10,63	10,38	10,04	9,7	9,36	9,03	8,90
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	13,42	13,35	13,28	13,21	13,14	13,07	13,00

Tabel 9.12
Target dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tangerang
Tahun 2009-2013

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	RPJMD KAB. TANGERANG (PERDA)								PROYEKSI
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Poin	71,45	71,76	72,06	72,36	72,66	72,96	73,26	73,56	73,86
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	4,41	6,71	6,4	6,51	6,62	6,7	6,82	6,91	7,26
3	Prosentase Penduduk Miskin	(%)	6,55	7,18	6,68	6,38	6,08	5,78	5,48	5,18	4,88
4	Porsentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	(%)	15,86	14,01	13,76	13,51	13,26	13,01	12,76	12,51	12,26

Penetapan indikator kinerja daerah pada RJMD Tahun 2012-2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagaimana diuraikan Tabel 9.13.

Tabel 9.13
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten
Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
a	Indeks Gini (0 - 1)	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
b	PDRB per kapita (Rp)	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
a	Angka Melek Huruf (%)	96,20	96,36	96,52	96,68	96,84	97,00	97,00
b	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,09	9,19	9,29	9,47	9,65	9,65
c	Angka Partisipasi Murni							
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,76	99	99,24	99,48	99,72	99,95	99,95
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	71,45	72,87	74,32	75,80	77,31	78,85	78,85
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	48,43	49,39	50,37	51,37	52,39	53,43	53,43
d	Angka Partisipasi Kasar							
	- Angka Partisipasi Kasar (APK)	117,88	118,11	118,34	118,70	118,80	119,03	119,03

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	SD/MI/Paket A (%)							
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	98,88	99,10	99,32	99,54	99,76	100	100
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	61,87	65,87	69,87	73,87	77,87	81,87	81,87
2.2	Kesehatan							
e	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,10	66,70	67,30	67,90	68,50	69,10	69,10
f	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	28,90	28,20	27,60	26,98	26,40	25,70	25,70
g	Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)	165	155	125	115	105	100	100
2.3	Sosial							
h	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0
i	Cakupan Pelayanan PMKS (%)	4,28	5,27	6,26	7,25	8,24	14,23	14,23
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
a	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (%)	81,70	81,86	82,02	82,18	82,34	82,50	82,50
b	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)	50,90	51,00	51,10	51,20	51,30	51,40	51,40
1.2	Pekerjaan Umum							
c	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	71,15	78,15	85,15	92,15	99,15	100	100
d	Tingkat Kemantapan Jembatan (%)	86,00	88	90	92	94	96	96
e	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	17.029,64	18.218,52	19.407,39	20.596,26	21.785,14	22.974,00	22.974,00
f	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,0	4,5	4,67	4,83	5,17	6,50	6,50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
g	Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)	74,06	74,53	75	75,47	75,94	80	80
h	Rasio Kemandirian Daerah	76,4	76,7	77	77,3	77,6	77,8	77,8
i	Opini Audit BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
j	Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,5	3,5
k	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	-	-	64,40	-	66,33	-	66,33
l	Indeks Demokrasi Indonesia	70,98	71,98	72,98	73,98	74,98	75,98	75,98
1.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
m	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)	5	5,5	6	6,5	7	7	7
1.5	Perencanaan Pembangunan							
n	Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)	80	55	60	70	80	90	90
o	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah	4	4	4	4	4	4	20
1.6	Kepemudaan dan Olahraga							
p	Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan	60	65	70	75	80	80	80
q	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	17	19	21	23	25	25	25

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.7	Kebudayaan							
r	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah	60	65	70	75	80	80	80
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Pertanian							
a	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	11	11	11	11	11	11	11
b	Pertumbuhan Sektor Peternakan (%)	10	10	10	10	10	10	10
c	Pertumbuhan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) (%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2	Kehutanan							
d	Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
e	Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)	15	15	15	15	15	15	15
2.4	Pariwisata							
f	Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
2.5	Kelautan dan Perikanan							
g	Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2.6	Perdagangan							
h	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11	11	11	11	11	11	11
2.7	Perindustrian							
i	Pertumbuhan sektor Industri (%)	10	10	10	10	10	10	10

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
a	Daya Beli Masyarakat (Rp)	634.938	637.406	639.873	642.341	644.809	647.276	647.276
b	Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	350.196	394.893	429.550	464.287	498.984	533.681	533.681
c	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	402.873	439.822	476.672	513.521	550.371	587.220	587.220
1.2	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah							
d	Persentase Wirausaha Baru (%)	16,66	17,33	18,00	18,67	19,34	20,66	20,66
1.3	Penanaman Modal							
e	Laju Pertumbuhan Investasi (%/Tahun)	13,35	13,38	13,41	13,43	13,47	13,70	13,70
1.4	Ketahanan Pangan							
f	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)	200	200	200	200	200	200	1.000
1.5	Pertanian							
g	Indeks Tanam (Padi)	204	204	204	204	204	204	204
2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.1	Pekerjaan Umum							
a	Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)	67,01	70,53	74,05	77,57	81,09	84,61	84,61
b	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)	27,47	32,87	37,48	42,48	47,49	52,50	52,50
c	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi	40	50	60	70	80	80	80
2.2	Perumahan							
d	Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)	20	19	18	17	16	15	15
2.3	Lingkungan hidup							
e	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)	62	62,5	63	63,5	64	64,5	64,5
f	Jumlah Hari Dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)	360	360	360	360	360	360	360
g	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Banten (%)	15,74	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
h	Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)	2.767,82	3.754,79	4.741,77	5.728,745	6.715,72	6.710,00	6.710,00
2.4	Penataan Ruang							
i	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,0	4,5	4,67	4,83	5,17	6,50	6,50
2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
j	Jumlah Penerapan Energi Alternatif (Unit)	86	106	312	345	408	514	514

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
k	Rasio Elektrifikasi (%)	81,04	83,04	85,04	87,04	89,04	91,04	91,04
3	Iklim Berinvestasi							
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
a	Angka Kriminalitas	2.329	2.228	2.127	2.026	1.925	1.804	1.804
b	Cakupan Penyelesaian PERDA (%)	80	85	90	95	100	100	100
c	Cakupan Penegakan PERDA (%)	80	85	90	95	100	100	100
d	Cakupan Mitigasi Kebencanaan	60	65	70	75	80	80	80
4	Sumber Daya Manusia							
4.1	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
a	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,00	1,98	1,95	1,92	1,89	1,86	1,86
4.2	Ketenagakerjaan							
b	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,24	72,54	74,85	77,15	79,46	81,13	81,13
c	Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	30	35	40	45	50	50	50
4.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
d	Indeks Pembangunan Gender (%)	64,38	65,09	65,99	67,09	68,29	69,39	69,39
e	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	67,05	67,26	67,40	68,45	68,77	68,98	68,98

BAB X

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini merupakan arah dan target kinerja pembangunan yang hendak dicapai lima tahun mendatang. Proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (RTRW) Tahun 2010-2030 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Selain itu juga memperhatikan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 dan rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2007-2012.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menjadi acuan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Banten serta penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

10.1 Pedoman Transisi

Penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 mengacu pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2017-2022. Bilamana RPJMD Tahun 2017-2022 belum ditetapkan, maka target indikator kinerja program dan pagu indikatif Tahun 2018 dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur periode Tahun 2017-2022 dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Implementasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2017 ini dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD setiap tahun anggaran.
4. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2012-2017 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, SKPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota wajib mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
7. Untuk menjaga sinergisitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Banten

berkewajiban memberikan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Demikian Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Banten.

GUBERNUR BANTEN

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 – 2017

I. UMUM

Rencana pembangunan merupakan arah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu perencanaan pembangunan adalah RPJMD yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dengan terpilihnya Gubernur Banten Periode 2012-2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan: “Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik”.

Dalam rangka penyusunan RPJMD, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan tahapan berupa:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD.

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012
NOMOR 4